

Laporan Penelitian Individual

**REINVENTING PEDAGOGY
PESANTREN: UPAYA REKONSTRUKSI
ILMU PENDIDIKAN NUSANTARA**



Oleh:

Dr. Syamsul Ma'arif, M. Ag

NIP: 197410302002121002/Lektor Kepala/III.d

DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIPA

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
(FITK)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Laporan Penelitian Individual

**REINVENTING PEDAGOGY
PESANTREN: UPAYA REKONSTRUKSI
ILMU PENDIDIKAN NUSANTARA**



Oleh:

Dr. Syamsul Ma'arif, M. Ag

NIP: 197410302002121002/Lektor Kepala/III.d

**DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIPAA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
(FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7615923 Semarang 50185 email: lppm.walisongo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/L.1/TL.03/873/2015

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, dengan ini menerangkan bahwa penelitian Individual yang berjudul:

**REINVENTING PEDAGOGY PESANTREN: UPAYA
REKONTRUKSI ILMU PENDIDIKAN NUSANTARA**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Dr. Syamsul Ma'arif, M. Ag
NIP : 197410302002121000
Pangkat/Jabatan: Penata Tk. I (III/d) / Lektor Kepala
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 15 Oktober 2015

Ketua,

Dr. H. Sholihan, M.Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil 'alamin* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang menggenggam alam semesta dengan segala isinya. Berkat hidayah, inayah, dan rahmat-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini. Sungguh, menyelesaikan penulisan penelitian ini, bukan perkara mudah. Butuh kerja ekstra dan meluangkan waktu yang cukup, di tengah kesibukan penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas harian sebagai Dosen. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *khatimul ambiya' wal mursalin*, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penelitian ini, penulis sudah selayaknya menyampaikan ungkapan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mensuport penulisan penelitian ini. Terutama sekali kepada Dekan FITK UIN Walisongo, yang telah memberi izin melaksanakan penelitian ini. Dan, Ketua LP2M UIN Walisongo,

yang telah memberikan surat pengesahan penelitian ini.

Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan mereka, hanya ungkapan *jazakumullah khairal jaza'* dan semoga tergolong sebagai amal jariyah. *Amin, ya mujibas sailin!*

Semarang, September 2015

Penulis,

Dr. Syamsul Ma'arif, M. Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 Bab I: PENDAHULUAN	1
 Bab 2: REKONSTRUKSI ILMU	
PENDIDIKAN	1
A. Ilmu dan Filsafat Pendidikan	10
B. Geneologi Ilmu Pendidikan	21
C. Struktur Ilmu	29
1. Ontologi	30
2. Epistemologi	31
3. Aksiologi	33
D. Karakteristik Ilmu Pendidikan	34
E. Struktur Ilmu Pendidikan	37
1. Pendidik	40
2. Peserta Didik	50
3. Tujuan Pendidikan	51

4. Metode	53
5. Lingkungan Pendidikan	58
F. Teori-Teori Pendidikan	61

Bab 3: REKONSTRUKSI ILMU

PENDIDIKAN NUSANTARA 67

A. Dinamika Ilmu Pendidikan

di Indonesia	67
1. Pada Era Penjajahan	70
2. Pada masa Orde Lama	86
3. Pada Masa Orde Baru	90
4. Pada Masa Reformasi	96

B. Pemecahan Masalah dengan Membangun Ilmu Pendidikan

Nusantara	105
1. Perlunya menggeser ilmu pendidikan dari konservatif dan liberal ke arah pendidikan rekonstruktif dan kritis-transformatif	106
2. Praktik pendidikan perlu	

berlandaskan pada ilmu pendidikan	110
--	-----

3. Membangun Ilmu

Pendidikan Nusantara	117
----------------------------	-----

Bab 4: PESANTREN SEBAGAI

MODEL PENDIDIKAN

NUSANTARA134

A. Pesantren Sebagai

Model Alternatif	134
------------------------	-----

B. Mengenal Dunia

Pesantren	144
1. Pengertian Pesantren	144
2. Landasan Sistem Pendidikan Pesantren	149
3. Sejarah Pesantren	152
4. Tipologi Pesantren	167
5. Eksistensi Pesantren	175
6. Karakteristik dan Unsur-unsur dalam Pesantren	184
a. Kiai	193
b. Asrama (pondok)	200

c. Masjid	203
d. Santri	205
e. Kitab Kuning	207
7. Pesantren & Tradisi Intelektualisme	210
Bab 5: PEDAGOGY PESANTREN	217
A. Pengertian dan Sejarah Pedagogy Pesantren	217
B. Tujuan Pedagogy Pesantren	223
C. Kurikulum Pesantren	234
1. Kurikulum berbentuk pendidikan Agama Islam.....	236
a. Al-Qur'an	237
b. Nahwu-Sharaf	238
c. Fiqih	239
d. Aqa'id	240
e. Tasawuf dan Akhlak	241
f. Tafsir	242
g. Hadits	243
h. Bahasa Arab	243
2. Kurikulum berbentuk	

pengalaman dan pendidikan moral.....	244
3. Kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum	245
4. Kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus.....	248
D. Pengajaran Pesantren: Mendidik dengan Hati	251
E. Metode Pendidikan dalam Dunia Pesantren	261
1. Metode Sorogan (<i>Individual Learning Process</i>)	262
2. Metode Wetonan (<i>collective Learning Person</i>) ...	268
3. Metode Hafalan dan <i>Majlis Ta'lim</i>	271
4. Mudzakah, <i>Musyawarah</i> , Dan <i>Bahtsul Masail</i>	273

Bab 6: PESANTREN DAN ISU-ISU KONTEMPORER	278
A. Pesantren dan Demokrasi	278

B. Membangun Kesetaraan	
Gender dan Partisipasi Politik	
Perempuan	294
C. Peningkatan Mutu Pesantren....	299
D. Mewujudkan Pesantren	
Integratif	304
E. Paradigma Keilmuan	
Pesantren Masa Depan	314

Bab I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia hingga kini, harus diakui belum menunjukkan keberhasilannya mengantarkan manusia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 20/2003 tentang UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bertujuan "menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Sebuah tujuan pendidikan nasional yang lahir dan menjadi keinginan bersama setiap penyelenggara pendidikan di negara Indonesia. Tujuan seperti ini tampak berbalik arah dengan kenyataan pendidikan kita yang ditengarai oleh banyak pihak masih banyak melahirkan manusia dengan karakter yang justru jauh dengan pandangan, sikap dan budaya masyarakat ketimuran.

Belum berhasilnya merealisasikan tujuan pendidikan tersebut salah satunya, karena pendidikan kita belum mempunyai sebuah sistem pendidikan yang mantap dan digali/bersumber berdasarkan kebudayaan bangsa sendiri yang berasal dari tradisi dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya serta telah berkembang masyarakat. Justru, sistem pendidikan yang dirumuskan dan diaplikasikan sering tergoda dengan sistem pendidikan yang dikembangkan negara asing. Apabila terjadinya masifikasi gelombang modernitas sekarang ini, sungguh telah menyeret dunia pendidikan kita hanyut mengikuti mainstream modernitas tersebut dengan alasan takut teralienasi atau dicap sebagai sistem pendidikan yang kuno, kolot dan *kedaluwarsa*.

Dalam kondisi seperti itu, hegemoni konsep pendidikan ala barat memang sulit bisa dihindari cenderung mencibirkan konsep-konsep dan ajaran lokal meskipun diyakini syarat dengan nilai-nilai moral. Hal ini merupakan indikasi bahwa pendidikan di Indonesia telah mengkhianati amanat karena gagal memelihara nilai-nilai yang mengakar pada masyarakat (Pujiriyanto 2006: 2). Akibatnya, praktik pendidikannya nampak

terombang-ambing, tidak selaras dengan kebutuhan pada masing-masing daerah dan belum mempunyai landasan yang kuat karena tidak berangkat dari filosofi pendidikan khas nusantara.

Berkaca pada sistem pendidikan bangsa lain yang terbukti telah mengantarkan pada kemajuan dan kebesaran bangsa mereka, bukan berarti tidak penting. Sebut saja seperti Negara Newzealand, Amerika, Australia, Jepang, dan negara-negara besar lainnya yang mempunyai sistem pendidikan yang didasarkan pada ilmu pendidikan dan selalu dikembangkan melalui dunia riset dan teori-teori pendidikan yang baik serta memiliki "kekhasan" karena berbasis pada identitas dan kebudayaan mereka masing-masing. Proses *lending* dan *borrowing* semacam itu perlu dan seharusnya dilakukan, agar kita bisa membandingkan dan terpacu selalu mengembangkan ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa maju dan modern, bahkan bisa menyerap dan mengadopsi teori-teori pendidikan mereka dan diaplikasikan pada sistem pendidikan kita. Tetapi, tentu saja harus melalui *selection proses* dan sikap waspada agar tidak terkesan "gelap mata" dan dipaksakan

dalam tataran praktiknya. Apalagi jika ditengah terdapat beberapa sistem pendidikan yang apabila di bisa berimbas pada hilangnya kepribadian, karakter dan identitas sebagai anak bangsa.

Bukankah kalau kita sadari, kegagalan sistem pendidikan di Indonesia selama ini, sebetulnya disebabkan oleh proses coba-coba yang senantiasa ditawarkan oleh sejumlah penguasa yang *notabene* jebolan dari sejumlah perguruan tinggi dari barat. Di perguruan tinggi mana mereka lulus, sistem dan paradigma pendidikan yang dipakainya berusaha mereka tiru dan dikembangkan di tanah air. Tetapi mereka lupa melakukan proses penyesuaian dan terkesel dipaksakan. Maka, akhirnya menghadapi berbagai persoalan, seperti perbedaan kultur dan minimnya infrastruktur yang dimiliki bangsa ini yang seharusnya dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya terlebih dahulu.

Selain itu, sistem pendidikan kita dalam sejarahnya sejak awal (hingga sekarang) dalam pemikirannya sudah terjadi persaingan yang sangat tajam antara dua pihak yang saling berlomba mengembangkan diri dan

mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan pola pendidikan di masyarakat. Paling tidak terdapat tujuh pola ketegangan yang secara riil menjadi masalah dan tantangan dunia pendidikan kita, yaitu 1) apakah diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan dengan permasalahan global atau melestarikan nilai-nilai lokal 2) apakah pendidikan diarahkan pada upaya meraih hal-hal yang bersifat universal atau individual 3) apakah mengikuti perkembangan modernitas atau mengikuti nilai-nilai tradisional 4) apakah memecahkan masalah jangka pendek atau jangka panjang 5) apakah pendidikan diarahkan agar peserta didik dapat berkompetisi atau dalam pemerataan kesempatan 6) apakah untuk mengejar pengetahuan sebanyak-banyaknya, atau untuk mengasimilasikan pengetahuan yang diperolehnya, dan 7) apakah pendidikan diarahkan untuk mengejar hal-hal yang material atau mengembangkan hal-hal yang spiritual (Dardiri, 2009: 202).

Melihat ketujuh pola ketegangan tersebut sampai sekarang masih terjadi dan mewarnai pelaksanaan pendidikan kita. Ambil saja contoh kedua pola

ketegangan antarpemikiran tradisional dan pemikiran rasional/modernitas. Letak pertentangannya pada pemikiran tradisional ini selalu mendasarkan diri pada wahyu/agama, yang cenderung sangat memperhatikan aspek-aspek batiniyah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Sedangkan pada pola pemikiran rasional senantiasa mementingkan akal pikiran, empiris dan penguasaan material (Tafsir, 1990: 121-123). Kedua pola ini, bukan berarti tidak diupayakan oleh pemerintah untuk terintegrasi satu sama lain. Lahirnya kurikulum 2013 yang dikomandani M. Nuh dan akhirnya dihentikan oleh Anis Baswedan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebenarnya bercita-cita untuk memadukan masalah klasik tersebut selain hanya berbasis karakter. Tapi lagi-lagi masih terjebak pada nalar penguasa dan menemukan sejumlah persoalan pada tataran praktiknya.

Ironisnya lagi, praktik pendidikan di Indonesia sengaja dijauhkan dari ilmu pendidikan yang dapat mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan. Bahkan dengan mempertimbangkan pendidikan sebagai ilmu, tentu saja pendidikan bisa dilihat sebagai sesuatu

yang *observable*, dinamis dan selalu berkembang berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Penelitian pendidikan, sebagaimana penjelasan J. P. Keeves harus diselaraskan dengan perkembangan sosial yang terjadi dengan melibatkan interaksi antara dunia 1 (*the Real World*), dunia 2 (*The Learner's Mind*), dan dunia 3 (*Body of Knowledge*), dengan sebuah pendekatan baik yang bersifat teoritis, proses hermeneutik maupun hermeneutik ganda (*double hermeneutic*) untuk menemukan, mengembangkan ilmu pendidikan dan sekaligus melakukan aksi-aksi sosial (Keeves & Lakomski, 1999: 5). Bukan malah sebaliknya, pendidikan terkesan menutup diri dari dunia penelitian dan tercerabut pada konteks sosial-masyarakatnya.

Meskipun begitu, sebenarnya di negara kita telah dilakukan sejumlah penelitian-penelitian terkait pendidikan, namun sayangnya penelitian yang dikembangkan masih berkutat pada paradigma mana yang memperkuat kepentingan penguasa. Akibat dari sistem pendidikan yang cenderung didominasi oleh penguasa (*power domination*), pendidikan semakin salah

arah, tidak netral dan tidak mengikuti peta pendidikan yang seharusnya. Bukankah sudah maklum jika Perubahan politik di negara ini selalu mengorbankan konsep dan sistem pendidikan sehingga kesinambungan program-program pendidikan tidak pernah berhasil. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah baru, selalu tidak didasarkan pada pemikiran filosofis-kritis dan nampak pendidikan hanya memuaskan pemerintah saja. Sebagai contoh ada terdapat beberapa ketentuan dalam No 20/2003 tentang UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang disinyalir masih menyimpang dari konstitusi dan tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari publik (Majalah BMK: 4). Padahal peta pendidikan seharusnya mencerminkan relasi seimbang, sebagai bentuk perwujudan keinginan bersama-sama antara keinginan penguasa (*power*), sekolah (*school*), dan masyarakat (*community*).

Pendek kata, sungguh pendidikan di negara ini masih terkesan mengikuti nalar pragmatisme yang mengesampingkan realitas sekolah dan masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk serta memiliki

masalah-masalah dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Penentuan sistem pendidikan Indonesia belum didasarkan pada gambaran sebuah negarayang luas dan tentu saja memiliki sekolah dengan macam model sosialnya, kebudayaan, adat-istiadat, suku, ras, bahasa, karakter, dan kepribadian masyarakatnya. Padahal semestinya kemajemukan ini harus dipandang sebagai anugerah yang seharusnya dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan dan menginspirasi setiap pembentukan sistem dan ilmu pendidikan yang akan diterapkan di negara ini, sehingga tidak menimbulkan sejumlah persoalan dikemudian hari.

A. Ilmu dan Filsafat Pendidikan

Memperbincangkan pendidikan tidak akan pernah mengalami titik final, sebab pendidikan merupakan permasalahan besar kemanusiaan yang akan senantiasa aktual untuk diperbincangkan pada setiap waktu dan tempat yang tidak sama atau bahkan berbeda sama sekali. Pendidikan dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas perubahan. Sudah maklum, pada hakekatnya pendidikan adalah agen sebuah tradisi yang menjunjung tinggi nilai dan adat istiadat serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan pelik dan bukan berorientasi pada aspek kapitalisme dan kanibalisme intelektual. Jika memahami dan mengerti sejumlah permasalahan-permasalahan pendidikan, yang semakin hari semakin *complicated*, maka mencari bentuk penyelesaiannya bukanlah dengan berpijak pada kepentingan perorangan, institusi apalagi memihak pada orang atau golongan tertentu. Sebab jika demikian, sama

saja menyamakan pendidikan sebagai komoditas dagang. Sehingga terkesan, pendidikan menjadi arena perebutan dan sarana hegemoni untuk melanggengkan sistem kekuasaan, ideologi dan berbagai macam "kepentingan". Meskipun tidak menutup mata, dalam perjalanan sejarah pendidikan, hal ini juga menjadi bagian dari fungsi pendidikan itu sendiri.

Persoalan serius yang segera dilakukan adalah mengembalikan segala persoalan yang berkembang di seputar pendidikan pada "ilmu dan filsafat" pendidikan, yang menjadi induk dari sebuah disiplin pendidikan itu sendiri. Karena sudah menjadi maklum, jika semua ilmu, termasuk ilmu pendidikan lahir dari induknya filsafat umum, meskipun sebagaimana penjelasan Made Pidarta (tt:82-83), ada konsep lain yang menyatakan bahwa ilmu lahir dari filsafat umum melalui perantara, yaitu filsafat ilmu-ilmu itu sendiri. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa kelahiran ilmu pendidikan pada awalnya dibantu oleh filsafat pendidikan, sampai pada akhirnya pendidikan melepaskan diri dari filsafat dan menimbulkan sejumlah persoalan-persoalan di bidang pendidikan.

Salah satu tujuan mengembalikan pendidikan pada induknya adalah dengan keperluan agar pendidikan dapat terlepas dari segala persoalan yang melilitnya dan mampu mengembangkan sejumlah teori-teori bagi pengembangan pendidikan, sehingga bisa menjadi sebuah disiplin ilmu yang "mapan". Selain itu, yang terpenting pendidikan mampu menawarkan sejumlah pemecahan secara bijaksana dan sesuai prosedur keilmuan pendidikan terkait isu-isu modernitas, seperti: kemanusiaan, lingkungan dan pembentukan sebuah peradaban yang lebih baik. Sebab, diyakini pendidikan adalah sebagai salah satu ilmu yang dapat merekayasa kemanusiaan dan strategi kebudayaan bagi membentuk manusia yang bermoral dan beradab. Dalam konteks ini, pendidikan bukan aktifitas dan proses yang sekedar memicu kecerdasan otak saja, tetapi sekaligus juga kecerdasan emosional dan spiritual bagi tumbuhnya kearifan sosial. Dengan demikian dapat diharapkan tumbuhnya manusia dan generasi baru bangsa yang semakin manusiawi, cerdas, arif dan waskitha (Mul Khan, 2002: 79). Karena pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengembangkan segala aspek pribadi dan

kemampuan. Dalam upaya pengembangan kemampuan, jalur yang harus ditempuh adalah pendidikan.

Relevan dengan kenyataan tersebut, berarti semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan harus memahami dua hal yang sangat terkait dan berke... yaitu antara teori dan praktik pendidikan. Meskipun dalam perjalanannya, banyak yang menafikan eksistensinya dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Karena banyak orang yang "terjebak", dalam praktisi pendidikan sementara yang lain terlelap pada setumpuk teori-teori pendidikan, tanpa mengetahui saling keterpautannya satu sama lain. Padahal yang disebut ilmu pendidikan menurut Imam Barnadib (2002: 41) pada hakikatnya terdiri dari dua sisi yang sangat erat kaitannya, bagaikan mata uang karena mempunyai dua sisi yang berbeda satu sama lain, yaitu teori pada satu sisi dan praktik pada sisi lain. Antara keduanya sebenarnya hanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.

Dengan begitu sudah sewajarnya kalau segera menggeser pandangan hakikat ilmu pendidikan hanya dalam prespektif estetis, sebagaimana hakikat dan

kegunaan ilmu-ilmu lain menuju pandangan bahwa ilmu pendidikan juga memiliki fungsi praktis yang dapat menjelaskan, meramal dan mengontrol persoalan-persoalan pendidikan. Dengan menggunakan asas dan prosedur ilmu pendidikan yang benar dapat memecahkan berbagai persoalan pendidikan dan pendidikan dapat berjalan secara efektif. Sebab pandangan estetis kepada ilmu pendidikan, hanya menyebabkan ilmu ini hanya menjadi sekumpulan teori dan konsep abstrak yang biasanya hanya dihapal dan ditulis oleh orang-orang yang ingin bergelar sarjana pendidikan serta memuaskan jiwa para pecinta pendidikan. Namun ironisnya ilmu pendidikan tidak akan pernah bertaji dan menjadi sebuah konsep untuk memecahkan masalah sehari-hari.

Padahal menempatkan ilmu dalam fungsi estetis seperti itu, seperti telah digambarkan oleh Jujun S. Suriasumantri (2007: 365) adalah berasal dari zaman Yunani Kuno, karena disebabkan oleh filsafat mereka yang memandang rendah pekerjaan praktis yang waktu itu dikerjakan oleh budak belian. Sekarang pun masih ada yang meremehkan para "pekerja kasar" dengan mengatakan "Jangan mau menjadi masinis atau pekerja

teknik, anaku, jadilah pegawai negeri, Asyik!". Akibatnya, pendidikan hanya memproduksi para pemalas, miskin kreatifitas, dan mengandalkan pekerjaan-pekerjaan "berdasi"/kantoran saja (meskipun harus berebut/antri dengan banyak orang). Pendidikan juga belum menyadarkan kepada peserta didik, bahwa banyak rejeki dan lapangan pekerjaan yang menjanjikan di luar menjadi seorang "pegawai".

Lebih lanjut, ketika membicarakan tentang ilmu pendidikan maka secara otomatis perlu dikaitkan dengan konsep pendidikan karena keduanya menyangkut masalah hakekat manusia yang menjelaskan kedudukan peserta didik dan pendidik dalam sebuah interaksi pendidikan. Hasil akhir mengenai jawaban tentang hakikat manusia pada dasarnya merupakan kinerja filsafat manusia. Sementara mengenai hakikat pendidikan adalah tata kerja filsafat pendidikan dan keterkaitan keduanya melahirkan sebuah ilmu pendidikan. Sebab jika pengetahuan tentang hakikat manusia telah diketahui dan dirumuskan secara jelas, maka pengembangan terhadap hakekat manusia itu memerlukan pendidikan (Dardiri, 2008: 12) dan agar

sebuah proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia maka memerlukan sebuah ilmu khusus yang disebut ilmu pendidikan. Jika digambarkan interkoneksi antara filsafat pendidikan, filsafat manusia dan ilmu pendidikan adalah sebagai berikut:

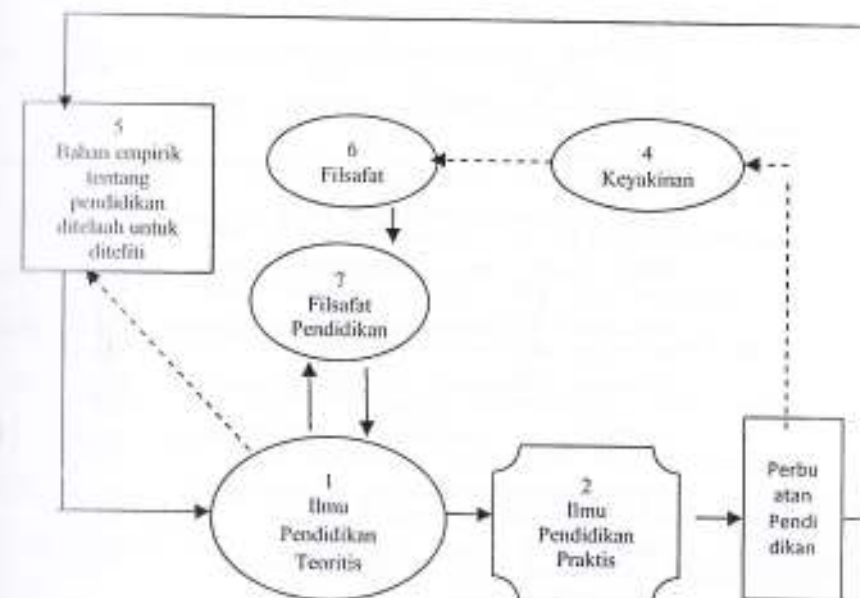


Gambar: Interkoneksi Ilmu Pendidikan, Filsafat Pendidikan dan Filsafat Manusia

Itulah bukti keterkaitan yang sangat erat antara filsafat pendidikan, filsafat manusia dan ilmu pendidikan. Operasionalisasi dari ketiganya dalam dunia

pendidikan, dengan begitu tentu saja dengan tidak melupakan khasanah filsafat pendidikan yang diturunkan dari filsafat tertentu, dimana pemilihan unsur-unsur serta bagaimana penerapannya tergantung pada keyakinan ahli ilmu pendidikan yang bersangkutan. Keyakinan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sebelumnya. Kumpulan kegiatan pendidikan yang ada ditelaah (melalui penelitian atau refleksi filosofiah) dapat memberi sumbangan pada perkembangan ilmu pendidikan. Kemudian ilmu pendidikan yang telah mapan pun dalam pengembangan dirinya juga memberikan tafsiran tertentu kepada bahan yang diperoleh dari pengalaman perbuatan mendidik. Jadi ilmu pendidikan sebenarnya dapat memperkaya dan mengembangkan filsafat pendidikan yang mendasari pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri (Satmoko, 1999: 42).

Ketujuh unsur tersebut melukiskan sebuah hubungan fungsional sebagai berikut:



Gambar: Kedudukan dan Hubungan Unsur-unsur Ilmu Pendidikan (Satmoko, 1999: 43)

Dari gambar tersebut nampak sekali keterkaitan antara beberapa unsur ilmu pendidikan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Antara ilmu pendidikan teoritis dan ilmu pendidikan praktis mendasari sebuah perbuatan pendidikan, yang dapat mempengaruhi keyakinan seseorang dan dapat menjadi bahan empirik yang berguna untuk pengembangan ilmu pendidikan itu

sendiri. Sementara filsafat yang berdasarkan keyakinan tadi diterapkan menjadi filsafat pendidikan, yang mendasari pemikiran ilmu pendidikan teoritis maupun praktis. Jadi, gambar tersebut sekaligus menjelaskan perlunya dunia pendidikan di kembangkan melalui dua jenis penelitian sekaligus yang sangat berhubungan satu sama lain, yaitu *theoretical research* dan *applied research*. Berdasarkan gambar tersebut dimungkinkan mencari bangunan konsep pendidikan yang kuat dan memiliki landasan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional ilmiah. Konsep pendidikan yang diturunkan dari pemikiran atas realitas/fakta-fakta pendidikan yang ditemukan (ontologi) dan selalu diselidiki, dihimpun untuk dibangun secara rasional menjadi kebenaran ilmu pendidikan (epistimologi) serta kebenaran yang telah ditemukan berdasarkan fakta tersebut kemudian diselaraskan dengan kebutuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Intinya pengembangan suatu ilmu pendidikan harus bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan bukan menguntungkan penguasa saja.

Fakta bahwa penelitian yang sesuai dengan spektrum penelitian pendidikan merupakan hal penting dan menjadi tak terelakkan. Sebab, penelitian menjadi jembatan evaluasi yang dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam pendidikan. Selain memang hakikat pendidikan itu selalu berkembang seiring dengan banyak aspek yang memengaruhinya, maka penelitian ilmiah hadir sebagai *oase* pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dunia pendidikan yang berdiri dengan para aktivis maupun *stakeholder* yang begitu kompleks sarat akan permasalahan-permasalahan yang kompleks pula. Salah satu tantangan utama sektor riset dan teknologi di Indonesia saat ini adalah minimnya tingkat adopsi hasil riset oleh berbagai stakeholder di Indonesia. Sehingga kontribusi sektor riset dan teknologi terhadap perekonomian nasional masih sangat kecil.

Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan ilmu pendidikan di Indonesia, pengembangan pendidikan sudah seharusnya terjadi dalam rangka akselerasi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai fakta yang tak terbantahkan dalam

masyarakat modern sekarang. Tapi semua itu harus sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan keyakinan/ideologi yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.

B. Geneologi Ilmu Pendidikan

Apakah ilmu itu objektif dan bebas nilai? Tentang persoalan ini telah terjadi dua pertentangan antara mazhab positivistis dan ideologis. Positivistis mengakui bahwa ilmu itu bebas nilai dan obyektif, sebab ilmu sendiri merupakan penjalinan penalaran yang seluruhnya obyektif dan bebas nilai. Akan tetapi bagi ideologis, ilmu itu tidak obyektif dan bebas nilai, sebab para ahli ilmu biasanya dipengaruhi oleh keadaan psikis, politik, dan sosial, bahkan baik sekali kalau memperhatikan akan nilai sosial dan susila. Oleh sebab itu, ilmu itu harus bertopang pada sebuah ideologi yang tidak hanya mendorong perkembangan ilmu, cara berfikir yang sedang berlaku dan menjadi alat perkembangan dan kemajuan peradaban manusia (Peursen, 1985: 4).

Pendidikan menjadi sebuah disiplin ilmu tentu saja berpautan erat dengan ideologi tertentu yang ingin

diperjuangkan oleh manusia demi kemanusiaan dan peradaban. Sebab manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak pernah puas begitu saja mengenai apa yang diketahuinya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dengan akal yang dimilikinya, manusia terus mempertanyakan segala sesuatu yang ada disekitarnya dan berusaha memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Begitu pula tentang persoalan bagaimana mendidik manusia agar menjadi masyarakat yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya demi kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka, manusia secara terus menerus berfikir secara serius dan mendalam untuk melahirkan ilmu pendidikan yang efektif dan praktis.

Dari situlah terjadi persinggungan yang saling mengikat dan saling mempengaruhi antara ilmu pendidikan dan filsafat pendidikan. Tak salah jika John Dewey dalam bukunya *Democracy and Education*, menyatakan bahwa filsafat itu teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan (Dewey, 1946: 383). Dengan berdasar pada pandangan John Dewey ini, maka lahirlah filsafat

pendidikan sebagai ilmu. Sebuah sistem yang menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis pula (Barnadib, 1994: 17).

Dalam ilmu filsafat, filsafat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Yang membedakan dari filsafat umum dan khusus adalah mengenai objeknya, filsafat umum lebih pada kenyataan keseluruhan segala sesuatu sedangkan filsafat khusus lebih pada kenyataan salah satu aspek dari kehidupan manusia yang penting. Apabila dilihat dari sudut karakteristik objeknya, maka filsafat Pendidikan termasuk dalam filsafat khusus. Filsafat ilmu pendidikan sendiri merupakan bagian dari Filsafat pendidikan. Istilah Filsafat ilmu pendidikan (*Philosophy of Educational Science*) ditemukan dalam karangan B. Othanel Smith dan secara konsepsional, Filsafat ilmu pendidikan dapat dibataskan sebagai analisis kritis komprehensif tentang pendidikan sebagai salah satu bentuk teori pendidikan yang dihasilkan melalui riset, baik kuantitatif maupun kualitatif (Redja, 1976: 6).

Dalam prespektif sejarah, pendidikan menjadi sebuah ilmu atas sebuah pandangan yang berasal dari Eropa Barat, khususnya Belanda dengan ahli pendidikannya bernama Langeveld. Di negeri ini, pendidikan secara resmi diakui sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan pada tahun 1925 (Pidarta, tt.: 6).

Hal tersebut tentu saja sebagai sebuah proses yang wajar, karena setiap manusia mempunyai sejumlah pengetahuan tentang suatu objek tertentu (dalam hal ini pendidikan), termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi ilmu pendidikan merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia. Pengetahuan, menurut Jujun S. Suriasumantri (2007), biasanya dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab persoalan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia, dan digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan kepadanya.

Disebut pendidikan sebagai ilmu berarti sudah membedakan dengan pengertian pendidikan secara umum dan teori pendidikan, meskipun dalam kenyataannya kemudian menjadi sebuah sistem yang menyatu atau integratif. Makna pendidikan dalam hal

ini, sudah dicirikan dengan ciri-ciri tertentu sebagai sebuah ilmu pengetahuan yaitu mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi) dan untuk apa (aksiologi) (Tadjab, 1994: 9), dan strategi pengembangan ilmu (Wibisono, 1996: 12).

Dengan kata lain, Ontologi Ilmu pend... (substansi dan pola organisasi Ilmu pendidikan), Epistemologi Ilmu Pendidikan (objek formal dan material Ilmu Pendidikan), Metodologi Ilmu pendidikan (cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan), Aksiologi Ilmu Pendidikan (nilai kegunaan teoritis dan praktis Ilmu pendidikan) (Redja, 1976: 6-7). Selain itu ilmu pendidikan perlu terus diupayakan pembaharuannya agar senantiasa relevan dengan perkembangan masyarakat.

Di samping itu, setiap disiplin ilmu, minimal harus memenuhi empat syarat pokok yaitu (1). Harus mempunyai objek atau sasaran yang jelas (2). Harus mempunyai metode atau cara penelitian yang tersendiri dan jelas, yang menunjukkan bagaimana cara kerja dan proses penelitian terhadap obyeknya berlangsung; dan (3) harus mempunyai ruang lingkup dan sistematika

yang jelas pula dan yang (4) mempunyai kegunaan dan manfaat, atau tujuan yang jelas (Tadjab, 1994: 9). Noeng Muhadjir juga menegaskan bahwa suatu kawasan studi bisa dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu, jika memenuhi tiga syarat yaitu; 1). memiliki obyek studi yang eksplisit dari disiplin lain, 2) memiliki struktur atau sistematika yang juga eksplisit dari disiplin lain yang dikembangkan terus secara kritis, dan 3) memiliki metodologi pengembangan, yang lebih menekankan pada upaya pemaknaan (Muhadjir, 2000: 20). Sedangkan memperhatikan syarat-syarat tersebut, sebagaimana penjelasan Made Pidarta (tt.: 6) pendidikan juga telah memenuhi syarat dapat disebut sebagai ilmu yaitu 1). Memiliki objek 2). Metode penyelidikan 3). Sistematis 4). Punya tujuan sendiri.

Secara hakiki objek pendidikan adalah situasi pergaulan pendidikan. Objek pendidikan dapat terperinci menjadi beberapa bagian, yaitu 1) relasi/hubungan antara orang dewasa dan orang belum dewasa, 2) alat pergaulan dan pendidikan, 3) iklim pergaulan dan lingkungan, 4) orang yang belum dewasa, 5) orang dewasa, dan 6) tujuan pendidikan (Komar, 2007: 124).

Sementara objek pendidikan ada dua macam, yaitu objek materi dan objek formal. Yang dimaksud dengan objek materi adalah materinya atau bendanya yang dikenai pendidikan yaitu para peserta didik dan warga belajar. Objek materi pendidikan ini merupakan objek material atau aspek-aspek atau hal-hal yang menjadi garapan langsung riset pendidikan (Redja, 1976: 45). Sedangkan objek formalnya adalah apa yang dibentuk (*to form*) oleh pendidikan. objek pendidikan seperti yang disepakai oleh Langveld dan Dwiyakarya ialah gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan manusia sehari-hari (Pidarta, tt.: 6). Objek formal ini menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan riset pendidikan (Redja, 1976: 45).

Karena ilmu pendidikan dianggap sebagai filsafat khusus, maka filsafat ilmu pendidikan merupakan bagian dari filsafat pendidikan yang sama-sama menyelidiki pendidikan sebagai ilmu. Ilmu Pendidikan sendiri merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Bentuk isi Ilmu Pendidikan, seperti juga ilmu pada umumnya yang terdiri atas: 1. Generalisasi-generalisasi (kesimpulan

umum yang ditarik berdasarkan hal-hal khusus) 2. Hukum-hukum atau prinsip (terbagi menjadi 3 yaitu: hukum akibat, hukum latihan, hukum kesiapan) 3. Teori (dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: a. teori induk dan model-model teoretis yang berhubungan, b. Teori formal dan tingkat menengah, c. teori substansif). Fungsi-fungsi Ilmu Pendidikan mempunyai 2 fungsi, pertama, sebagai asumsi dasar atau titik tolak, dan yang kedua, informasi tentang pendidikan. Ilmu pendidikan sendiri bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan penerapan dari cabang-cabang ilmu lainnya. Dalam studi pendidikan mencakup 4 macam, diantaranya (1) sejarah pendidikan (2) Ilmu pendidikan (3) praktek pendidikan (4) filsafat pendidikan (Redja, 1976: 39).

Sementara Sutari Imam Barnadib melihat Ilmu Pendidikan adalah sebagai ilmu yang normatif karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang tidak baik untuk anak khususnya dan manusia pada umumnya. Ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan rohani, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak memberikan anak kepada keadaan alamnya,

melainkan memandangnya sebagai makhluk sosial dan akan dibawa ke arah manusia susila yang berbudaya (Barnadib, 1992: 12). Pengertian seperti ini menjelaskan bahwa penekanan pendidikan bukan hanya ditujukan pada pengembangan intelektual dan rasional saja, akan tetapi pada intinya adalah pengisian jiwa yang ada dalam hati, sehingga manusia tersebut dapat berpikir dengan didasari jiwa yang bersih. Adapun penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan manusia-manusia seperti ini bisa dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan yaitu; 1) Pendidikan formal yaitu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan secara sistematis, terencana dan terarah. 2) Pendidikan informal yaitu pendidikan dari lingkungan keluarga. 3) Pendidikan nonformal yaitu proses dari lingkungan masyarakat.

C. Struktur Ilmu

Ilmu itu bagaikan bangunan tersusun dari batu bata. Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung didapat di alam sekitar. Lewat observasi ilmiah batu-batu sudah dikerjakan sehingga dapat dipakai,

kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu, sehingga dapat dipergunakan (Peursen, 1985: 28).

Bangunan suatu ilmu, menurut C. A. Van Peursen (1985: 33-36), harus terikat oleh sebuah teori dan definisi. Definisi inilah yang akan membatasi sebuah istilah dan pengertian. Definisi ilmu menyajikan susunan hirarki sebagai berikut; 1) lapisan definisi ilmiah merupakan definisi deskriptif, yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai gejala. 2) definisi stipulatif yang mengandung arti tertentu yang diberikan kepada suatu istilah, 3) definisi operasional, biasanya berupa istilah-istilah yang lebih dekat pada puncak suatu ilmu, 4) definisi teoritis, yang membatasi isi pengertian atau arti, yang berperan sebagai pencangkup ilmu

Selain itu, terdapat prasyarat sesuatu itu masuk pada katagori ilmu, sebagaimana penjelasan Kunto Wibisono (dalam Thoha, dkk., 1996: 10-12), yaitu:

1. Ontologi

Ontologi meliputi permasalahan apa hakekat ilmu itu, apa hakekat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan, yang tidak terlepas dari persepsi kita tentang apa dan bagaimana (yang) ada. Karena *the*

being (kebenaran yang ada), menjadi masalah dalam ontologi, maka mazhab filosofis sangat menentukan pandangan seseorang tentang kebenaran sebuah ilmu pengetahuan.

Terdapat berbagai mazhab dalam filsafat, yaitu; *pertama*, naturalisme yang menyakini kebenaran sesungguhnya adalah sesuatu yang fisik. *Kedua*, idealisme yang menyakini kenyataan itu terdiri dari ide-ide atau *spirit*. *Ketiga*, realisme yang berpandangan kenyataan itu tidak sepenuhnya bergantung dari jiwa yang mengetahui, tetapi hasil pertemuan dengan obyeknya. *Keempat*, pragmatisme yang berpandangan kebenaran itu tergantung kepada nilai kegunaannya.

2. Epistemologi

Epistemologi sering disebut dengan filsafat pengetahuan. Epistemologi berusaha mencari kebenaran ilmu berdasarkan fakta, dibangun dengan logika dan didahului uji konfirmasi tentang data yang dihimpun (Muhadjir, 2011: 63). Oleh sebab itu, karakter epistemologi itu membuktikan kebenaran dalam makna *the truth or false*. Dalam proses mencari ilmu pengetahuan ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh

manusia. Sebab manusia secara kodrati mempunyai potensi untuk berpengetahuan, mengolah dan mengembangkannya. Dalam mencari pengetahuan dan kebenaran, manusia dapat memperoleh melalui berbagai sumber, yaitu wahyu, intuitif, rasional, empiris (Rasyidin, dkk., 2007). Dalam mencari ilmu dan sumber ilmu yang dipakai, memang telah menunjukkan sikap yang berlawanan antara Barat dan Timur.

Barat cenderung menekankan pada dunia obyektif, empiris dan deskriptif yang disampaikan menurut peraturan logika dan pemeriksaan ilmiah. Sementara Timur lebih pada *knowledge by acquaintance* dan lebih bersedia untuk menerima pengalaman dan kesaksian orang-orang terdahulu, sejarah dan intuisi yang menurutnya lebih dapat dipercaya (Titus, dkk., 1984: 208-209). Meskipun sebenarnya, dalam realitasnya sumber-sumber ilmu pengetahuan pada hakikatnya saling melengkapi dan tidak bertentangan dalam usaha mencari kebenaran.

Memperoleh pengetahuan dapat melalui berbagai sumber dan cara/metode yang bisa ditempuh, yaitu; 1) dengan cara sadar dan terarah menempuh cara untuk

menguasai, mengubah objek, dengan melakukan langkah-langkah sistemik menuju temuan-temuan baru. Tradisi ini pertama kali diiniasi oleh orang Yunani Kuno kemudian dikembangkan oleh Barat dan para filsuf Arab seperti Al Kindi, Al Farabi, Al Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, mempunyai saham besar dalam pengembangan tradisi pemikiran Yunani ini. 2) dengan mengcover objek sasarannya dengan mendeskripsikan yang ideal (nilai seni, sastra, metodologi, dengan bobot muatan etik, moral, agama). Dunia timur juga nenek moyang kita sangat kaya dengan filsafat kehidupan. 3) dengan menjauhkan diri secara rohaniyah atau badaniah, dari objek sasaran yang hendak diketahui agar memperoleh wangsit atau sebagai jalan menuju objek sasaran yang hendak diketahui.

3. Aksiologi

Aksiologi merupakan filsafat yang membahas nilai, baik itu berhubungan dengan etika maupun estetika. Aksiologi sering membicarakan kebenaran dalam makna benar salahnya (*the right or wrong*). Aksiologi merupakan parameter kebenaran yang akan menuntun dengan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan

pegangan dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu, menyangkut etik dan heuristik bahkan sampai dimensi kebudayaan, kemanfaatan ilmu, dan maknanya bagi kehidupan manusia.

D. Karakteristik Ilmu Pendidikan

Pendidikan merupakan proses membimbing yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan selalu berhubungan dengan manusia dan sengaja dirancang untuk menumbuhkan sikap-sikap kemanusiaan. Selain berorientasi untuk menjadikan manusia-manusia cerdas, mandiri, dan berdikari juga berusaha membentuk manusia yang mempunyai ketinggian spiritualitas serta berkarakter mulia. Praksis pendidikan biasanya, di samping mentransmisikan berbagai ilmu, skill, juga membiasakan kebiasaan-kebiasaan terpuji supaya anak menjadi pribadi yang *salih* yaitu memiliki tanggungjawab sebagai hamba Tuhan dan mempunyai kepekaan personal sebagai bagian dari masyarakat sosial.

Terdapat persepsi yang salah kaprah di masyarakat selama ini, yang acapkali mengartikan pendidikan sebagai sesuatu yang hanya bertali-temali dengan *transfer of knoweledge* dan arena indoktrinasi. Padahal lebih dari itu, dalam prespektif ilmu pendidikan sejatinya pendidikan tidak hanya sebagai sarana *transfer of knoweledge* saja melainkan sebagai media dan aktifitas membangun keadaran, kedewasaan, dan kemandirian peserta didiknya. Bahkan pendidikan juga ditujukan untuk menciptakan mentalitas dan kultur demokrasi suatu masyarakat.

Proses melakukan bimbingan kepada anak dalam pendidikan tersebut, biasanya ada kalanya dilakukan secara tidak teratur dan dilakukan sendiri-sendiri oleh masyarakat atau orang tua karena dorongan *paedagogis instinct*. Sementara ada juga yang dilakukan secara teratur dan dirancang sedemikian rupa dengan mempersiapkan tujuan, kurikulum, metode, lingkungan dan evaluasinya. Untuk praksis pendidikan yang tidak teratur, biasanya dilakukan dengan mengandalkan kebiasaan/tradisi. Sementara pendidikan yang teratur bersandar pada pengetahuan yang dinamakan ilmu

pendidikan. Menurut Ki Hadjar Dewantara (2004: 27), ilmu pendidikan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Tetapi memerlukan ilmu-ilmu lainnya, yaitu 1). Ilmu Jiwa/*Psychologie*. 2) Ilmu Jasmani (*Fysiologie*). 3) Ilmu etika/moral. 4) Ilmu estetika. dan 5) Ikhtisar cara-cara pendidikan.

Ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif, karena ia terkait oleh norma-norma tertentu (Mujib & Mudzakkir, 2006: 1). Selain itu, Ilmu pendidikan juga tergolong ilmu yang bersifat *practical*, sebab ilmu pendidikan berguna menyelesaikan tugas untuk mengubah sikap dan perilaku orang/anak. Perbedaannya dengan ilmu lain adalah, kalau ilmu lain berusaha menjelaskan dan mengetahui apa dunia ini, sedangkan ilmu pendidikan membimbing kita agar menyelesaikan apa yang harus dilakukan dalam praktek pendidikan (Komar, 2007: 136). Ilmu pendidikan memberikan bimbingan bagi para pendidik untuk bisa bersikap secara tepat, professional, dan sekaligus bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendidikan.

Ilmu pendidikan mempunyai hubungan sangat erat dengan teori-teori pendidikan yang menurut P. H. Hirst, teori pendidikan berfungsi untuk membimbing praktek pendidikan. Sedangkan teori pendidikan itu sendiri memiliki aspek ilmiah dan aspek preskriptif (normatif) (Siswoyo, 2007: 65). Selain bersifat praktis dan normatif, ilmu pendidikan juga bersifat empiris (karena obyeknya fenomena/situasi pendidikan), rohaniah (memandang peserta didik sebagai makhluk susila dan berbudaya), historis (memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman dalam sinaran sejarah pada masa-masa tertentu), dan teoritis (memberikan pemikiran logis dan terstruktur tentang masalah-masalah pendidikan).

E. Struktur Ilmu Pendidikan

Disebabkan ilmu pendidikan bukan menjelaskan fenomena alam, melainkan merekomendasikan apa yang harus dilaksanakan dalam praksis pendidikan. Maka, ilmu pendidikan berada pada rumpun yang berbeda dengan disiplin ilmu. Maksudnya eksistensi ilmu pendidikan berada di luar rumpun disiplin ilmu. Validasi

ilmu pendidikan tergantung pada ada/tidaknya cukup bukti rumusan berbagai rekomendasi bagi praksis pendidikan (Komar, 2007: 134).

Selama ini, sungguh telah terjadi keraguan akan eksistensi pendidikan sebagai ilmu. Padahal pendidikan telah memehui syarat sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu, yaitu 1) memiliki objek material berupa perilaku manusia dan objek formalnya adalah menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan, 2) memiliki sistematika yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, melihat pendidikan sebagai upaya sadar, dan melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, 3) memiliki metode seperti metode normative, eksplanatori, teknologis, deskriptif-fenomenologis, hermeneutis, dan analisis kritis/filosofis (Siswoyo, 2007:68-72). Bahkan struktur ilmu pendidikan senantiasa mengalami perkembangan dan selaras dengan kepentingan manusia itu sendiri untuk tahu lebih jelas dan mendalam, dengan sebuah metode dan sistem tertentu.

Sedangkan struktur ilmu pendidikan adalah 1) bertolak dari lima unsur pendidikan yaitu; yang memberi

(pendidik), yang menerima (peserta didik), tujuan (cita-cita pendidikan), cara baik (metode), dan konteks positif (lingkungan). 2) bertolak dari empat komponen pokok pendidikan, yaitu kurikulum, subyek-didik, personifikasi pendidik dan konteks belajar-mengajar. 3) bertolak dari tiga fungsi pendidikan, yaitu pendidikan kreativitas, pendidikan moralitas, dan pendidikan produktivitas. Selain itu, terdapat empat klaster yang dapat membangun ilmu pendidikan yaitu; 1) klaster substansial subyek, yang dihimpun dari teori pendidikan, 2) klaster konteks sosial makro yang dibangun dari teori dan filsafat perubahan sosial, 3) klaster fungsional yang materinya dibangun dari pemikiran teknologik, dan 4) klaster instrumental yang dikonstruksikan dari materi sistem penyampaian, materi sistem pengelolaan, dan mekanisme pengembangan (Muhadjir, 2000: 27-29).

Kelima unsur pendidikan yang merupakan struktur keilmuan pendidikan, menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam pendidikan. Praksis pendidikan, tanpa menginginkan kelima unsur tersebut, bisa dikatakan bukan merupakan aktifitas pendidikan. Sebab, keberhasilan dan kegagalan pendidikan tergantung

kelima unsur tersebut. Adapun penjelasan kelima unsur yang merupakan struktur ilmu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidik

Pendidik atau sering disebut guru/teacher dalam pendidikan merupakan salah satu unsur penting. Keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat tergantung pendidiknya, maka menjadi seorang pendidik harus memenuhi berbagai syarat/kompetensi tertentu dan tidak boleh asal-asalan. Syarat bagi guru dengan berbagai kompetensi itulah yang disebut oleh Al-Ghazali, seorang filosof dan tokoh sufi dalam Islam yang menyanggah gelar *hujjatul Islam*—dengan istilah kriteria guru yang baik. Menurutnya, guru yang baik adalah guru yang dapat diserahi tugas mengajar. Mereka selain dituntut cerdas dan sempurna akalunya, juga harus baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akalunya ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh teladan bagi para muridnya, dan dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan tugas

mengajar, mendidik dan mengarahkan muridnya (Nata, 1995-96). Sedangkan menurut Az-Zarnuji (2011: 14), syarat seorang guru itu harus *alim, waro'* dan lebih tua usiannya/berwibawa.

Terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh Pendidik, yaitu:

- a. Memiliki sifat yang *zuhud*, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata.
- b. Seorang guru tidak boleh memiliki *riya* (mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela.
- c. Ikhlas dalam pekerjaan.
- d. Keikhlasan dan kejujuran dari seorang guru merupakan kunci dari suksesnya di dalam tugas dan kesuksesan untuk murid-muridnya.
- e. Seorang harus memiliki sifat pemaaf terhadap muridnya, ia juga harus sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, penyabar dan tidak boleh marah hanya karena sebab-sebab hal yang kecil.

f. Seorang guru harus menyayangi murid-muridnya seperti menyayangi anaknya sendiri, dan juga memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan keadaan anak-anaknya pula. Bahkan seorang guru harusnya lebih mencintai murid-muridnya daripada anaknya sendiri.

- g. Seorang guru harus mengetahui rabi'at, pembawaan, adat kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik murid-muridnya.
- h. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta memperdalam pengetahuannya, tentang itu sehingga mata pelajaran tersebut tidak bersifat dangkal (Al Abrasy, 1970: 131-134).

Berdasarkan syarat dan sifat-sifat menjadi guru tersebut, bisalah seorang guru dapat berhak menyandang sebutan guru berkompeten. Selain hal-hal yang telah disebut di atas, untuk menjadi guru berkompeten dan ideal, guru seharusnya dalam pribadinya melekat tiga hal. **Pertama**, memiliki kepribadian ideal, meminjam bahasa Ki Hajar Dewantoro, guru tersebut memang

mampu "*ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*". Semua sikap, perilaku dan pemikirannya dapat *digugu lan ditiru*. Terdapat beberapa kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi personal ini, di antaranya: (1) kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya; (2) kemampuan untuk menghormati dan menghargai antarumat beragama; (3) kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat; (4) mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru misalnya sopan santun dan tata karma dan; (5) bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.

Kompetensi pertama itulah yang sering kita sebut dengan istilah kompetensi kepribadian. Sebuah kompetensi yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seseorang guru. Kepribadian inilah yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Hal itu terjadi karena dalam pembelajaran merupakan pertemuan dan interaksi dari dua kepribadian

yang berbeda yaitu kepribadian guru dan siswa sebagai anak yang belum dewasa dan sedang berkembang mencari bentuk kedewasaan.

Kedua, memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang *subject matter (bidang studi)* yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti sempit, pengetahuan tentang teoritik, mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru profesional. "Mereka" adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya (Nata, : 15). Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah jabatan profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Demikian pun dengan profesi guru, harus ditempuh melalui jenjang pendidikan *pre service education* seperti Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau PGMI, IKIP dan Fakultas Keguruan di luar IKIP seperti Fakultas Tarbiyah untuk guru agama Islam.

Ketiga, Kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Menjadi seorang guru, dengan demikian selain harus smart dan cerdas serta profesional, juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap sosialnya dan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Adapun yang termasuk *social competency* adalah: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan; (3) kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun secara kelompok.

Ketiga aspek sebagaimana tersebut di atas haruslah menjadi prioritas bagi seseorang yang ingin mengabdikan hidupnya menjadi guru. Hal ini dengan suatu pertimbangan bahwa guru dengan kompetensi personal, profesional dan sosial yang diyakini mampu membawa pencerahan dan perbaikan bagi kondisi pendidikan di Indonesia. Profesionalitas guru, memang

sangat mendesak dipikirkan bagi pengembangan pendidikan Islam dan pendidikan secara umum di Negara ini, lebih-lebih dengan melihat kenyataan, bahwa masalah kompetensi dan profesionalitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar masih menghadapi permasalahan dan kritik dari berbagai pihak (Ma'arif, 2007: 40).

Guru adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, guru memegang peranan yang sangat strategis dalam inovasi pelaksanaan dan pengajaran di madrasah. Di kelas, guru adalah *key person* (pribadi kunci) yang memimpin dan mengarahkan kegiatan belajar-mengajar para siswanya. Di mata siswa, guru adalah seorang yang mempunyai otoritas bukan saja dalam bidang akademis, melainkan juga dalam bidang non akademis. Bahkan dalam masyarakat, guru dipandang sebagai orang yang harus di gugu dan ditiru. Pengaruh guru terhadap siswanya sangat besar. Faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati misalnya, memegang peranan penting dalam interaksi sosial.

Karena itulah, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berbicara tentang kompetensi guru adalah berbicara tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seorang tenaga pengajar serta penerapannya di dalam pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Standar kompetensi guru meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, wawasan kependidikan, kompetensi akademik atau bidang studi, pengembangan profesi, dan kemampuan kepribadian (Depdiknas, 2004 dan Suparno, 2001).

Sebagaimana penjelasan dari PP No. 19 tahun 2005, yang dimaksud dengan guru dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan demikian, seorang guru dikatakan profesional sebagaimana dinyatakan oleh Piet A. Sahertin (1994: 29-30) adalah seseorang yang memiliki makna ahli (*expert*), tanggung jawab (*responsibility*) baik tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral serta memiliki rasa kesejawatan.

Guru profesional merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar bagi peningkatan dan perbaikan kualitas pendidikan. Sebab seorang disebut profesional manakala ia memiliki keahlian (*expertise*) dan mempunyai kualifikasi personal yang bisa diwujudkan dalam bentuk kompetensi dan kemampuan yang didukung oleh kepemilikan pengetahuan, ketrampilan, kepribadian dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terukur, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta keberhasilannya.

Meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru di madrasah/sekolah sangat diperlukan. Tentu saja dengan suatu pertimbangan guru dalam pendidikan memainkan peranannya yang sangat vital bagi terciptanya pendidikan yang bermutu dan membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian atau dalam bahasa UNESCO (1996) seorang guru mampu *moulding the character and mind of young generation*. Dikatakan vital, sebab guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ibarat sebuah mata rantai, antara guru, peserta didik, tujuan pendidikan, alat dan milieu, semua terikat secara sinergik dalam membangun kualitas pendidikan secara totalitas. Akan tetapi, karena pendidikan dilakukan oleh dan kepada manusia, maka faktor manusia dalam hal ini guru menempati posisi sentral.

2. Peserta Didik

Terdapat beragam penyebutan untuk peserta didik, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *student* dan dalam bahasa Arab *tilmidhun*. Dalam istilah *tasawwuf* sering diistilahkan dengan *murid* dan *thalib*. Secara bahasa, *murid* berarti orang yang menghendaki dan *thalib* berarti orang yang sedang mencari (Mujib & Mudzakir, 2006: 104). Dalam tradisi pesantren peserta didik sering disebut santri. Karena seorang santri adalah seorang yang mencari ilmu kepada seorang kiai. Dalam ilmu pendidikan, santri/murid merupakan subjek penerima dan menjadi unsur dasar membentuk aktivitas pendidikan seperti guru/subjek pemberi (Muhadjir, 1994).

Sutari Imam Barnadib (1995) menjelaskan bahwa peserta didik sangat tergantung dan membutuhkan bantuan dari orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedewasaan. Sebagai anak, peserta didik masih dalam kondisi lemah, kurang berdaya, belum mandiri, dan serba kekurangan dibanding orang dewasa; namun dalam dirinya terdapat potensi bakat-bakat dan disposisi

luar biasa yang memungkinkan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan (Rohman, 2011: 96).

Agar peserta didik berhasil dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas/faqih, dan beradab serta yang terpenting dapat memperoleh ilmu yang baraka dikemudian hari. Maka terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik. Syaikh al-Zamzami (dalam al-Jufri, 1995: 25-28) telah menyebutkan beberapa syarat/tatacara santri dalam menuntut ilmu, yaitu:

1. Menghormati dan memuliakan ilmu dan guru
2. Memberi hadiah atau sesuatu sebagai tanda hormat dan sayang.
3. Seorang santri tidak diperkenankan berjalan di depan guru,
4. Tidak duduk ditempat guru,
5. Tidak memulai bicara ketika dihadapan guru,
6. Tidak banyak bicara dihadapan guru,
7. Mencari kerelaan hal guru, menjauhi hal-hal yang membuat guru murka, dan
8. Menghormati keluarga guru.

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital dalam ilmu pendidikan. Setiap sekolah/lembaga pendidikan perlu mempunyai tujuan yang jelas, hendak

dibawa ke mana peserta didiknya setelah lulus sekolah atau ingin diproduksi menjadi manusia seperti apa? Terkait pembuatan tujuan pendidikan ini, pada kenyataannya telah terjadi perdebatan di dunia pendidikan dan semua itu sangat berkaitan aliran filsafat apa yang mendasari pendidikan tersebut. Sebab, sebagaimana penjelasan Gerald Lee Gutek (1974), terdapat varian aliran filsafat pendidikan yang sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang diinginkan. Corak dan model pendidikan dengan begitu sangat tergantung pada tujuan pendidikannya.

Menurut aliran filsafat idealisme, tujuan pendidikan adalah membantu seorang pelajar untuk menjadi seorang yang baik. Maka, fungsi pendidikan lebih diorientasikan pada pembentukan akhlak atau karakter peserta didik. Sedangkan menurut aliran esensialisme, tujuan pendidikan adalah mentransmisikan unsur-unsur pokok kebudayaan manusia (*transmission of the basic elements of human culture*). Bagi aliran realisme, tujuan pendidikan adalah *transmitting bodies of knowledge and inquiry skills to students*. Sementara bagi aliran perenialisme, pendidikan bertujuan untuk

mengeluarkan sifat-sifat dasar/alami manusia, sehingga manusia mampu menemukan sifat-sifat kemanusiaan yang terdapat dalam dirinya (Gutek, 1974).

Meskipun terdapat berbagai macam tujuan pendidikan berdasarkan aliran filsafat masing-masing tersebut. Terdapat tujuan umum mengenai pendidikan yang disampaikan oleh beberapa ahli dengan mempertimbangkan implementasi dan implikasinya sekaligus. Tujuan pendidikan adalah untuk membawa setiap individu manusia, melewati latihan dengan kebiasaan yang baik dan hidup dalam lingkungan sosial yang baik pula, untuk kebaikan moral, dan untuk berkembang dalam beberapa kapasitas untuk memiliki perilaku yang baik untuk diri sendiri dan kebaikan orang lain (Aldrich, 1982: 28-29).

4. Metode

Metode dalam pembelajaran sangat penting. Sebab tujuan penggunaan metode adalah untuk memperoleh efektifitas dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagai apapun materi/kurikulum yang didesain, tidak akan memberikan dampak kepada perkembangan anak

didik, bila tidak disertai dengan metode yang baik (Ma'arif, 2009: 6). Oleh sebab itu, tidak salah jika ada pepetah arab yang mengatakan *al-Thariqah ahammu min al-maddah* (metode itu lebih penting daripada materi). Sedangkan pengertian dari metode yang baik itu adalah metode pembelajaran yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut (Mastuhu, 2003: 107).

Untuk mengantisipasi dan merespon tuntutan perubahan paradigma metodologi pembelajaran di sekolah, para guru sebaiknya di beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan inovasi pembelajaran. Dan masing-masing guru dengan penuh antusias sering melakukan *sharing* dan tukar pendapat tentang bagaimana dapat mentransfer *knowledge* dan *value* kepada peserta didik seefektif mungkin. Lebih baik lagi, jika metode yang digunakan itu selaras dengan karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini diperlukan dengan suatu orientasi untuk meningkatkan kemampuan kerja guru dalam pengelolaan kelas di sekolah. Sebab kemampuan manajerial guru di sini dalam proses belajar mengajar sangat diprioritaskan, agar mereka dapat

mengatur kondisi lingkungan belajar di kelas yang berhubungan dengan efektifitas pembelajaran.

Dalam implementasi metode yang dikembangkan dalam pembelajaran adalah para guru perlu menciptakan proses belajar mengajar yang benar-benar bermakna (*making the meaning*) dan bersifat *Active Learning*. Apalagi, proses pembelajaran di kelas harus menggunakan metode dan pendekatan aktif, kreatif dan menyenangkan adalah seperti yang diamanahkan oleh UU. No. 20/2003: Sisdiknas, pasal 4, ayat 4. Selain itu, juga dalam PP. 19/2005: Standar Nasional Pendidikan, Ps. 19, ayat 1, yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif (Ma'arif, 2009: 11). Setiap Guru berusaha semaksimal mungkin menghidupkan suasana di dalam kelas seperti kehidupan nyata. Hubungan mereka dengan para peserta didik bersifat *friendshiply*, sehingga kedekatan dan kehangatan diantara mereka dapat berlangsung.

Alasan mendasar kenapa para guru mengajar dengan *Actif Learning* adalah bahwa ketika kegiatan belajar yang bersifat pasif, siswa pasti mengikuti pelajaran tanpa rasa keingintahuan, tanpa mengajukan pertanyaan dan tanpa minat. Hasilnya pun tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Lain halnya ketika kegiatan belajar yang bersifat aktif, siswa akan berusaha mendapatkan sesuatu dari apa yang dia pelajari. Selain itu kalau proses belajar mengajar di kelas masih monoton, guru sebagai actor sentral, akibatnya siswa banyak yang mengantuk, pasif dan tidak paham apa yang disampaikan guru. Menurut porsinya yang benar pembelajaran seharusnya memuat tiga ranah, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik. Untuk dapat mengembangkan ketiga ranah tersebut secara seimbang sangat diperlukan kreatifitas guru dalam proses belajar mengajar.

Prinsip penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap guru adalah suatu pandangan bahwa peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia

dan di akherat kelak (Mujib dan Mudzakir, 2006: 103). Peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Implikasi konsep seperti itu dalam pendidikan adalah bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo, serta irama perkembangan peserta didik. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia atau periode perkembangannya, karena usia itu dapat menentukan tingkat pengetahuan intelektual, emosi, bakat minat peserta didik baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, maupun deduktis (Mujib dan Mudzakir, 2006: 106).

Untuk memperoleh cara atau metode yang efektif dalam pembelajaran memang tidak mudah. Namun guru perlu selalu didorong untuk selalu meningkatkan kemampuan mengajarnya seperti; mengikuti seminar, *training* dan *workshop* di bidang metodologi pembelajaran yang efektif, di samping menganjurkan mereka untuk memahami psikologi anak. Pentingnya penekanan dalam metodologi ini, karena dengan suatu pertimbangan metodologi pembelajaran adalah suatu

cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif, dan efisien sesuai yang diharapkan.

5. Lingkungan Pendidikan

Selain beberapa faktor pendidikan yang harus diperhatikan seperti telah disebutkan di atas. Terdapat satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan dalam pendidikan, yaitu pentingnya menyediakan lingkungan pendidikan. Lingkungan yang kondusif dalam pendidikan, memungkinkan memekarkan potensi dan kreativitas anak.

Sebuah lingkungan pendidikan bisa dikategorikan baik, manakala peserta didik merasa nyaman, *kerasan dan feel at home* serta memberi kesempatan pada mereka banyak gerak dan memungkinkan mereka berfikir kritis, memberi ruang untuk selalu bertanya (*curiosity*), mendiskusikan, dan mengeksplorasi setiap persoalan untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan.

John I. Goodlad, dalam bukunya *A Place Called School Prospect For the Future* (1984), telah

menyatakan bahwa, paling tidak terdapat tiga hal untuk mengkatagori sekolah itu efektif. *Pertama*, sekolah itu merefleksikan kebudayaan umat manusia sepanjang zaman. *Kedua*, sekolah itu mempersiapkan anak muda menjalani kehidupan kerja dan manusia dewasa yang bertanggung jawab. *Ketiga*, sekolah harus mensosialisasikan dan menanamkan norma, nilai dan kebudayaan yang telah menjadi kepercayaan masyarakatnya.

Biasanya sekolah efektif telah merancang sedemikian rupa melalui tujuan, kurikulum, metode, dan kebudayaan untuk menumbuhkan semua kecerdasan yang dimiliki anak. Baik itu menyangkut kecerdasan intelektual, kecakapan (*skill*), minat, kedalaman spiritual, dan membentuk karakternya sebagai individu yang dapat dijadikan sebagai bekal menjalankan perannya ketika dewasa kelak.

Sekolah yang baik pasti telah mempersiapkan sebuah lingkungan yang bisa dijadikan sebagai wahana inkulturisasi secara total pada anak. Bahkan menyediakan pembiasaan yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Jadi, seorang anak ketika masuk

dalam lingkungan sekolah secara otomatis bisa melakukan proses belajar, seperti meniru dan mencontoh karakter yang baik. Tidak ditemukan lagi, lingkungan sekolah yang menakutkan apalagi melakukan tindakan kekerasan pada anak. Melainkan anak-anak bisa menyaksikan keramahan dan kehangatan para guru. Bahkan para guru juga perlu mentransformasikan tugas dan fungsinya, yang tidak sekedar mengajar ilmu pengetahuan pada siswa. Melainkan harus bisa menjadi seorang teman dan pendamping dalam mencari kebenaran.

Praxis pendidikan yang diterapkan oleh sekolah efektif telah menggunakan pendekatan cermat dengan suatu orientasi menjadi sekolah kebanggaan masyarakat. Dari perspektif tujuan dan kurikulumnya telah didesain mempersiapkan anak mampu berfikir kritis, objektif, dan berkepribadian sebagai bangsa Indonesia. Yaitu sekolah yang mempersiapkan anak menjadi bangsa yang bertalian erat dengan Pancasila sebagai identitas lokal di tengah gempuran budaya global.

Selain itu, sekolah sebagai *kawah condrodimuko* buat para siswa harus memberikan banyak pengalaman

dan kesadaran akan arti pentingnya menjadi manusia yang mulia. Terutama sekolah efektif tidak mencari dan sekedar menampung siswa sebanyak-banyaknya. Melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh mempersiapkan para siswa menjadi lulusan yang tidak sekedar menggondol ijazah. Tetapi menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan berbudi pekerti luhur serta memiliki kepekaan terhadap realitas masyarakat di sekitarnya.

Teori-Teori Pendidikan

Teori dan praktik dalam ilmu pendidikan merupakan dua hal yang sangat berkaitan satu sama lain bagaikan dua sisi mata uang. Teori tanpa praktik atau sebaliknya adalah kegagalan (Barnadib, 2002: 43). Praktik pendidikan yang baik harus berdasarkan pada teori pendidikan. Praktik pendidikan yang tidak didasarkan pada teori pendidikan, bagaikan membangun rumah tanpa fondasi. Sebab teori pendidikan adalah fondasi dan menjadi latar belakang praktik pendidikan.

Fondasi pendidikan merupakan *conditio sine qua non* dalam pendidikan. Praktik pendidikan yang

memiliki fondasi, maka pendidikan akan semakin dilingkupi oleh nilai-nilai, memberi penguatan pendidik untuk bertindak secara tepat dan mempercepat dalam merealisasikan makna dan pendidikan. Begitu pula sebaliknya, tanpa pendidikan sebuah praktik pendidikan akan berjalan tanpa arah dan mudah melenceng dari tujuan pendidikan yang semestinya.

Pendidikan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung masih sering menggunakan teori-teori yang berasal dari luar yang bersifat universal. Retno Sriningsih Satmoko (1999: 47-48) menyebutkan bahwa teori-teori pendidikan yang sering digunakan tersebut, sebagaimana kesimpulan yang diberikan (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) adalah: 1) Pendidikan naturalistik dengan tokohnya J.J. Rousseau yang terkenal dengan semboyannya "kembali ke alam"; 2) Teori Pestalozzi, Montessori, Decroly dan Froebel; 3) Teori Fenomenologis dari M.J. Langeveld; 4) Pragmatis-instrumentalistik dengan tokohnya John Dewey; 5) Teori Behavioristik; 6) Teori Humanistik.

Membangun pendidikan dengan mendasarkan pada teori-teori pendidikan tersebut, tidak salah sebab teori-teori tersebut sudah teruji dalam mengantarkan perkembangan manusia di berbagai negara dengan segala kekurangannya, tentu saja. Namun rasanya kurang lengkap manakala praktik pendidikan di Indonesia hanya didasarkan pada teori-teori tersebut yang kesemuanya lahir dan tersinspirasi oleh kenyataan atau hasil penelitian dalam konteks kebudayaan "asing". Oleh sebab itu, lebih tepatnya perlu mengambil berbagai teori pendidikan yang ada secara eklektik, dan dengan tidak melupakan berbagai teori pendidikan yang dilahirkan oleh anak bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja, teori pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara, Driyarkara, Sikoen Pribadi, Raka Joni, dan teori pendidikan yang dikembangkan oleh kiai-kiai pesantren yang telah terbukti banyak memberi kontribusi bagi bangsa Indonesia dari sebelum dan sesudah kemerdekaannya.

Menyebut contoh kiai pesantren yang berjasa pada Islam nusantara adalah KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) dan KH. Ahmad Dahlan (pendiri ormas Muhammadiyah).

Muhammadiyah. Menariknya sebagaimana Malik Fadjar (1998: 18), kedua ormas ini tidak eksplisit menyebutkan Islam sebagai bagian namanya. Namun semua orang tahu bahwa berstatus sebagai organisasi beraqidah Islam. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga masyarakat utama, adil makmur, dan diridho SWT. sedangkan tujuan NU adalah berlakunya Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama'ah mengikuti salah satu mazhab empat di tengah kehidupan, di dalam wadah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945.

Haruslah dicatat pula bahwa para kiai telah bersusah payah dan telah mengorbankan hal demi berdirinya negara Indonesia ini. Mereka hanya menghabiskan waktunya di pesantren mengajar para santri dan masyarakat dengan tekad khas pesantren dan terbukti telah membawa pelepasan dan pencerahan bagi masyarakat. Bahkan sebagai pejuang, para kiai juga mengangkat senjata

mengusir para penjajah di bumi pertiwi ini. Selain itu juga melakukan upaya batin dan harus berdebat panjang dengan elemen-elemen lain dalam rangka ikut merumuskan, dasar, asas dan ideologi negara Indonesia sehingga akhirnya bisa berdiri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat sampai hari ini.

Oleh karena itu dalam kerangka membangun sistem pendidikan nusantara, di samping memakai/meminjam teori-teori yang dikembangkan Negara asing juga harus mempertimbangkan teori-teori pendidikan yang digunakan oleh para kiai pesantren. Langkah adopsi berbagai teori pendidikan seperti itu, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan teori yang diperkenalkan Ki Hadjar Dewantara yang terkenal dengan sebutan "asas trikon" yaitu; *pertama*, tetap mempertahankan identitas kebudayaan sendiri (kontinu). *Kedua*, dalam menerima kebudayaan asing tersebut harus berpusat pada kebudayaan Indonesia (konsentris). *Ketiga*, dalam melakukan perbaduan kebudayaan Indonesia dengan berbagai kebudayaan bangsa lain harus menjadi kebudayaan umat manusia (konvergensi) (Dewantara, 2004: 227-228). Dengan menerapkan teori

ini, harapan mengembalikan jatidiri bangsa pendidikan yang mempunyai corak pendidikan mampu meningkatkan kecerdasan anak bangsa berakselerasi dengan perkembangan global menjadikan generasi muda yang tetap menjadi Indonesia, yaitu generasi yang bisa menghargai menjunjung tinggi nilai-nilai luhurnya sendiri dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan universal terwujud.

Bab 3

REKONSTRUKSI ILMU PENDIDIKAN NUSANTARA

A. Dinamika Ilmu Pendidikan di Indonesia

Sebuah ilmu, pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraan pendidikan tidak bisa melepaskan diri dan kurang mempertimbangkan situasi konkret dinamika pergumulan masyarakat yang mengintarinya. Lahirnya sebuah praktik pendidikan yang tidak mempertimbangkan pengalaman dan khazanah intelektual dari masa klasik serta mencermati situasi sosial-historis dan kultural masyarakat kontemporer, maka bisa dikatakan pendidikan tersebut bersifat "coba-coba", kurang mengakar dan tidak komprehensif. Kalau dipaksakan, bisa dipastikan sebuah praktik pendidikan tersebut akan mengalami banyak hambatan dan tidak membuahkan hasil sebagaimana tujuan pendidikan tersebut diselenggarakan.

Membangun konsep/ilmu pendidikan di Indonesia seharusnya bersifat komprehensif dan perlu

mengevaluasi dari setiap kesejarahan bagaimana sebuah praktik pendidikan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan dinamika kesejarahan pendidikan itu sendiri. Sistem evaluasi yang diperlukan adalah evaluasi berkelanjutan dan bukan berdasarkan ideologi yang diyakini setiap penguasa. Sehingga praktik penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Indonesia, yaitu proses bertumbuhkembangnya masyarakat Indonesia dari satu masa ke masa berikutnya. Sekaligus dapat dimaknai sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban bangsa Indonesia dari generasi ke generasi sepanjang sejarah.

Haruslah disadari bahwa praktik pendidikan di Indonesia belum berpijak pada filsafat dan ilmu pendidikan yang seharusnya dilakukan dengan selalu mempertimbangkan ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Namun praktik pendidikan lebih menitikberatkan pada ideologi para penguasanya, sehingga terkesan tambal sulam dan coba-coba. Kalau mau membangun sebuah praktik/sistem

pendidikan yang ideal, seharusnya bisa dilakukan secara komprehensif dan harus berangkat dari kenyataan yang sudah berjalan di negara ini dengan mempertimbangkan segala aspek positif dan negatifnya, termasuk sistem-sistem pendidikan yang sudah dilakukan oleh bangsa ini sebelum memperoleh kemerdekaanya.

Lebih-lebih bila dilihat dari perspektif sejarah, sudah maklum jika Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya pada saat ini, secara formal sistem pendidikan Nasional Indonesia itu mulai ada. Namun, Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka merupakan kelanjutan dari cita-cita dan praktek-praktek pendidikan masa lampau. Terdapat tiga tonggak pendidikan masa lampau yang dijadikan dasar sistem pendidikan nasional Indonesia merdeka, yaitu: 1) Pendidikan Tradisional. Penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar dunia, Hindu, Budha, Islam dan Nasrani (Katolik dan Protestan). 2) Kolonial Barat, yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Barat, terutama

Belanda. 3) Pendidikan Kolonial Jepang dalam zaman Perang Dunia II (Mudyahardjo, 2001: 214-215).

Sementara Sistem Pendidikan Nasional Indonesia jika dilihat dalam lintasan sejarah pendidikan di Indonesia, sudah berjalan pada tiga periode sebagai berikut:

1. Pada Era Penjajahan

Pada masa ini pendidikan masih berada pada bayang-bayang penjajah dan mengikuti kepentingan mereka. Sebab kondisi bangsa ini ditindas dan dijadikan budak pemuas nafsu para kolonialis. Akibat penetrasi kaum penjajah terutama penetrasi birokrasi yang eropa sentris, termasuk di bidang edukasi, sekularisasi, komersialisasi telah mengancam eksistensi lembaga-lembaga tradisional dan dirasa telah menimbulkan berbagai kekecewaan (Isma'il, 1997: 41). Oleh sebab itu, pendidikan terutama yang dimotori para ulama, kiai dan guru-guru agama pada saat itu harus menggelorakan semangat anti penjajah dan mampu menjawab segala

kesulitan yang dihadapi rakyat dan sanggup merespons tuntutan zaman. Juga, pendidikan diarahkan untuk ikut meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sartono Kartodirdjo dalam penelitiannya *Protest Movement in Rural Java*, telah membuktikan kebenaran pengaruh para ulama tarekat dalam menginspirasi perlawanan secara sporadis terhadap penjajah tersebut terutama di Jawa (1984: 168-196). Menurut penelitian Manfred Ziemek, para pejuang kemerdekaan yang melawan kaum penjajah adalah para kiai, yang merasa mendapat ilham dan terpenggil untuk memprakarsai dan memimpin perlawanan (Ziemek, 1986: 58). Terkait dengan hal ini, Bruinessen juga menyatakan bahwa menurut penyelidikan yang lebih seksama, tidak sedikit pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai dan haji (Zuhri, 1977: 142). Lebih-lebih sebagaimana pengakuan J. Benda (1980: 42), bahwa Belanda selalu menyebarkan opini melalui Huijgronye (orang Belanda yang sudah masuk Islam dan lama bermukim di Makkah) yang menyatakan

bahwa ziarah haji ke Makkah adalah bukannya untuk menjadi haji yang penuh damai, melainkan terdapat unsur anti Belanda yang penuh semangat pemberontakan. Melihat realitas ini, Belanda tidak menyukai para jamaah haji. Apalagi dikarenakan adanya fakta bahwa pada umumnya para jamaah haji setelah pulang dari Makkah menjadi kiai dan tokoh masyarakat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Semua kenyataan tersebut sekaligus membuktikan bahwa sebelum penjajah datang ke nusantara telah terdapat sistem pendidikan yang biasanya dilakukan di masjid dan surau di bawah pengaruh kuat para kiai dan guru-guru agama atau sering disebut modin. Melalui masjid, surau dan pesantren-pesantren itulah para kiai/modin melakukan proses edukasi terutama dalam persoalan ilmu agama sekaligus penyadaran terhadap masyarakat akan bentuk penjajahan yang telah dialami bangsa ini.

Bahkan Mahmud Yunus (1979: 30) membenarkan realitas masyarakat muslim pada saat

penjajahan mendirikan masjid/surau (langgar) di setiap desa, selain untuk kepentingan shalat berjamaah juga sebagai tempat pendidikan. Selain itu, Mahmud Yunus (1995: 223) juga menyatakan bahwa gambaran sistem pendidikan agama yang dilakukan di masjid/surau ini pada awal-awalnya telah ada pada zaman Mataram. Menurutnya terdapat beberapa tingkat pendidikan Islam pada zaman Mataram dengan masjidnya masing-masing. Pendidikan dasar biasanya dilaksanakan di masjid desa dengan tujuan untuk membaca dan menghafal surat-surat Al-qur'an. Kemudian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi seorang santri bisa melanjutkan ke masjid tingkat kawedawanan, selanjutnya tingkat kabupaten, dan akhirnya masjid agung. Jika organisasi masjid tersebut sangat kompleks dan menyediakan asrama bagi para santri, maka masjid tersebut dapat disebut sebagai pesantren.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pada masa penjajahan, pranata pendidikan nusantara adalah sistem pendidikan Islam yang terkenal dengan

sebutan pesantren itu. Hal ini, menurut Ali Hasan & Mukti Ali, 2009: 1), disebabkan kenyataan bahwa sebelum bangsa Eropa tiba di Nusantara (\pm abad 16) keberadaan pesantren sudah muncul pada saat itu. Bahkan pada saat Belanda tiba di Indonesia, maka bisa dikatakan sistem pendidikan pesantren masih mendominasi sistem pendidikan dan pengajaran masyarakat. Apalagi, sebagaimana pengamatan Redja Mudyahardjo (2001: 257), pemerintah Kolonial Belanda kelihatan membiarkan perkembangan pendidikan Islam di nusantara. Baru kemudian pada tahun 1563, Antonio Galvani (Portugis) mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak Bumiputera di Maluku. Meskipun setelah VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) merebut kepulauan itu dari tangan Portugis dan kemudian sekolah itu di tutup (Hasan & Ali, 2009: 1).

Sistem pendidikan model pesantren mulai mengalami kemunduran menurut catatan Mahmud Yunus (1979: 33), setelah kerajaan Islam jatuh dan kaum padri dipatahkan oleh penjajah Belanda. Tetap menariknya, meskipun kerajaan Islam jatuh pada saat

itu, Pendidikan Islam tetap dilaksanakan dan tetap ada di masjid-masjid dan surau-surau. Keberadaan pendidikan Islam ini juga tetap eksis meskipun pemerintah penjajah telah mendirikan beberapa sekolah sebagai saingan surau-surau itu.

Dalam sejarah pendirian lembaga-lembaga pendidikan, Belanda pada paruh kedua abad ke-19, baru memberikan perluasan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan ini pertanda dimulainya secara resmi politik etis. Kebijakan politik etis ini memang membuka kesempatan bagi banyak pribumi untuk mencicipi sekolah Barat. Beberapa anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar di sekolah untuk anak-anak Eropa yang sudah berdiri sejak 1816 (Subhan, 2012: 101). Program yang dibuka kolonial Belanda adalah *volkschoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa (*nagari*) dengan masa belajar selama 3 tahun (Azra dalam Madjid, 1997: xii). Program pendidikan untuk bumiputera yang sering disebut sebagai SR ini rendah sekali pelajarannya (Dewantara, 2004: 103). Kemudian setelah itu, kolonial Belanda membentuk sekolah

bumiputera kelas satu yang disebut HIS (*Hollandsche Inlandsche School*=Sekolah rendah Belanda untuk bumiputera=SR), M.U.L.O (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*=pengajaran rendah yang lebih luas=SML) dan A.M.S (*Algemeene Middelbare School*=SMA). Sekolah-sekolah ini pada mulanya didirikan untuk mempersiapkan tenaga kerja pada berbagai sektor yang diciptakan Belanda (Azra, 1999: 122).

Sekolah Menengah Atas atau AMS yang didirikan Belanda memiliki tujuan; *Pertama*, memberi kesempatan kepada para pemuda Indonesia tamatan MULO untuk meneruskan pelajaran. *Kedua*, sebagai jenjang untuk meneruskan ke perguruan tinggi, *ketiga*, mendidik anak didik untuk menjadi pegawai-pegawai kolonial Belanda dan mempertahankan kekuasaannya.

Format kurikulum AMS tersebut terbagi menjadi dua bagian A dan B dengan jejang waktu setahun; bagian A berisi materi Ilmu Pengetahuan Kebudayaan dengan spesifikasi Kesusasteraan Timur dan Kesusasteraan Klasik Barat. Sementara pada bagian B berisi materi Ilmu Pengetahuan Kealamiah.

Mata pelajaran pokok AMS bagian Kesusasteraan Timur adalah bahasa Jawa, Melayu, Sejarah Indonesia (perspektif Belanda) dan ilmu bangsa-bangsa. Dan mata pelajaran Kesusasteraan Klasik Barat adalah bahasa latin. Dalam mata pelajaran AMS bagian B berisi materi ilmu pasti dan alam (Abdullah Idi, 1999: 207-208).

Dalam perkembangan awalnya, model pendidikan ala Belanda mengalami kegagalan karena tidak berhasil mencapai tujuan seperti yang diharapkan mereka, karena tingkat putus sekolah yang amat tinggi dan mutu pengajaran yang amat rendah. Di sisi lain, kalangan pribumi, khususnya di Jawa, terdapat resistensi terhadap model pendidikan ini karena sering dicurigai sebagai "membelandakan" anak-anak mereka. (Azra dalam Madjid, 1997:xii). Bahkan Haji Agus Salim, sebagai salah seorang pergerakan pada saat itu, menganggap sekolah Belanda adalah sebagai sarang perbudakan yang hanya memproduksi manusia yang menghamba pada penjajah.

Meskipun harus disadari, kegagalan pendidikan seperti ini bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas bangsa Indonesia. Melainkan masalah yang dihadapi manusia Indonesia saat itu menurut H. A. R Tilar (2006: 69) adalah kurangnya kesempatan yang diberikan untuk semua anak bangsa. Sebab secara intelegensia sebenarnya masyarakat Indonesia tidak mau kalah dengan bangsa Belanda. Kenyataan ini bisa dibuktikan dengan lahirnya para pemimpin gerakan nasional (*founding fathers*) setelah mengikuti pendidikan kolonial dan akhirnya malah menjadi bumerang bagi pemerintah penjajah. Sebenarnya terdapat tiga orang yang sangat menginspirasi pergerakan para pemimpin gerakan nasional saat itu, yaitu; Snouck Hurgronje, C van Vollehnoven dan G. A. J Hazeu. Sebab bagi mereka pendidikan dipandang bukan sebagai upaya mentransfer pengetahuan melainkan juga sebagai taktik bagi kaum pergerakan. Pendidikan juga dianggap sebagai upaya pembebasan, membawakan kejernihan bagi para siswa bukan menciptakan agitasi. Pandangan-pandangan pendidikan seperti

inilah yang menginspirasi tokoh pergerakan seperti Sjahrir dan Hatta untuk mendirikan sebuah gerakan pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan sebagai jalan menuju kemerdekaan.

Selain faktor kurangnya kesempatan mengenyam pendidikan bagi pribumi yang menjadi penyebab kegagalan pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa kecenderungan pemerintah penjajah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu (1) pendidikan agama tidak diberikan di sekolah. Hal ini disebabkan aliran liberalisme yang berkembang di negeri Belanda yang menghendaki bersifat netral dalam urusan agama. (2) adanya politik diskriminasi antara pribumi dengan orang Eropa, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia dibedakan menjadi tiga golongan; 1) Orang Eropa, 2) Bumiputera, dan 3) Orang Timur Asing (Mudyahardjo, 2001: 255-256). Bumiputera selain dibedakan dengan orang-orang Eropa, juga dibedakan dengan orang Cina.

Bisa dikatakan karakteristik sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan

Belanda adalah 1) Dualistik diskriminatif yang membedakan antara pendidikan untuk orang-orang Eropa dan Bumiputera; 2) Sentralistik. Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai wewenang mengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan untuk orang-orang Eropa/Bumiputera; 3) Tujuan Pendidikan Bumiputera adalah menghasilkan tamatan yang dapat menjadi warganegara Belanda kelas dua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta Belanda tingkat menengah dan rendah (Mudyahardjo, 2001: 260).

Sedangkan strategi pembelajaran yang sering dipakai pendidikan Barat, menurut K. H. Dewantara (2004: 13) adalah *regering, tucht, dan orde* (perintah, hukuman, dan ketertiban) dan dalam realitasnya model seperti ini sering memperkosakan kehidupan batin anak-anak dan merusak budi pekertinya, disebabkan mereka selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tidak setimpak dengan kesalahannya.

Memperhatikan beberapa kelemahan sistem pendidikan Belanda tersebut, telah mendorong K.H. Dewantara melalui ketetapan Taman Siswa untuk memakai sistem pendidikan pondok (zaman Islam) atau ashrama (zaman Buddha) dengan tujuan mempunyai rakyat yang kuat lahir dan batinnya untuk menjunjung tinggi derajat bangsanya. Untuk keperluan ini, beliau menawarkan beberapa solusi yaitu a), memperbanyak sekolah-sekolah bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia b), memperbaiki pelajarannya, dan c), mendidik anak-anak kita, agar mereka bangga sebagai anak rakyat kita (Dewantara, 2004: 104). Model sistem pendidikan pondok, yang dicita-citakan oleh K.H. Dewantara dan dianggapnya sebagai sebuah sistem nasional, dengan begitu sungguh telah beliau laksanakan dalam praktik pendidikan. Dalam sistem pendidikan yang didirikan beliau pada tanggal 3 Juli 1922 yaitu Taman Siswa mencoba menerapkan sistem "gulu-kula", setiap kelas disediakan guru yang mendiami dan memberi pendidikan sebagaimana kiai mendidik santri di pesantren dan sistem *among* yang menempatkan

setiap guru di sekolah sebagai fungsi orang tua bagi peserta didik sendiri.

Dengan berakhirnya penjajahan Belanda yang ditandai dengan datangnya Jepang memunculkan adanya perubahan. Masyarakat Indonesia yang dahulunya merasa tertekan dan kurang bisa mengekspresikan jati dirinya dan lebih mendekati budaya ke Belanda-belandaan, berubah menjadi bercorak "Nippon" (Dewantara, 2004: 279). Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, ketika Belanda bertekuk lutut pada Jepang semua sistem dan model pendidikan yang pernah dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda diganti oleh pemerintah Jepang. Pemakaian bahasa Belanda di sekolah-sekolah dilarang. Sedangkan pengantar pengajaran menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga sebagaimana penjelasan Sodik Kuntoro (dalam Li Ode, 2006: 153), bahasa Indonesia sudah memegang peranan penting sebagai bahasa pengantar pengajaran dan sebagai bahasa ilmiah. Pelajaran bahasa daerah diberikan pada murid-murid kelas I dan II sebagai bahasa pengantar sampai siswa mengerti bahasa

Indonesia. Bahasa Indonesia diajarkan mulai kelas III.

Beberapa sekolah yang diganti pemerintah Jepang adalah soal sekolah untuk kanak-kanak di bawah umur 7 tahun, yang sering disebut dengan istilah Frobelschool diteruskan dengan nama baru "Taman Kanak-Kanak", terjemahan dari perkataan "Kindergarten". Kurikulumnya ditambah beberapa pelajaran seperti nyanyian-nyanyian, permainan-permainan, dan cerita-cerita Nippon (Dewantara, 2004: 280). Selain itu, sekolah AMS, kemudian diganti dengan SMT (sekolah tinggi) dengan lama pendidikan 3 tahun, yang memberlakukan larangan pemakaian bahasa Belanda. Adapun beberapa ketentuan yang diterapkan dalam SMT adalah: bahasa resmi dan pengantar adalah bahasa Indonesia, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib, pengajaran adat istiadat Jepang, sejarah Jepang sangat penting, memberikan ilmu Bumi dalam aspek Geopolitik. Dengan ketentuan yang tersebut di atas, ada sisi positif yang diambil oleh bangsa Indonesia, yakni mulai meratanya pembelajaran bahasa

Indonesia, mulai muncul kesadaran untuk cinta kebudayaan dan kemerdekaan, serta tidak ada lagi diskriminasi dalam memperoleh pendidikan seperti dalam era penjajahan Belanda (Abdullah Idi, op cit 208).

Sistem pendidikan pesantren dan sekolah pada masa Jepang karena memiliki filosofi yang berbeda tentu saja melahirkan *output* yang berbeda pula. Selain itu, terjadi perbedaan yang sangat tajam antara ilmu agama dan umum yang menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama (Steenbrink, 1984: 160). Meskipun pendidikan Islam di zaman Jepang ini memiliki keterkaitan yang sangat erat antara Jepang dan ummat Islam. Hal ini disebabkan, karena Jepang pada saat itu membutuhkan umat Islam Indonesia dan mendapat dukungan terkait dengan perang Asia Timur Raya. Sedangkan dari umat Islam diharapkan kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jenderal Imamura, pejabat militer Jepang di Jawa menyampaikan pidato yang intinya bahwa pihak Jepang bertujuan melindungi dan

menghormati Islam (Benda, 1980: 153). Akibatnya Jepang tidak begitu ketat terhadap pendidikan Islam Indonesia dan memberikan kesetaraan penduduk pribumi dengan anak-anak penguasa. Pada masa Jepang, lembaga-lembaga pendidikan serta pendirian tempat-tempat ibadah dapat berdiri dengan mudahnya.

Sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa Jepang atas ide *Hakko-Ichi-U*, maksudnya sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Jepang lebih ditujukan untuk kepentingan perang. Secara umum gambaran kegiatan sekolah pada saat itu adalah seperti yang digambarkan Syamsul Nizal (2009: 344), 1) mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang; 2) membersihkan bengkel-bengkel, asrama-asrama militer; dan 3) menanam ubi-ubi, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persiapan makanan. Karena pemerintah Jepang pada saat itu tidak menghiraukan kepentingan agama, maka sistem pendidikan Islam lebih memungkinkan berpraktik leluasa di banding pada era pemerintah Belanda.

Sistem persekolahannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu 1) Pendidikan Dasar 6 tahun, 2) Pendidikan Menengah 6 tahun, dan 3) Pendidikan Tinggi (Mudyahardjo, 2009: 270). Sementara penyelenggaraan pendidikan di masa Jepang terdapat tiga arah yaitu; 1) Melanjutkan sistem pendidikan Islam tradisional dengan bentuk Pengajian Quran dan Pengajian Kitab, 2) Mengadakan pembaharuan sistem lama dengan membentuk Pesantren Modern seperti Pesantren Tebuireng (1899), dan Gontor (1926), 3) Mendirikan Madrasah atau sekolah agama dalam beberapa jenjang seperti sekolah umum (Mudyahardjo, 2009: 257).

2. Pada masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama ini, yaitu di awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang berada pada masa kekuasaan Soekarno telah berhasil meletakkan pondasi kesatuan sistem pendidikan dan membuka kesempatan belajar yang luas dan pengembangan karakter bangsa yang merdeka sebagai basis untuk kemajuan. Namun kegiatan

pendidikan dan pengajaran masih banyak mengalami goncangan serta ketidakstabilan. Sebab antara tahun 1945-1950, Negara ini masih menghadapi perang mempertahankan kemerdekaan. Maka, para murid dan guru terkadang juga ikut terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan (Kuntoro dalam La Ode, 2006: 157).

Pada era ini, pemerintah cukup memberikan ruang bebas kepada pendidikan. Konsep yang dijalankan berasaskan pada sosialisme yang menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan sedemikian rupa demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Konsep tersebut memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial.

Pendidikan pada era ini, sungguh menemukan momentumnya sebagai wahana pembentukan karakter, menumbuhkan nasionalisme dan membentuk identitas sebagai bangsa Indonesia. Apalagi dalam perjalanan pemerintahan Soekarno beliau menekankan tiga hal; 1) mendirikan negara

yang bersatu dan berdaulat, 2) membangun bangsa dan 3) membangun karakter. Ketiga hal tersebut secara jelas tampak dalam konsep negara bangsa (*nation-state*) dan pembangunan karakter bangsa (*national and character building*). Pada implementasinya kemudian upaya mendirikan negara relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan upaya untuk membangun bangsa dan membangun karakter. Kedua hal terakhir itu terbukti harus diupayakan terus menerus, tidak boleh putus di sepanjang sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia.

Selain itu, di era ini, sistem pendidikan telah berhasil meletakkan dasar-dasarnya dan dapat melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bangsa Indonesia juga berhasil membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya dengan sistem pendidikan penjajah. Meskipun masih dalam kondisi yang serba terbatas, para pengajar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan para pelajar sangat antusias menuntut ilmu. Bahkan berhasil melahirkan para pemimpin yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan

terhadap NKRI. Sayangnya, menurut catatan H. A. R. Tilar (2006: 69-71), di era Orde Lama ini pendidikan ditunggangi untuk kepentingan politik dan pendidikan dijadikan sebagai sarana indoktrinasi untuk melanggengkan struktur kekuasaan.

Bahkan pemerintah Soekarno yang dianggap sekuler itu telah melakukan penyeragaman atau pemusatan pendidikan nasional. Pemerintah lebih memperhatikan, mengembangkan dan mendirikan sekolah-sekolah umum sebanyak-banyaknya. Akibatnya adalah menurunkan pamor pesantren di mata masyarakat. Pesantren kurang bisa berkembang dan hanya pesantren besar saja mampu bertahan (Qomar, 2005: 13-14). Kenyataan ini berbeda pada masa Belanda yang secara khusus membuka sekolah untuk orang-orang tertentu saja, dan memberikan jabatan pada orang-orang yang bersekolah di sekolah tersebut.

Pada masa ini, bukan berarti berbagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas tidak dilakukan sama sekali. Pemerintah saat itu, telah mendirikan universitas di setiap provinsi dengan

tujuan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Bahkan selain itu, hal yang diupayakan untuk mempertahankan kualitas peserta didik adalah dengan melaksanakan ujian yang terpusat dan menerapkan sistem kolonial dalam melaksanakan ujian yang terkenal sangat ketat dan jujur. Sistem ujian hanya ditekan dengan *multiple choice* untuk mengukur *performance* dan kecerdasan peserta didik.

3. Pada Masa Orde Baru

Pendidikan orde baru yang berada dalam kepemimpinan Soeharto ini dikenal juga dengan era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, terjadi loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Jumlah murid meningkat tajam dari 13.023.000 pada tahun 1967/1968 menjadi 29.239.238 dalam tahun 1997/1998 (Suyanto, 2006: 14). Akan tetapi, Instruksi Presiden Pendidikan Dasar tersebut baru mampu meningkatkan kuantitasnya saja, sedangkan peningkatan kualitasnya masih terbengkalai. Oleh

sebab itu, pendidikan orde baru dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Bahkan, pada orde baru ini terjadi kemerosotan pendidikan nasional. Di masa orde baru ini juga pendidikan di Indonesia diarahkan sebagai alat pembenaran kroni-kroninya. Praktik pendidikan hanya menghasilkan budaya semu dan penuh kepura-puraan. Dunia kampus pun, pada tahun 1970-an dibungkam dan dipasung kreativitasnya agar tidak bersuara lantang dan membahayakan kekuasaan para penguasa dengan memaksakan NKK-BKK sebagai ganti sistem Dewan Mahasiswa.

Pada masa ini, ilmu pendidikan sungguh mengalami "krisis identitas", meminjam istilah Mochtar Buchori (1994: 5), dan kurang tanggap terhadap dinamika sosiologi kultural yang sedang terjadi dalam masyarakat. Para ahli pendidikan juga masih bingung dalam mendefinisikan ilmu pendidikan apakah sebagai *education* atau *pedagogic*, yang semestinya tidak harus dipisahkan antara keduanya. Sehingga wilayah pendidikan mengalami penyempitan hanya memperhatikan

persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekolah dan menutup diri dari persoalan yang berada di luar sekolah. Sehingga proses pendidikan hanya berkutat pada persoalan *teks book*, hapalan, pendisiplinan untuk menjadikan seorang pendidik patuh dan kurang memberikan kebebasan pada anak untuk bisa berfikir kritis dan memecahkan persoalan yang sedang terjadi di luar sekolah.

Sementara sistem pendidikan yang dikembangkan Orde Baru lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah bukan untuk kepentingan peserta didik, pasar dan masyarakat. Sistem pendidikan bersifat sentralistik, karena semua persoalan pendidikan dari tujuan, metode, kurikulum, tenaga kependidikan bahkan persoalan seragam semuanya diatur oleh pemerintah pusat dan sangat diskriminatif, karena berlawanan dengan UU No. 2 Tahun 1989 Pasal: 5, 6, 7, 8 dan 47 dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada warga negara untuk belajar dan menyelenggarakan usaha pendidikan. Dalam praktiknya, pendidik mengalami perlakuan yang tidak sama, apakah dia

segi anggaran, perlakuan hingga pada pengakuan lulusanya antara sekolah yang berada di bawah langsung pemerintah (disebut Sekolah Negeri) dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (disebut Sekolah Swasta) (Mastuhu, 2003: 32-33). Pendidikan lebih bersifat birokratis, terpusat dan hubungan guru-murid cenderung mekanistik. Guru dan murid hanya dianggap sebagai *inhuman*. Oleh sebab itu sistem pendidikan di era ini banyak melahirkan manusia-manusia patuh dan kurang kreatif.

Akan tetapi, pada masa Orde Baru, bersamaan dengan dinamika politik umat Islam dan negara. Terutama disebabkan pesantren mempunyai suara yang sangat signifikan dan menentukan dalam pemilu. Maka Golkar sebagai kontestan pemilu tidak mengesampingkan potensi ini dan Golkar selalu membutuhkan dukungan dari pesantren. Imbasnya adalah pemerintah yang dikuasai Golkar pada saat itu menaruh sedikit perhatian pada dunia pesantren. Banyak juga kalangan dari intelektual santri yang memperoleh pembiayaan pendidikan dari APBN.

Selain itu, angin segar dukungan pemerintah ini dimanfaatkan kalangan pesantren untuk mengembangkan pesantren dengan mengajarkan berbagai ketrampilan seperti; peternakan, pertanian, kerajinan, dagang, dan lain-lain. Sehingga terbit kebijakan SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang penyetaraan madrasah dengan sekolah umum (Nasir, 205: 90-102).

Meskipun begitu, pada masa ini, sistem pendidikan pesantren memainkan peranan strategis dan mempunyai fungsi-fungsi seperti LSM. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Abdurrahman Wahid dalam Tulisan berjudul "Pesantren dan Politik Masa Kini" kumpulan makalah dalam seminar Internasional *"The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia"* yang diselenggarakan oleh Freidrich Naumann Stiftung dan Fakultas Pendidikan Universitas Teknik Berlin di Berlin pada tanggal 9-13 Juli 1987. Beliau mengungkapkan bahwa, pergolakan politik terjadi pada masa itu dan prediksinya tentang keadaan

politik di masa depan. Terutama tentang persaingan antara dua kubu besar yakni politisi birokrat dan militer. Menurutnya hal yang wajar jika LSM kemudian terpanggil untuk turun tangan mendampingi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja jika LSM terperosok dalam institusi politik praktis maka LSM telah kehilangan peran yang sesungguhnya. Pesantren merupakan lembaga yang dianggap sebagai satu bagian dari tradisi LSM Indonesia. Pesantren juga memiliki peluang besar untuk memperkuat masyarakat dengan catatan tidak terperosok dalam institusi politik praktis.

4. Pada Masa reformasi

Pada masa reformasi, pendidikan di negeri ini belum beranjak dari keterpurukan. Pendidikan pada masa reformasi malah mengalami pembongkaran besar-besaran. Pascareformasi pendidikan berubah menjadi desentralistik. Yang berarti kurikulum bukan lagi sebagai hafalan, namun kurikulum menjadi berbasis kompetensi dengan

segala anak pinaknya. Pendidikan di era reformasi ini masih berjalan di tempat, tidak ada pergerakan yang diandalkan dalam memacu dan memajukan pendidikan dunia. Karena pada masa ini pendidikan masih menjadi sebuah teori belaka yang tidak mampu berjalan dalam implementasi pendidikan yang betul-betul menyentuh kehidupan rakyat Indonesia. Pada masa ini juga sering terjadi pergantian kurikulum yang seolah-olah pendidikan menjadi sebuah kelincahan percobaan dari setiap fase penguasa tertentu. Tidak ada kebijakan yang tegas dan kuat, kondisi seperti ini memang sangat ironis. Pendidikan menjadi tumbukan dan korban kepentingan para elit pendidikan di tingkat birokrasi kekuasaan yang terus berupaya mencoba-coba sebuah konsep pendidikan tertentu untuk dijalankan. Pendidikan juga dianggap sebagai produk kapitalis yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Otonomi pendidikan yang diserahkan kepada pihak tingkat satuan pendidikan hanya menambah keruwetan yang lagi-lagi peserta didik yang menjadi korban dan tumbalnya.

Pada saat ini, dinamika ilmu pendidikan di Indonesia nampaknya belum beranjak dari paradigma lama ilmu pendidikan yang "konservatif" dan belum menuju sebuah ilmu pendidikan yang konstruktivistis-kritis. Sehingga ilmu pendidikan nampak menjadi sebuah ilmu yang cenderung tertutup dan tidak peka terhadap perkembangan. Akibatnya, ilmu pendidikan tidak berfungsi mengambil bagian dari perencanaan mengenai kebudayaan manusiawi. Memang setiap ilmu sebagaimana penjelasan Van Peursen (1985: 63) memiliki sistem tertutup (memiliki struktur dan kedudukan sendiri), tapi bukan berarti ilmu pendidikan harus terlepas dari tautan-tautan yang lebih luas atau terlepas dengan konteks.

Selain itu, wajar jika ilmu pendidikan yang seharusnya menjadi landasan filosofis dalam pengembangan persoalan-persoalan dunia pendidikan, kelihatan "mandul dan tak berdaya" dalam menghadapi perkembangan zaman apalagi ikut serta dalam memecahkan persoalan keadilan dan etik-kemanusiaan. Hal ini nampak dalam paradigma penelitian pendidikan, yang selalu didominasi

paradigma positivistik dan berbasis pada ontologi realisme, dimana realitas ada (exist) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Dengan begitu, objektivitas yang dibangunnya harus sesuai dengan hukum alam (*natural laws*). Padahal tidak semua realitas bersifat ajeg. Einstein dengan teori relativitas telah membenarkan statement ini. Bahkan menurut Weber, ternyata kebenaran itu subjektif dan *behind reality*. Lebih ironis lagi, implikasi paradigma ilmu pendidikan positivistik adalah ilmu itu lebih memihak pada negara besar (kapitalis) dan meminggirkan negara dunia ketiga. Dimana sebagaimana penjelasan Brian Holmes (1986), menyebabkan ketidakseimbangan dalam pendidikan dan ases pada pendidikan, pertumbuhan ekonomi neo-kolonialisme, rasisme.

Hegemoni kapitalisme sungguh telah menyebabkan krisis multidimensional dan ketidakadilan global. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 80% kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 20% penduduk kaya di negara-negara maju. Sementara 80% penduduk dunia di negara-negara miskin hanya

memperebutkan rempah-rempah sisa makanan pesta pora bangsa-bangsa negara maju. Kita bisa menyaksikan dengan mata telanjang, akibat perkembangan Iptek yang lepas dari kendali nilai-nilai moral Ketuhanan dan agama telah membawa krisis ekologis, misalnya: berbagai bencana alam: Tsunami, gempa dan kacaunya iklim dan cuaca dunia akibat pemanasan global yang disebabkan tingginya polusi industri di negara-negara maju; Kehancuran ekosistem laut dan keracunan pada penduduk pantai akibat polusi yang dihasilkan oleh pertambangan mineral emas, perak dan tembaga, seperti yang terjadi di Buyat, Sulawesi Utara dan di Freeport Papua, Minamata Jepang. Kebocoran reaktor Nuklir di Chernobil, Rusia, dan di India, dan lain lain. Krisis Ekonomi dan politik yang terjadi di banyak negara berkembang dan negara miskin, terjadi akibat ketidakadilan dan 'penjajahan' (neo-imperialisme) oleh negara-negara maju yang menguasai perekonomian dunia dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Bahkan sungguh memprihatinkan dan siap yang tidak mengelus dada jika mengerti bahwa negara Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi, justru mengalami krisis dan kelangkaan BBM. Ironis bahwa ditengah limpahan hasil produksi gunung emas-perak dan tembaga serta kayu hasil hutan yang ada di Indonesia kita justru mengalami kesulitan dan krisis ekonomi, kelaparan, busung lapar, dan berbagai penyakit akibat kemiskinan rakyat. Kemana harta kekayaan kita yang Allah Swt berikan kepada tanah air dan bangsa Indonesia ini? Mengapa kita menjadi negara penghutang terbesar dan terkorup di dunia? Semula ini karena ilmu pendidikan yang seharusnya bisa memecahkan persoalan di negara kita belum dibangun berdasarkan kebutuhan dan sesuai watak bangsa kita sendiri.

Teori-teori yang dikembangkannya pun masih mendukung ke arah kapitalisasi pendidikan dan masih terinspirasi oleh paradigma "liberal" sehingga belum memandang manusia sebagai makhluk aktif, kritis, dan merdeka. Hal ini bisa

dilihat dari fenomena pendidikan sekarang yang lebih didominasi pada teori-teori pendidikan seperti (1). teori reproduksi yang menganggap bahwa, hakekat pendidikan tidak kurang, tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, rasisme ataupun sistem relasi lainnya. (2). korespondensi, dimana pendidikan dirancang dan dikerjakan disekolah harus berkorespondensi dengan yang ada di dunia kerja. Sebuah teori, yang sangat dipengaruhi pemikiran filsafat realisme dan pragmatisme, dimana pendidikan harus merupakan derivasi dari dunia kerja. Dan (3). *credentialing theory*, dimana sekolah tak lebih suatu lembaga menyiapkan tiket awal masuk ke dunia kerja. Sebuah cara pandang paradigma positivistik, yang menyebabkan fabrikasi dan mekanisasi pendidikan. Pendidikan pun hanya melahirkan produk-produk yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, manusia serakah, tidak adil dan hampa akan nilai-nilai filosofis. Sebab aksentuasi pendidikannya hanya terletak pada pembentukan manusia berintelektual

tinggi, siap kerja dan berkompetisi tapi kering akan moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan perkembangan pendidikan Indonesia pun tidak menunjukkan gejala perkembangan yang memuaskan. Sistem pendidikan masih bersifat tambal sulam (*trial and error*), istilah yang berkembang adalah "ganti menteri ganti kebijakan". Semua ini disebabkan praktik pendidikan berdiri sendiri dan tidak terjadi interkoneksi antara ilmu pendidikan dan praktik pendidikan. Akibatnya praktik pendidikan, terkesan "liar" dan cerabut akar tradisi bangsa sendiri. Sekali lagi, hal ini disebabkan pendidikan belum mempunyai landasan yang kokoh dan belum berwawasan *local wisdom* bahkan terkesan mencangkok dari luar (*borrowing policy*).

Memang pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri, *Borrowing policy and practice* telah berjalan dewasa ini dan menjadi kecenderungan berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan badan donor dan sponsor pendidikan dan memelopori peristiwa tersebut. Hal ini tentu

menunjukkan realitas kesadaran akan pentingnya praksis konsep *borrowing policy and practice*, yang perlu dilakukan sebuah negara/badan donor/ sponsor dalam rangka reformasi ke arah pendidikan yang lebih baik. Sebut saja, Bank Dunia (WB) terlihat dalam CIE, yang sangat mendukung pendidikan formal untuk pengentasan kemiskinan, menghadapi efisiensi, kesetaraan, pertanggungjawaban, desentralisasi, swastanisasi, dan lain-lain. OECD terkenal karena berbagai penelitiannya yang terfokus kepada prestasi siswa, sedangkan UNDP, memperkenalkan dua indeks yang seringkali digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga pendidikan: Indeks Perkembangan Manusia dan Ukuran Pemberdayaan Gender.

Kita tahu, pada awalnya fenomena *borrowing policy and practice*, dilakukan oleh para "travellers tales" untuk menggambarkan praktik pendidikan negara lain dan menjadi dasar untuk melakukan perubahan ketika pulang ke negara asal. Biasanya, menurut Kandel para ahli pendidikan komparatif mendeskripsikan semata praktek

administratif, kurikulum, dan pembelajaran di negara-negara tertentu. Studi tentang cara negara-negara tertentu yang membahas persoalan pendidikan dalam konteks masing-masing tradisi sosial, politik, dan budaya. Harapannya dengan praktik semacam ini masing-masing negara dapat meningkatkan saling pemahaman internasional serta berkontribusi pada perdamaian global dan saling mengajarkan tentang HAM.

Tapi pada kasus Indonesia dengan kebijakan tersebut nampaknya belum menunjukkan keberhasilan. Alasannya adalah karena fenomena *Borrowing and practice* di atas tidak mengacu pada kebijakan massive demi peningkatan mutu pendidikan. Fenomena MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), pada tahun 2000-2003, sebagai misal hanya sebuah gerakan bersifat *struktural-introduction* yang cenderung coba-coba, tanpa melihat secara holistik penerapannya. Dimana otonomi pendidikan di tingkat sekolah yang menjadi ciri dari MBS, belum terwujud dengan baik karena belum didukung dengan kesadaran keterlibatan masyarakat (kalaupun

hanya sebatas "dana" bukan keterlibatan proses pendidikan) dan belum menganut prinsip "desentralisasi" karena masih banyak keputusan yang menunggu dari pusat di samping karena alasan klasik sistem pendidikan di Indonesia belum memiliki SDM yang handal, sarana dan prasarana serta manajemen yang belum memadai.

Selain itu kebijakan tentang standarisasi pendidikan dengan penerapan UAN, yang bertujuan salah satunya untuk mengantisipasi kesetaraan global. Tapi justru pada praktiknya, mendangkalkan hakikat belajar. Karena sekolah hanya menjadi sarana sukses menjawab tes dan kompetisi dan bukan membimbing siswa agar belajar (*learning how to learn*) serta menafikan eksistensi keanekaragaman potensi anak.

B. Pemecahan Masalah dengan Membangun Ilmu Pendidikan Nusantara

Seharusnya terjadi hubungan yang saling integral dan interkoneksi antara ilmu pendidikan dan

pendidikan, dengan berbagai usaha untuk memecahan masalah seperti berikut:

1. Perlunya menggeser ilmu pendidikan dari konservatif dan liberal ke arah pendidikan rekonstruktif dan kritis-transformatif.

Rekonstruksi ilmu pendidikan ke perspektif filosofis rekonstruktif dan kritis-transformatif berarti perlu membangun kembali sebuah bentuk ilmu pendidikan secara menyeluruh dan detail. Ilmu pendidikan perlu menjadi sebuah sistem yang dinamis dan luwes serta selalu terbuka dengan kritik. Karena itu, ilmu pendidikan perlu melakukan pembaruan dan perubahan sistem terus menerus. Sehingga ilmu pendidikan harus dijadikan sebagai landasan dan tolok ukur bagi praktik pendidikan ketika harus merespon globalisasi dan mampu menjadi basis riset-riset progresif, yang bisa menghasilkan berbagai teori-teori alternatif pemecahan masalah yang lebih baik bagi kemanusiaan.

Agar rekonstruksi ilmu pendidikan tersebut maksimal, perlu didekati dengan berbagai metode dan teori pendidikan. Reformasi ilmu pendidikan tidak dapat hanya mendasarkan pada salah satu teori atau aliran filsafat saja. Bahkan Ilmu pendidikan perlu dilihat dari disiplin lain seperti psikologi, filsafat, sosiologi, ekonomi dan antropologi. Tentang persoalan ini, pendidikan bisa dilihat dari perspektif *cross disciplines*, meminjam istilah Noeng Muhadjir. Dimana ia memiliki materi satu, tetapi obyek formal, telaah, visi, dan misi yang digunakan dalam telaah itu menggunakan prinsip ilmu itu sendiri (2000: 4). Tapi yang jelas, agar ilmu pendidikan memiliki fungsi dan makna sebagai humanisasi, inkulturalisasi, transhumanisasi, dan pemberdayaan perlu mendasari pada filsafat (dengan berbagai aliran yang ada) dengan pendekatan rekonstruksi dan transformatif-kritis.

Dengan berbagai teori-teori kritis, memungkinkan sekali akan bisa menekan hegemoni ilmu pendidikan yang selama ini lebih berorientasi pada modernisasi, dengan paradigma

developmentalismenya, yang secara nyata telah menimbulkan sejumlah persoalan kemanusiaan. Dalam pencarian sebuah kebenarannya pun telah "meragukan" maka perlu dicari pencarian kebenaran dengan alternatif lain yaitu dengan pendekatan kritikalisme; atau pendekatan postmodernisme yang tidak ada lagi kebenaran tunggal, tetapi berusaha mencari kebenaran menurut konteksnya.

Ilmu pendidikan harus menggunakan *cultural studies*, dimana ilmu pendidikan memungkinkan untuk ikut terlibat dalam pengkaji budaya kontemporer dengan teori kritis dan telah mengangkat *discourse/wacana* baru dengan pandangan yang tidak hitam putih. Melalui menggunakan interpretasi dengan media dekonstruksi dengan suatu tujuan bisa melakukan dekonstruksi terhadap sebuah konstruksi. Ilmu pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana mencari kesetaraan dalam posisi yang sama dengan mengedepankan keanekaragaman keunikan yang dimilikinya sehingga tidak ada dominasi kebenaran (*truth claim*). Keluar dari ramuan yang kaku dan keluar dari dogma

kepentingan. Untuk menemukan sebuah kebenaran yang cocok untuk dipahami.

Selain itu, ilmu pendidikan dapat mencari nilai hakiki yang mencari faktor unik/penggerak/pendorong berupa etos dan spirit yang bersumber dari apa yang oleh sosiolog James Coleman diistilahkan dengan sebutan *Social Capital*. Definisi *social capital* menurut Danah Zohar (2004: 3) dan Ian Marshal adalah *the wealth that makes our communities and organizations function effectively for the common good* dan menurut Francis Fukuyama modal sosial dianggap sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dalam merealisasikan tujuan umum dalam kelompok atau organisasi. Dengan demikian, Ilmu pendidikan harus berbasis pada modal sosial yang secara nyata telah memberi efek positif bagi terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang beradab (*civil society*), melemahnya fungsi modal sosial akan menyebabkan sebuah malapetaka atau *the great disruption*, meminjam ungkapan Francis Fukuyama (2007). Modal sosial inilah yang akan dipercaya mampu mengembalikan

kembali masyarakat Indonesia yang bermoral (remoralisasi), atas sejumlah peristiwa yang nampak jauh dari norma-norma seperti sikap masyarakat yang cenderung anarkis, main hakim sendiri dan budaya korupsi.

2. Praktik pendidikan perlu berlandaskan pada ilmu pendidikan

Praktik pendidikan di Indonesia yang ditengarai para ahli telah melenceng dari fitrah sebagai sarana pembebasan dan pencerdasan bagi bangsa serta menjauhkan mereka dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dalam masyarakat. Maka dalam konteks ini, pendidikan perlu dilihat kembali peran dan fungsinya, bukan sebatas "persekolahan" tetapi pendidikan harus menjadi tempat penyemaian seluruh bakat dan minat siswa. Sehingga pendidikan bisa mengantarkan setiap pribadi menjadi sosok manusia yang mandiri, cerdas dan bermartabat. Sebab menurut aliran rekonstruksi sebagaimana dijelaskan oleh Gerald Lee Gulek (1974: 11) pendidikan dipandang lebih informal

menunjukkan pada proses inkulturasi total. Sementara sekolah adalah agen sosial yang ditetapkan membawa siswa pada kelompok kehidupan melalui penanaman secara pasti skill, pengetahuan dan nilai-nilai masyarakat.

Relevan dengan persoalan tersebut, perlu juga meletakkan kembali ilmu pendidikan yang diyakini bisa memberi panduan bagi praksis pendidikan. Semua ini agar pendidikan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang semestinya. Sebab tujuan adalah laksana "kompas" sekaligus "jangkar" bagi praksis pendidikan. Keberhasilan pendidikan terletak dari dasar-dasar yang dibangun untuk dapat dijadikan sebagai pijakan dalam merealisasikan semua aktivitas pendidikan. Tujuan merupakan gambaran ideal seperti apa seharusnya proses pendidikan itu dilaksanakan, karena biasanya mengandung nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dari filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas (karakteristik) suatu sistem pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas dan benar dan indah untuk kehidupan. Maka menjadi

keharusan bagi pendidikan untuk memahami sehingga tidak terjadi kesalahan dalam su pendidikan. Tanpa perumusan tujuan, guru tidak dapat merancang pelajaran, tidak bisa mengukur keberhasilan dari penyampaian pelajaran, dan sulit mengorganisir kegiatan siswa dalam pencapaian tujuan pengajaran itu.

Selain itu, Tujuan pendidikan dapat memberi arah bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan agar sesuai dengan nilai dan *wisdom* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau alat evaluasi bagi praktik pendidikan yang mengarah pada standar yang telah ditetapkan. Dengan begitu, secara ringkas dapat dikatakan mengapa tujuan pendidikan penting disebabkan oleh tiga hal yaitu; karena tujuan berfungsi sebagai *direction*, artinya memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan, *Motivation* artinya memberikan "dorongan" dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan dan *Evaluating Educational Process*, artinya tujuan

mengarah pada standar evaluasi yang telah ditetapkan.

Pada kenyataannya memang terdapat berbagai pandangan dari para ahli terkait pembahasan tujuan pendidikan sebut saja John Dewey, Alfred North Whitehead, R.S. meskipun begitu, menurut Peters dan Rubin Gotesky ketiganya sama-sama ingin mengungkapkan *bahwa end in view* tujuan pendidikan adalah untuk harmoni dan kemanusiaan. Tujuan menurut ketiganya lebih dilihat sebagai instrumental values untuk mencapai tujuan lain. John Dewey menyebut, means untuk mencapai ends, yang pada proses berikutnya ends tersebut menjadi means untuk mencapai ends baru. Menurut John Dewey (2001: 103-105), tujuan berimplikasi pada keteraturan dan kerapian sebuah aktifitas. Meninjau ke depan akhir sebuah kemajuan dan meramalkan serta memberi bimbingan pada aktifitas. Sementara Rubin Gotesky, menyakini *end in view* sebagai sebuah perencanaan yang akan direalisasikan dalam pendidikan (Brown, 1970: 168). Ia sepakat dengan John Dewey yang membedakan antara "*end* dan *end-in-view*". Tujuan

pendidikan tersebut dipandang suatu proses untuk membimbing manusia dalam dinamika yang berkembang di mana ia membentuk dirinya sebagai manusia dengan pengetahuan, kekuatan, dan moralitas. Sementara pada saat yang sama menyampaikan kepadanya warisan spiritual bangsa dan peradaban, serta melestarikannya untuk generasi berikutnya (Brown, 1970). Sementara Keberhasilan suatu masyarakat dalam membentuk masyarakat beradab; "baik dan cerdas", yang menurut Alfred North Whitehead (1951), harus melalui *education of people* adalah—tergantung bagaimana kontrol tujuan pendidikan yang dibangunnya. Untuk keperluan ini, maka pemikiran mendalam tentang "dasar-dasar" yang dapat dijadikan sebagai pijak praktik pendidikan mutlak diperlukan. Agar praktik pendidikan mampu membawa ke arah perbaikan masyarakat menuju "*ideal of citizenship and social*" meminjam ungkapan Leslie M. Brown (1970). Dalam konteks ini, tentu saja pendidikan perlu mempunyai *ends-in-view* seperti yang terakumulasi pada buku Plato, *The Republic* yang terkenal itu.

Terkait diskursus tentang tujuan pendidikan, perlu kiranya memberi batasan pembedaan istilah rumpun tujuan pendidikan menjadi *aims, ends, purposes, objectives, goal*. Sebab, masing-masing meskipun memiliki arti sama yaitu "tujuan", tetapi mempunyai maksud yang berbeda-beda. *Aims* lebih menunjukkan pada tujuan pendidikan yang berupa pernyataan umum, yang dirancang secara spesifik untuk mencapai beberapa perilaku atau produk tertentu. Biasanya menyediakan panduan dan menjadi sebuah titik terminal ke arah mana pendidikan bergerak, bekerja, atau menuju. *Aims* biasanya berupa pernyataan yang menggambarkan apa yang pelajar akan dapat lakukan sebagai hasil belajar. Mereka kadang-kadang disebut hasil belajar.

Ends, adalah tujuan yang bersifat ideal, sangat jauh untuk dicapai sulit/tidak dapat dicapai, walaupun demikian berfungsi memotivasi. Memang susah mencapai sesuatu tujuan yang bersifat ideal, tetapi manusia bisa selalu berusaha mendekati sempurna, sebagaimana "otoritas" yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, tujuan ideal biasanya lebih

bersifat spiritual. Semua aktivitas pendidikan kebanyakan berusaha merealisasikan tujuan ideal dengan sebuah istilah-istilah yang terkadang berada di langit dan susah didekati, seperti *personality*, kebaikan, moralitas yang baik, *insan al-kamil*, *educated mind*, *cultured mind* (cerdas tapi bermoral dan berbudaya), meminjam ungkapan Whitehead (1951). Sebuah gambaran produk ideal peserta didik yang diinginkan oleh sebuah aktivitas pendidikan yaitu manusia pintar, tetapi bukan untuk kepentingan sendiri melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Sementara *purpose*, lebih menunjukkan tujuan jangka pendek yang harus segera dicapai dalam pendidikan. *Goal* cenderung bersifat jangka panjang, luas dan berasal dari berbagai tujuan di mana apa yang harus siswa capai dalam belajar. Sedangkan *Objective*; Biasanya dianggap spesifik dan terdapat dalam kurikulum serta memuat apa saja yang harus dikuasai oleh siswa, bisa dilakukan, atau perilaku mereka akan dipamerkan di akhir instruksi.

3. Membangun Ilmu Pendidikan Nusantara

Munculnya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan disegala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, teknologi, sosial budaya, dan pertahanan serta menguatnya hubungan antarnegara yang semakin terbuka dan seolah-olah tanpa batas (*global village*). Kondisi semacam ini, sungguh telah membawa dampak yang sangat nyata terhadap pola pikir, sikap, dan gaya hidup sebagai sebuah bangsa. Bahkan, kalau tidak diwaspadai lama kelamaan, bahaya globalisasi dapat mempengaruhi tumbuhnya kecintaan terhadap budaya orang asing dan bangga terhadap produk-produk dari luar negeri. Sementara semakin hari, kondisi semacam ini mampu memudarkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan sikap patriotisme sebagai anak bangsa.

Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini, semua organisasi dan lembaga termasuk lembaga pendidikan di samping dituntut untuk menjaga survivalitasnya dengan menjaga mutu juga harus merespon segala tuntutan perkembangan zaman serta tidak meninggalkan "identitas". Hal penting yang

mendesak perlu direalisasikan adalah menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur pancasila melalui pendidikan. Praksis pendidikan di Negara kita perlu menumbuhkembangkan wawasan dan kesadaran bernegara, perilaku cinta tanah air, patriotisme, mengutamakan persatuan dan kesatuan

Jika hal itu tidak dilaksanakan maka, bisa dipastikan pendidikan di Negara ini akan mengalami banyak masalah dan menuju krisis identitas yang berujung dengan kehancuran sebagai sebuah bangsa. Relevan persoalan ini, menarik mengutip pernyataan Peter Senge (1990:14), bahwa *re-learning gets to the heart of what it is to be human. We become able to re-create ourselves* (pembelajaran yang sesungguhnya adalah memperoleh kesadaran untuk menjadi manusia yang mampu menciptakan kembali identitas mereka sendiri). Semua ini bisa diterapkan pada individu dan organisasi.

Dengan begitu organisasi pendidikan tidak cukup hanya bisa survive saja tapi lebih dari itu adalah "*adaptive learning*" yang mengarah ke "*generative learning*", pembelajaran yang mampu

meningkatkan kapasitas peserta didik untuk mencipta dan berkarya (Senge 1990:14). Selain itu, pendidikan juga harus mampu menjadi wahana pencerdasan manusia lahir dan batin. Terutama pendidikan sebagai proses humanisasi dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan seimbang, utuh dan terpadu, baik itu berupa kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual.

Menjadikan pendidikan sebagai sarana mengembangkan segi-segi kemanusiannya secara holistik, sekarang ini menemukan momentumnya. Apalagi dengan melihat realitas pengembangan pendidikan yang bersifat jomplang dan parsial, karena hanya lebih ditekankan apada salah satu aspek saja yaitu *intellectual question*. Bukankah prestasi akademik lebih memperoleh tempat di masyarakat/dunia pendidikan selama ini daripada pengembangan manusia? Mungkin semua ini didasarkan pada arus perubahan yang semakin cepat dan berjalan secara linier dalam kehidupan masyarakat modern yang ditandai dengan

transformasi sosial dan dahsyatnya dentum globalisasi. Tentu kondisi ini meniscayakan adanya kualitas dan profesionalitas manusia yang ingin *survive* di dalamnya. Melihat prasyarat seperti kewajiban pendidikan kemudian hanya dilihat sebagai *human capital* dan harus mempersiapkan manusia-manusia yang memiliki karakter unggul dengan kecerdasan ganda serta memiliki prestasi akademik yang membanggakan, agar memiliki daya saing dan mendapat pengakuan atau legalisasi di era yang penuh kompetisi.

Konsekuensi praktis dari fenomena tersebut adalah menjamurnya realitas pendidikan yang menawarkan sejumlah program-program unggul dengan menjanjikan diraihinya prestasi akademik yang lulus siap kerja. Jadi pendidikan kemudian lebih diorientasikan untuk memperoleh ijazah yang berkompetisi untuk mendapat kerja dari pada sebagai proses untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan agar menjadi manusia seutuhnya. Akhirnya pendidikan telah mengalami sejumlah pereduksiaan makna hanya sekedar tempat untuk memperoleh nilai ijazah.

membekali anak siap kerja di pabrik atau perusahaan—daripada sebagai wahana pemerdekaan setiap individu agar menjadi dewasa, berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri maupun orang lain tanpa tergantung pada orang lain, mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pendidikan tentunya perlu dilihat sebagai proses pembudayaan, sebagai upaya proses memerdekakan manusia dan upaya memanusiakan manusia (*Humanisasi*).

Melihat permasalahan tersebut, bukan berarti tidak terdapat tawaran-tawaran yang diberikan oleh sejumlah ahli, bahkan sejumlah seminar-seminar dan penelitian pun sering dilakukan. Pemerintah sendiri juga sering melakukan berbagai upaya perbaikan dengan berbagai usaha, meskipun hanya tekanan gonta-ganti kurikulum. Kegagalan berbagai tawaran dalam artian memperbaiki sistem pendidikan yang diinginkan bisa dipastikan, karena tawaran model pendidikan yang mengemuka selama ini masih berpusar pada “teknikal” dan beraroma *powering* daripada *empowering*. Akhirnya pendidikan justru kehilangan nalar kritisnya, berjarak dengan

masyarakat dan tercerabut dari akar budaya dan masyarakatnya. Alih-alih pendidikan mampu menjalankan peran dan fungsinya, sebagai *agent of change*, malah terperosok menjadi bagian dari sejumlah akar anomali sosial-masyarakat Indonesia. Selain itu, karena pendidikan masih terkesat mengekor pada luar (*borrowing policy*), maka pendidikan kehilangan visi idiologisnya dalam menatap globalisasi dengan segala dampak buruknya.

Bukankah pendidikan disinyalir oleh sejumlah pakar belum mampu membawa pencerahan akal budi masyarakat yang bisa mengantarkan pada sebuah tatanan manusia yang *educated people* dan gambaran masyarakat yang *good citizen* yang demokratis dan beradab. Diskursus pentingnya pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum 2013, pada pemerintahan SBY dan kemudian dievaluasi oleh Anis Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 dan akhirnya dihentikan melalui Permendikbud nomor 160/2014 bagi sekolah yang baru menerapkan pada satu semester sementara yang sudah tiga semester

diharapkan bisa melanjutkan kurikulum 2013. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan masih gagal menghantarkan capaian manusia sebagaimana yang diimpikan sejak lama. Faktanya, generasi muda sekarang banyak dihindangi penyakit meniru gaya dan perilaku Barat yang negatif, glamour dan miskin etika serta meninggalkan adat istiadat/budaya warisan para leluhurnya (*cultural identity*).

Akibat lebih jauh lagi adalah kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapi suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mozaik Indonesia yang retak, bagaikan ukiran yang sudah mulai pudar warnanya dan robek kain/benang pengikatnya, melainkan membela dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Untaian kata-kata sebuah tamsilan bahwa bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai "*het zachste volk ter aarde*" dalam pergaulan antar bangsa, sungguh kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas, melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang

melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. Krisis moneter yang kemudian disusul krisis ekonomi dan politik yang akar-akarnya tertanam dalam krisis moral dan menjalar kedalam krisis budaya menjadikan masyarakat kita kehilangan orientasi nilai, hancur dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual.

Kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, toleransi dan solidaritas sosial, idealisme, dan sebagainya telah hilang karena hanyut dilanda oleh derasnya modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks. Berbagai lembaga kecil dalam malfusi dan disfusi. *Trust* atau kepercayaan antar sesama, baik vertikal maupun horisontal, telah lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Sungguh sekarang identitas nasional kita telah dilecehkan dan dipertanyakan eksistensinya.

Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan dikembalikan kepada fitrahnya, sebagai *agent of change* dan membentuk manusia yang beradab

modern. Idealnya, pendidikan seharusnya merupakan gambaran kondisi masyarakat. Seperti halnya yang pernah diungkapkan Nicolas Hans (1948) "bahwa pendidikan adalah watak nasional suatu bangsa". Pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Irianto, 2014: 1-9).

Relevan dengan persoalan itu, tak salah kita mengembangkan lagi sistem pendidikan yang pernah ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara dan diterapkan melalui Perguruan Taman Siswa, yang lebih mengartikan pendidikan sebagai upaya suatu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan benih-benih bangsa itu. Untuk itu, manusia sebagai individu harus dikembangkan jiwa dan raganya dengan menggunakan segala alat pendidikan dan

didasarkan adat istiadat bangsa itu (Engkoeswari, 2010: 4). Dalam konteks Indonesia adalah masyarakat dengan wawasan yang sangat luas dengan tetap berpijak pada norma dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang etis-religious dan pancasilais.

Melirik kembali pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau yang memiliki nama asli Ki Soewardi Doerjaningrat salah seorang putera tani dari Sri Paku Alam III adalah sangat tepat. Sebagaimana Paulo Freire, Ki Hajar Dewantoro menjalankan agenda pendidikan. Keduanya melakukan perubahan-perubahan hidup masyarakat melalui pendidikan. Mereka juga para pejuang pendidikan yang telah membebaskan masyarakat dari kebodohan dan buta pengetahuan. Mereka lahir dan dilahirkan untuk mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia dan memberadatkan manusia. Kalau gagasan Paulo Freire tidak hanya menggerakkan dompet masyarakat agar bisa membaca dan menulis. Tetapi juga mengajak masyarakat agar

membaca peradaban dunia secara lebih lengkap, komprehensif, dan holistik (Yamin, 2009: 144-145). Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu hal yang mampu memberikan sumbangsih besar lagi perubahan bangsa ke depan, baik secara intelektual, sosial, maupun politik (Yamin, 2009: 178). Pendidikan diupayakan dapat membentuk karakter bangsa yang mandiri, tidak menjadi bangsa yang cengeng yang selalu minta pertolongan kepada bangsa lain. Pendidikan mencetak pola pikir bangsa yang kuat, bersolidaritas tinggi, menumbuhkan semangat patriotik dan cinta tanah air/nasionalisme. Pendidikan pun diharapkan menguatkan pendirian dan prinsip dasar untuk terus menerus teguh pada ideologi bangsa. Bahkan, pendidikan juga melahirkan anak-anak bangsa yang bermental baja, siap bertarung, dan mempertaruhkan nasib bangsa di atas kepentingan-kepentingan lain.

Membangun ilmu pendidikan nusantara dengan begitu, pendidikan harus ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia dengan berbagai dimensinya, yaitu 1). baik pengembangan manusia

sebagai individu yang memiliki potensi kesadaran akan diri sendiri (*self existence*), 2). sebagai makhluk sosial, dengan penekanan pada sikap saling kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan, 3). Sebagai makhluk susila, dengan mengembangkan nilai-nilai universal yang diakomodasi dan diadaptasi dalam nilai-nilai khas yang terkandung dalam budaya bangsa, 4), sebagai makhluk religius yang mau menghayati pengalaman keagamaan secara sepenuhnya dan taat melakukan ibadah. Untuk keperluan ini, salah satu upaya yang perlu segera dibenahi adalah pendidikan di negara ini harus memiliki *systemic thinking* sebagai sebuah landasan konseptual bagi proses pendidikan, sehingga antara teori dan praktis pendidikan bisa berjalan secara integral dan selaras. Selain itu, ilmu pendidikan yang diharapkan dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan pendidikan adalah ilmu pendidikan yang dapat memberi pegangan dan dasar bagi pengembangan pendidikan yang "realistis" sesuai dengan hakikat manusia dan sesuai dengan latarbelakang sosial budayanya.

Membangun ilmu pendidikan yang integralistis seperti itu merupakan gambaran ilmu pendidikan khas nusantara dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Sebab jika menelisik sejarah, para *founding fathers* kita sebenarnya telah menghendaki sebuah sistem pendidikan nasional yang bersifat integratif antara sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh Belanda yang bercorak sekuler dan netral terhadap agama dengan sistem pendidikan warisan umat Islam. Hal ini berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa untuk menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat, dan bahwa "usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa"* (Muhaimin, 2003: 85).

Selain sistem pendidikan nasional harus berdasarkan pada konstitusional pendidikan Indonesia yaitu UUD 1945, ideologi pancasila sebagaimana telah disebutkan di atas—pendidikan juga harus berdasarkan pada ketetapan MPR tentang

GBHN sebagai landasan operasionalnya. Kenapa sistem pendidikan nasional harus berdasarkan pada konstitusional pendidikan Indonesia? Sebab, dalam konstitusional pendidikan Indonesia telah mengamanatkan sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan watak, budaya, dan kepercayaan bangsa Indonesia. Misal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara historis dapat disebut bahwa Negara Indonesia sebagai *Indonesian Declaration of Independence* yang menunjukkan dengan tegas pengungkapan keyakinan bangsa Indonesia, visi kesejarahan, landasan fundamental kenegaraan, dan alasan ideologi berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka. Terdapat beberapa alasan Negara didirikan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan itu adalah untuk 1. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, 3. Mecerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Adapun Unsur-Unsur Pokok dan Asas-asas Pelaksanaan Pendidikan Nasional diantaranya

pendidikan moral Pancasila berlandaskan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan kesenian dan lain sebagainya. Asas-asas pelaksanaan pendidikan harus memperhatikan asas semesta menyeluruh dan terpadu, asas pendidikan seumur hidup, asas bhinneka tunggal ika, asas manfaat, adil dan merata yang memandang manusia, dan asas kepastian hukum. Semua ini, sekali lagi, perlu terintegrasi secara menyeluruh dan mendukung satu sama lain, sehingga pelaksanaannya bisa mewarnai/menjadi landasan setiap sistem pendidikan yang dikembangkan dan dibangun oleh masing-masing pendidikan di Indonesia.

Memperhatikan kenyataan tersebut, dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia perlu didasarkan pada sebuah sistem pendidikan yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur yang

saling membantu untuk mencapai suatu *product*). Menurut Depertemen pendidikan kebudayaan bahwa setiap sistem mempunyai ciri-ciri yaitu : tujuan, fungsi, komponen, interaksi atau saling berhubungan, penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, proses transformasi, umpan balik untuk koreksi (Ihsan, 2010 : 108-109). Pada kondisi ini, jika pendidikan Indonesia ingin berjalan sesuai yang diinginkan dan berhasil merealisasikan yang menjadi tujuan bersama yaitu generasi muda Indonesia cerdas bertakwa, mampu bersaing di tingkat global dan yang terpenting mampu melahirkan sosok pejuang yang mempunyai jiwa patriotisme dan semangat kebangsaan tinggi, senantiasa peduli dan mensukseskan pembangunan.

Demi kepentingan itu, sekiranya merealisasikan apa yang terdapat dalam bait-bait nasional kita yang berbunyi “ bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya, wahai gambaran cita-cita luhur para pendahulu kita ” seharusnya menjadi salah satu dasar dan acuan yang kuat untuk merancang dan menerapkan

pendidikan nasional kita. Maka sistem pendidikan harus didasarkan kepada Pancasila yang merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Karena Pancasila merupakan idiologi dan merupakan pandangan hidup bagi bangsa dan dasar hukum ini. Semua praktik pendidikan di Indonesia dengan begitu perlu merealisasikan apa yang menjadi landasan idealnya yaitu Pancasila. Maksudnya, proses pendidikan di negara ini harus ditujukan untuk membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian yang baik, yaitu manusia yang mempunyai sikap dan perilaku yang dijiwai nilai-nilai pancasila.

Bab 4

PESANTREN SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN NUSANTARA

A. Pesantren Sebagai Model Alternatif

Melihat carut-marutnya bangsa ini telah menyadarkan para ahli dengan berbagai disiplin keilmuan yang digelutinya, tak ketinggalan para pakar pendidikan dengan disiplin ilmu pendidikan untuk mencari jalan keluar bangsa ini agar bisa bangkit dari keterpurukannya. Salah satu aspek penting yang dilirik para ahli adalah dunia pendidikan. Sebab pendidikan merupakan aset nasional dan sosial yang paling strategis dan realistis dalam rangka usaha meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan manusia dapat menguak tabir kehidupan sekaligus dapat menempatkan dirinya sebagai subyek dalam setiap perubahan dan

pergeseran, baik pada aspek kultural maupun aspek struktural.

Beragam teori, model dan strategi telah dicoba dan terus dikembangkan oleh para ahli di Indonesia melalui dunia penelitian/pendidikan. Meskipun akhirnya masih terdapat dua kutub tajam yang menyebabkan pola yang mereka lakukan mengalami kegagalan. *Kutub pertama* terdapat peneliti/praktisi pendidikan yang terlalu mengidolakan bangsa asing, baik itu secara teori, paradigma dan sistem pendidikan yang selalu mereka tawarkan dalam memecahkan berbagai persoalan di tanah air. *Kutub kedua*, yang selalu menarik diri dan isolatif terhadap berbagai perkembangan yang sedang terjadi dan ikut mempengaruhi berbagai perkembangan dunia. Para peneliti/praktisi pendidikan yang masuk pada kategori ini, biasanya selalu alergi dan menolak keras berbagai teori yang berasal dari negara lain. Sementara mereka senantiasa

bermimpi dan menyakini segala persoalan yang melanda bangsa, terutama dalam mendidik anak-anak bangsa ini karena sudah terlalu jauh meninggalkan teori-teori pendidikan yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Padahal haruslah disadari bahwa bila masing-masing pihak bersikukuh pada pendapat/paradigmanya masing-masing secara ekstrem, dalam melihat berbagai ketimpangan terutama sekali dalam teori mendidik dan mencerdaskan tunas-tunas bangsa. Pastilah mereka semua sama-sama tidak bisa menjawab dan mengatasi permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, diperlukan kearifan untuk memadukan berbagai teori yang berkembang baik itu yang bersifat modern dan tradisional, demi kemajuan model pendidikan kita dan mengejar ketertinggalan bangsa ini di segala lini kehidupan dengan negara-negara lain, sekaligus tetap mampu menjaga dan

menjunjung tinggi budaya, adat istiadat dan melahirkan generasi muda yang senantiasa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita melirik dan memperhatikan sistem pendidikan pesantren. Usaha untuk menjadikan pesantren sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas ilmu pendidikan sebagaimana pesantren/Islam memahaminya (Mudjib & Mudzakkir, 2008: 2). Pada taraf ini, paradigma pesantren menuntut adanya desain besar tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi pendidikan. Sekaligus berusaha menjadikan pendidikan pesantren dengan segala sistem nilai, metode pengajaran dan kebudayaan yang dimilikinya sebagai ruh yang dapat menggerakkan sistem pendidikan untuk melahirkan pribadi-pribadi unggul, bermoral dan beradab dengan terintegrasinya berbagai

potensi yang dimilikinya sehingga dapat menjadikan manusia sempurna.

Lebih-lebih ilmu pendidikan pesantren yang dibangun para kiai nusantara sudah terbukti bertahan hingga sekarang dan telah ikut berkontribusi secara positif bagi perkembangan dan selalu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Apalagi pesantren mempunyai sebuah sistem pendidikan yang sering dianggap oleh para ahli sebagai *indigenous* dan sebagai model lembaga pendidikan hasil kreasi budaya Indonesia sendiri serta mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam proses pembentukan identitas budaya.

Bahkan pesantren dikatakan memiliki kontribusi bagi perwujudan karakter dan identitas kultural masyarakat Indonesia, disebabkan sistem pendidikan pesantren telah mengakomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat (Rahim, 2001: 150). Sekaligus

terdapat corak Islam yang sangat penting dan memberikan dasar ideologis dan kelembagaan yang kondusif bagi pesantren, di mana menurut Azyumardi Azra (1998: 87) dan beberapa ahli ditipologisasikan sebagai "Islam Tradisional/tradisi" di mana syari'ah dan tasawwuf menjadi unsur-unsur penting di dalamnya. Karena beberapa keunggulan yang terdapat dalam pendidikan pesantren.

Oleh karena itulah Abdurrahman Wahid (mantan presiden ke 4 RI) pada tahun 70-an pernah mempopulerkan sistem pendidikan pesantren sebagai sub-kultur dari bangsa Indonesia. Malik Fadjar tidak memungkiri kenyataan ini, sebab pesantren dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya telah menjadi semacam *local genius* (Fadjar, 1998: 126). Bahkan pesantren kalau dirunut dari belakang sejak abad 16, telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang benar-benar unik, mandiri dan tegar dalam berbagai

tantangan, mulai persoalan kolonialisme hingga gerusan perubahan zaman.

Tentu saja menganggap pesantren sebagai sub-kultur, pesantren mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan sistem-sistem pendidikan lainnya. Terdapat kriteria minimal yang dapat disematkan kepada pesantren sebagai sub-kultur yaitu: (1) Eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga kehidupan yang menyimpang dari pola kehidupan umum di negeri ini; (2) Terdapat sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren; (3) Berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya; (4) Adanya daya tarik keluar, sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri; dan (5) Berkembangnya suatu proses pengaruh-mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya

dan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang universal dan dapat diterima kedua belah pihak (Wahid, 2001: 2-3).

Paling tidak terdapat lima sistem pesantren, sehingga dengan sistem pendidikan pesantren ini pernah dilirik oleh Dr. Sutomo pada tahun 1935, ketika pesantren pernah menjadi perbincangan di kalangan intelegensi Indonesia berpendidikan Belanda. Meskipun menjadi salah seorang yang dikritik oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan berbeda pendapat dengannya karena dianggap "pro-pesantren", Sutomo tetap menganjurkan asas-asas sistem pesantren dipergunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional pada saat itu. Kelima sistem pesantren tersebut yaitu *pertama*, pendidik bisa melakukan tuntutan dan pengawasan langsung. *Kedua*, adanya keakraban hubungan antara santri dan kiai sehingga yang terakhir bisa memberikan pengetahuan yang hidup. *Ketiga*, pesantren ternyata mampu mencetak orang-orang yang

bisa memasuki semua lapangan pekerjaan yang bersifat merdeka. *Keempat*, cara hidup para kiai yang sederhana tetapi penuh kesenangan dan kegembiraan, dalam memberikan penerangan bagi bangsa kita yang miskin. *Kelima*, pesantren merupakan sistem pendidikan yang murah biaya penyelenggaraannya untuk menyebarkan kecerdasan bangsa (Rahardjo, 1985: ix-x).

Selain itu, meskipun pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas vertikal (dengan mengajarkan materi-materi keagamaan, seperti al-Qur'an Hadist dan kitab-kitab kuning. Tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum

yang menyentuh persoalan kekinian masyarakat (*society-based curriculum*).

Watak tradisionalitas pesantren yang terus dirawat dan dijaga, di tengah perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi menjadi jawaban kegelisahan beberapa orang yang justru mengapresiasi teori dan ilmu pendidikan bangsa asing dan meragukan eksistensi pesantren. Padahal sistem pendidikan pesantren sungguh mencirikan nilai-nilai lokalitas dan relevan dengan kenyataan budaya dan nilai-nilai yang sedang berkembang di tengah masyarakat atau lebih tepatnya bisa dikatakan pesantren sesuai dengan alam pikiran pribumi. Bukankan pesantren sekarang ini tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya?

B. Mengenal Dunia Pesantren

1. Pengertian Pesantren

Pesantren secara etimologis, sebagaimana penjelasan Zamakhsari Dhoefier asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Kata dasar dari pesantren dengan begitu berasal dari kata santri, yang berarti "terpelajar" (*learned*) atau "ulama" (*scholar*). Manfred Ziemek berpendapat bahwa kata pondok berasal dari *funduq* (arab) yang berarti ruang tidur atau ruang wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Baik itu santri yang berasal dari tanah air sendiri maupun dari mancanegara.

Terkadang pesantren dianggap sebagai gabungan kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti "tempat manusia baik-baik". Sementara Geertz berpendapat bahwa pengertian pesantren

diturunkan dari Bahasa India shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Geertz menganggap bahwa pesantren dimodifikasi dari pura Hindu (Wahjoetomo, 1997: 70). Senada dengan Geertz, Karel A. Steenbrink (1994: 3), sistem pendidikan pesantren ini mirip dengan tradisi Hindu (India), mengingat pendidikannya bersifat agama, kiai tidak digaji, tapi memperoleh penghormatan yang besar, dan letak pesantren yang jauh dari kota.

Jika santri menunjuk kepada murid, maka pesantren menunjuk kepada lembaga pendidikan. Jadi pesantren adalah tempat belajar bagi para santri (Subhan, 2012: 75). Santri atau murid mempelajari ilmu agama kepada Kiai atau Syekh di pondok pesantren (Sumardi, 1977: 38). Beberapa hasil penelitian juga menyatakan, bahwa pesantren sering didefinisikan sebagai suatu tempat

pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Qomar, 2002: 2). Meski, pesantren sering dihubungkan dengan sistem pendidikan Hindu dengan sebutan "padepokan", tetapi pesantren memiliki perbedaan dengannya. Sebab di padepokan pada zaman Hindu yang belajar dan mengajar di dalamnya hanya kasta-kasta khusus, yakni Brahmana dan Ksatria. Sedangkan di pesantren hampir semua orang dapat belajar tanpa ada batasan (Ditjen Bimbaga Islam, 1985: 1).

Oleh karena itu, pesantren kalau dirunut asal usulnya sebetulnya lebih condong dengan corak pendidikan sufi di Timur Tengah (Zulkifli, 2012: 1). Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan sistem pendidikan Islam ini. Pendidikan pesantren berasal dari istilah *Kuttab* yang merupakan lembaga pendidikan

Islam yang berkembang pada masa Banu Umayyah. Di Indonesia, kemudian istilah *kuttab* lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren (Umiarso dan Zazin, 2011: 14). Masyarakat umum sering menyebut dengan istilah pondok yang berasal dari bahasa Arab *funduq*. Sementara masyarakat Jawa dan Sunda sering menyebutnya dengan istilah pesantren atau pondok. Di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau. Menurut Clifford Geertz secara bahasa pesantren adalah *a place for peripatetic Islamic student, or santri* (Ma'arif, 2014: 11). Pesantren berarti tempat para santri, sebagai asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji untuk mengembangkan berbagai disiplin keilmuan, baik ilmu agama dan umum.

Sedangkan secara definitif Imam Zarkasyi mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem

asrama atau pondok dimana Kiai sebagai figur sentralnya. Masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan Kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya (Umiarso dan Zazin, 2011: 14). Para santri biasanya tinggal di dalam pondok (asrama) dalam pesantren tersebut" (Prasodjo, 1975: 6).

Lembaga pesantren biasanya memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam (Azra, 2012: 26). Selain itu pendekatan pembelajaran yang digunakan dengan cara non klasikal dimana seorang Kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santrinya berdasar kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab abad pertengahan. Para santri biasanya tinggal didalam pondok (asrama) dalam pesantren tersebut" ((Prasodjo, 1975: 6).

Pada era sekarang pesantren dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga pendidikan tempat orang berkumpul di dalamnya untuk mempelajari agama Islam dengan mendalami dan menguasai kitab-kitab klasik di bawah pengasuhan seorang kiai sekaligus dapat dijadikan sebagai tempat menyemaikan bakat-bakat terpendam para santri dengan latarbelakang yang berbeda (baik sosial, ekonomi dan kultur) serta perbedaan-perbedaan orientasinya, disertai dorongan kuat untuk menjadi pribadi-pribadi yang shalih sekaligus ilmuwan dan intelektual sesuai disiplin ilmu yang digelutinya, baik yang bersifat ilmu agama maupun ilmu umum.

2. Landasan Sistem Pendidikan Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan yang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tentulah pendidikan dalam pesantren memiliki landasan yang

dijadikan pijakan utama untuk keberlangsungan segala hal yang menyangkut pendidikan di dalamnya.

Bahkan setelah Indonesia merdeka, pesantren mendapat pengakuan dari BP-KNIP ketika mengusulkan rencana tentang "Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran" pada tanggal 25 Desember 1945, yang isinya diantaranya adalah mengakui pesantren sebagai salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia umumnya. BP-KNIP juga mengusulkan agar pesantren mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah (Dep. P & K, 1979: 94).

Lebih dari itu terdapat dasar ideal pendidikan pesantren, yaitu falsafah negara Pancasila, yakni sila pertama yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh

bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. Dasar konstitusional pendidikan pesantren adalah pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 disebutkan bahwa "Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat". Selanjutnya, pada Pasal 2 dinyatakan "Satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis". Sedangkan dasar teologis pesantren adalah ajaran Islam, yakni bahwa melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah dari Tuhan dan

merupakan ibadah kepada-Nya (Muthohar, 2007: 14).

Bahkan dengan diundangkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, sebagaimana pernyataan Azyumardi Azra (2002: 95), maka lembaga pendidikan pesantren terutama pesantren yang menyelenggarakan pendidikan madrasah di dalamnya. Maka pendidikan madrasah ini sudah tidak bisa dibedakan dengan pendidikan umum/sekolah semacam SD, SMP, dan SMA. Karena madrasah di pesantren juga sama-sama membuka jurusan umum seperti IPA, IPS, Bahasa dan Keterampilan. Karena madrasah di pesantren juga wajib mengikuti standar kurikulum nasional sebagaimana ketentuan UU.

3. Sejarah Pesantren

Secara historis pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikembangkan secara *indigenous* oleh

masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman saja, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Pesantren juga dianggap sebagai satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia yang menganut sistem tradisional dan terdapat di pedesaan (Majid, 1997: 103).

Berdasarkan aspek sosio-historis, pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang relatif tua berdiri dengan tujuan untuk menyampaikan dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan misi awalnya yaitu *tafaqqohu fidin*. Kemudian karena pondok pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang plural, maka pondok

pesantren mendapat porsi dalam bidang sosial yaitu pada dimensi dakwah Islamiyah.

Melacak akar sejarahnya, pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada 1399 M yang berfokus pada penyebaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya tokoh yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pesantren pertama didirikan di Kembanguning, yang waktu itu hanya dihuni oleh tiga orang santri, yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan kyai Bangkuning. Pesantren tersebut kemudian dipindahkan ke kawasan Ampel diseputar Delta Surabaya, karena ini pulalah Raden Rahmat akhirnya dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Selanjutnya putra dan santri dari Sunan Ampel mulai mendirikan beberapa pesantren baru, seperti pesantren Giri oleh Sunan Giri, pesantren demak oleh Raden Patah, dan pesantren tuban oleh Sunan Bonang (Soebahar, 2013: 34).

Pada zaman kesultanan, sistem pendidikan pesantren umumnya dilakukan dilingkungan keraton. Pembiayaan pengelolaan ditanggung oleh Sultan. Demikian pula penempatan para tenaga pengajarnya, ditunjuk atas persetujuan penguasa politik. Selain lembaga pendidikan Islam model pesantren terdapat model lain, pada masa ini, yaitu sistem surau dan langgar yang biasanya dikelola oleh tokoh agama secara individu atas dukungan masyarakat sekitar. Baik sistem pendidikan pesantren maupun surau dan langgar sama-sama diorientasikan pada misi dakwah (Jalaluddin, dalam Sirazi, 2005: vi).

Sementara pada masa kolonial terutama Belanda, sistem pendidikan model pesantren dilibatkan dalam kancah politik dan dituduh sebagai "sarang pemberontak". Oleh sebab itu, perkembangan pesantren mengalami berbagai kendala. Bahkan setelah pemerintah Belanda membuat kebijakan

diskriminatif terhadap pesantren, yaitu setelah dikeluarkannya Undang Sekolah Liar (*Wilden Scholen Ordonantie*), pada tahun 1925 dan 1950. Institusi yang memenuhi undang-undang ini, pasti memperoleh subsidi dan dianggap legal. Sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dinilai sekolah liar dan harus dibubarkan (Jalaluddin, dalam Sirazi, 2005: vi-vii). Maka, pada saat dikeluarkan undang-undang ini, pesantren sungguh menghadapi ancaman yang sangat serius.

Menghadapi ancaman serius seperti itu, misi pesantren yang pada awalnya hanya sebagai tempat menimba ilmu agama mulai berkembang untuk perlawanan dan bela negara. Hal tersebut menimbulkan reaksi terhadap Belanda. Bahkan, pada saat itu, Belanda membuat alibi dengan mengadakan perjanjian yang merugikan dunia pesantren di Indonesia. Namun pesantren pada saat itu masih tetap bertahan. Kemunduran pesantren

yang sebenarnya justru terjadi pada akhir-akhir ini pasca kemerdekaan. Pesantren mengalami kemunduran karena musuh pesantren saat ini bukanlah penjajah, namun pesatnya perkembangan zaman dan globalisasi. Pesantren dianggap tempo menimba ilmu yang jadul dengan santri yang kolot dan ketinggalan jaman.

Tetapi di zaman penjajahan pesantren, meskipun menghadapi banyak rintangan tetapi masih tetap bertahan, bahkan telah ikut andil dalam perjuangan melawan penjajah. Dengan landasan membela negara termasuk dari iman, dan rela mati syahid. Pahlawan dari kalangan pesantren pada saat melawan penjajah Belanda diantaranya: Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Agung, Sultan Babullah, Sultan Hasanuddin, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cut Meutiah. Dan pada saat melawan Jepang diantaranya: KH Muchasan, KH

Zaenal Musthofa, H Madras, H Kertiwa, dan KH Husein (Wahjoetomo, 1997).

Terlepas dari itu semua, yang perlu dicatat adalah pesantren dari awal kemunculannya mempunyai fungsi khas dan unik, yaitu sebagai media Islamisasi yang memadukan tiga unsur, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan Islam, dan ilmu serta amal untuk mewujudkan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Soebahar, 2013: 34). Selain itu pesantren pada mulanya hanya mengonsentrasikan diri pada tiga fungsi utamanya, yaitu : 1) mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran islam (*Transfer Of Islamic Knowledge*) kepada masyarakat luas, 2) mencetak para ulama (*Reproduction Of Ulama*). 3) menanamkan tradisi islam ke masyarakat (*transmission or islamic tradition*) (Azra, 1999: 78).

Jadi konsentrasi dan tujuan pendidikan pesantren, dengan meminjam

penjelasan Fazlur Rahman dalam bukunya *Major Themes of The Qur'an* (1984: 86), pada awalnya hanya diorientasikan kepada kehidupan akhirat semata. Bahkan bisa dilihat dalam rekaman sejarah, pada masa kolonialisme pesantren cenderung bersifat defensif, yaitu untuk menyelamatkan umma Islam dan pencemaran dan pengrusakan yang ditimbulkan oleh dampak gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan-gagasan yang mengancam standar-standar moralitas tradisional Islam.

Akan tetapi, selanjutnya seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, pesantren menghadapi sebuah kenyataan dan harus mampu menyesuaikan diri dengan transformasi zaman dan bentuk masyarakat yang berbeda dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, pesantren juga dituntut mengalami perkembangan peran dan fungsinya bukan sekedar *tafaqquh fiddin* saja, melainkan juga

harus menjadi lembaga yang mempunyai sifat kemandirian serta bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar dan merupakan sendi-sendi penyelesaian berbagai kesenjangan sosial (Umiarso dan Zazin, 2011: 9-11).

Secara substantif, pesantren merupakan institusi keagamaan yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Lembaga ini tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat dengan memposisikan dirinya sebagai bagian masyarakat dalam pengertiannya yang transformatif. Dalam konteks ini, pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan pendidikan yang sarat dengan transformasi sosial. Pesantren berikhtiar meletakkan visi dan kiprahnya dalam kerangka pengabdian sosial yang pada mulanya ditekankan kepada pembentukan moral keagamaan dan kemudian dikembangkan kepada rintisan-rintisan

pengembangan yang lebih sistematis dan terpadu (A'la, 2006: 2).

Realitas transformasi peran dan fungsi pesantren tersebut bisa juga dilihat dari perkembangannya yang tidak hanya menjadi lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan pendidikan agama saja, akan tetapi juga memasukkan pendidikan umum yang terintegrasi dalam sistem pendidikan yang bersifat klasik. Hal ini dengan tujuan untuk menyiapkan para santri agar kelak saat telah terjun dalam dunia masyarakat bisa menjadi sarana untuk menjembatani masyarakat yang bersifat tradisional dan modern. Dan seperti yang telah penulis sebutkan di atas, santri yang nantinya telah keluar dari pesantren dan masuk ke dalam kehidupan sosial dapat menjawab masalah-masalah yang merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman (Daulay, 2009: 73).

Dalam konteks pesantren, usaha untuk menjawab tuntutan perubahan yang

terjadi di luar pesantren terkenal dengan usaha modernisasi. Istilah ini sebenarnya muncul dari dinamisasi yang ada dalam sistem pesantren itu sendiri. Dinamisasi pada asanya mencakup dua buah proses, yaitu penggalakan kembali nilai-nilai hidup yang telah ada, selain mencakup pula pergantian nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sempurna. Proses pergantian inilah yang disebut modernisasi. Sehingga dinamisasi pesantren merupakan suatu proses yang rumit dan memakan waktu lama karena tidak ada suatu konsep pun yang dapat disusun tanpa mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya kemudian. Disini dapat dipahami bahwa perubahan yang dialami dalam sistem pendidikan pesantren bukan berarti mengganti sistem tetapi masih tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan dikembangkan pesantren disamping melakukan perbaikan-perbaikan

ke arah yang lebih baik (Umiarso dan Zazin, 2011: 99).

Semua itu dilakukan oleh pesantren dengan satu pertimbangan bahwa perubahan dan pembaharuan pesantren terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan pikirkan merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi. Perubahan itu sendiri akibat dari kesadaran internal pesantren dalam melihat perubahan yang sedang terjadi. Di samping adanya tekanan-tekanan dan masalah yang terjadi harus bisa menjadikan pesantren dan semua orang yang ada di dalamnya apakah itu kiai, ustad dan santri untuk memahami kenyataan bahwa perlu adanya perubahan dalam pendidikan pesantren. Yang jelas, setiap bentuk perubahan yang menuntut adanya inovasi pesantren ini selalu memberikan dampak terhadap santri/masyarakat luas. Oleh karena itu, perubahan yang ingin diciptakan seharusnya mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang mempelopori

perubahan dalam pendidikan dengan memberikan bukti-bukti bahwa dengan perubahan akan menimbulkan inovasi yang menjadikan pendidikan lebih baik kedepannya.

Dengan begitu modernisasi pesantren sebenarnya tidak lepas dengan modernisasi sistem pendidikan Islam, karena pesantren termasuk juga ke dalam salah satu lembaga pendidikan Islam. Dalam modernisasi sistem pendidikan Islam, terdapat sebuah landasan historis yang melatar belakangnya, yaitu metode berpikir filosofis. Metode ini memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berfikir bebas sehingga dapat menciptakan wacana intelektual yang dinamis. Dengan metode filsafat yang liberal ini, orang-orang Islam menjadi progresif dan akhirnya menguasai ilmu pengetahuan umum, seperti metafisika, matematika, astronomi, bahkan musik, sastra, puisi, dan lain sebagainya (Yasmadi, 2002: 143).

Setelah banyak lahir para pemikir muslim seperti ini, banyak yang menawarkan sejumlah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pesantren secara khusus dan pendidikan Islam secara umum. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat pesantren dalam melakukan perubahan-perubahan, apakah dalam sistem pengajarannya? Dalam hal ini, sistem pengajaran yang masih menggunakan sistem klasikal perlu diselaraskan sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas guru juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru menjadi orang yang berperan penting di dalam pesantren. Dengan guru yang berkualitas dan profesional, maka akan menciptakan murid berkualitas pula.

Selain itu untuk membentuk lembaga pendidikan Islam yang baik dan bermutu, perlu juga ada perubahan/peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pembelajaran, termasuk perubahan kurikulumnya. Relevan dengan ini, benarlah seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra yang menyebutkan empat bentuk respon pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam yaitu *pertama*, pembaharuan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational*. *Kedua*, pembaruan metodologi seperti sistem klasikal dan penjenjangan. *Ketiga*, pembaruan kelembagaan, seperti perubahan kepemimpinan pesantren dan diferivikasi lembaga kependidikan. *Keempat*, perubahan fungsi dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial ekonomi (Azra, 2002: 105). Di antara bentuk perubahan perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan di pesantren adalah penyelenggaraan pendidikan umum, madrasah reguler, madrasah Diniyah di samping pesantren *Salafiyah* secara

bersamaan, dan pelaksanaan pesantren kilat secara temporer.

4. Tipologi Pesantren

Terdapat berbagai hasil penelitian yang mengklasifikasi tipologi pesantren, diantaranya adalah Rahardja (1982-208) yang menjelaskan bahwa sejak awal pertumbuhannya pesantren memiliki bentuk yang beragam sehingga tidak ada standarisasi khusus yang berlaku bagi pesantren. Namun dalam perkembangannya, tampak adanya pola umum sehingga pesantren dapat dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu modern dan salaf (Sulaiman, 2010: 4).

Pesantren modern dalam bahasa Arab disebut dengan *khalafiyah*, biasanya memiliki ciri utamanya adalah: 1) Gaya kepemimpinan pesantren cenderung korporatif; 2) Program pendidikannya berorientasi pada pendidikan keagamaan dan pendidikan umum; 3) Materi pendidikan

agama bersumber dari kitab-kitab klasik dan nonklasik; 4) Pelaksanaan pendidikan lebih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran modern dan inovatif; 5) Hubungan antara kiai dan santri cenderung bersifat personal dan koligial; 6) Kehidupan santri bersifat individualistic dan kompetitif. Sebagai contoh yang masuk katagori modern ini adalah pondok modern Darusslam Gontor. Sejak sejak awal berdirinya Gontor telah menegaskan bahwa dirinya adalah pondok modern yang menggunakan system klasikal, selain materi-materi pelajaran yang bersifat vokasional, seperti kesenian, keterampilan, olah raga beladiri, dan pramuka. Karena mayoritas di Jawa Timur menggunakan metode klasik sehingga pesantren gontor dikenal dengan pesantren modern (Burhanuddin, 2006:72). Dan tidak kalah pentingnya dari kelebihan pondok ini adalah dalam kehidupan sehari-hari para santri dibiasan harus menggunakan dua bahasa

untuk berkomunikasi antar sesama (bahsa Arab dan Inggris).

Sedangkan pesantren tradisional dalam bahasa arab disebut dengan *salafiyyah* yaitu pesantren yang masih terikat kuat oleh tradisi-tradisi lama. Beberapa karakteristik dari pesantren ini adalah:

- a. Sistem pengelolaan pendidikan cenderung berada ditangan kiai sebagai pemimpin sentral, sekaligus pemilik pesantren
- b. Hanya mengajarkan pengetahuan agama (islam)
- c. Materi pendidikan bersumber dari kitab-kitab berbahasa Arab klasik atau sering dikenal dengan *kitab kuning/kitab gundul* (kitab berwarna kuning dan tidak berharakat)
- d. Menggunakan sitem tradisional yaitu metode sorogan dan weton atau bandongan.
- e. Hubungan antara kiai, santri dan ustadz bersifat hirarkis

- f. Kehidupan santri cenderung bersifat komunal dan egaliter.

Istilah "salaf" atau "salafiyah" di gunakan oleh kalangan pesantren untuk menyebut "pesantren salafiyah" mengacu pada pengertian pengertian "pesantren salafiyah" yang memandang dunia dan praktek islam sebagai warisan sejarah, khususnya dalam bidang syariah dan tasawuf. Dalam pengertian yang lebih umum, kaum salafi adalah mereka yang memegang paham "islam yang murni" pada masa awal sebelum dipengaruhi bid'ah dan khurafat. Karena itu kaum salafi di Indonesia sering menjadikan pesantren dan dunia islam tradisional lainnya sebagai sasaran kritik keras mereka, setidaknya karena keterkaitan lingkungan pesantren atau kiai dengan tasawuf atau terekat (ajaran) (Azra dalam Madjid, 1997: xxiv).

Saat ini pesantren dari sisi kelembagaan telah mengalami perkembangan dari yang sederhana sampai yang paling maju. Sebagai mana yang dikemukakan Soedjoko prasojo menyebutkan ada lima macam pola pesantren, yaitu :

- a. Pola pesantren yang terdiri hanya dari masjid dan rumah kiai.
- b. Pola pesantren terdiri atas masjid, rumah kyai dan pondok
- c. Pola pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok dan madrasah.
- d. Pola pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok, madrasah dan rumah ketrampilan.
- e. Pola pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, gedung pertemuan dan sekolah umum.

Sementara menurut tingkat keberagaman pranata sesuai dengan

spektrum komponen suatu pesantren dapat diklasifikasikan menjadi 5 antara lain:

- a) Pondok pesantren salaf/klasik

Yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan *salaf (weton dan sorogan)*, dan sistem klasikal (madrasah) *salaf*.

- b) Pondok pesantren semi berkembang

Yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf (weton dan sorogan) dan dan sistem klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90 persen agama dan 10 persen umum.

- c) Pondok pesantren berkembang

Yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulumnya, yakni 70 persen agama dan 30 persen umum. Di samping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan *diniyyah*.

- d) Pondok pesantren *khalaf/modern*

Yaitu pondok pesantren seperti bentuk pondok pesantren berkembnag, hanya saja sudah leih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab *salaf*), perguruan tinggi (umum maupun agama), bentuk koperasi dan dilengkapi dengan *takhasus* (bahasa Arab dan Inggris).

e) Pondok pesantren ideal

Yaitu sebagai bentuk pondok pesantren moder hanya saja lembaga pendidikan yang ada lebih lengkap, terutama bidang keterampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/perkembangan zaman. Dengan adanya bentuk tersebut diharapkan

alumni pondok pesantren benar-benar *khalifah fil ardhi* (Nasir, 2010: 87-88).

Menurut penjelasan Mukti Ali (2000: 19), pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh karena itu yang menjadi sasaran utama yang diperbaharui adalah mental, yakni mental manusia yang dibangun yakni diganti dengan mental yang membangun.

Berbagai pola dan jenis pesantren di atas sampai saat ini masih bisa dijumpai di berbagai pelosok tanah air dengan berbagai dinamika perkembangannya serta masing-masing pesantren memperoleh tantangan baru ketika harus bersentuhan dengan isu-isu kontemporer. Namun harus diakui, semua jenis pesantren sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keunikan dan karakteristik pesantren

sebenarnya tergantung orientasi dari masing-masing pesantren itu sendiri dan bagaimana para kiai bisa membangun dan mengembangkan pesantren.

Adalah tidak adil membandingkan sebuah pesantren satu dengan lainnya. Karena setiap pesantren di samping visi dan misi yang berbeda, tentu saja mempunyai keanekaragaman "modal", infrastruktur dan sosio-kultural yang berbeda dan semua aspek inilah sebenarnya yang bisa menentukan cetak biru serta mewarnai perjalanan pada pesantren dengan berbagai model dan sistemnya tersebut.

5. Eksistensi Pesantren

Keberadaan pesantren di nusantara mengalami pasang surut, dari sekedai pengakuan masyarakat sebatas sebuah lembaga pendidikan tradisional yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, dari awal

sejarah berdirinya. Selain sebagai entitas tersendiri yang memiliki tradisi dan kultur akademik yang berbeda dengan karakteristik pendidikan pada umumnya. Di antara ciri substantifnya adalah, bahwa pendidikan Islam dibangun atas dasar kesadaran dan keyakinan umat Islam untuk menjadi pribadi muslim yang taat (*'abdullah wa khalifah fi al-ard*).

Hingga keberadaan pesantren yang telah terbukti melahirkan banyak ilmuwan dan agawaman bahkan para pahlawan yang dengan gagah berani merebut kemerdekaan Republik Indonesia, dari tangan penjajah. Meskipun kontribusi besar pesantren bagi negara ini, belum memperoleh apresiasi yang menggembirakan pada masa orde baru. Sebab, pada masa itu pesantren selalu dianggap sebagai lembaga "terbelakang" dan selalu memperoleh perlakuan diskriminatis, bila dibanding dengan lembaga pendidikan umum.

Akan tetapi harus diakui, keberadaan pesantren di era reformasi sedikit menemukan angin segar dan dipandang sejajar dengan lembaga pendidikan umum di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam UU Sisdiknas, eksistensi pesantren menemukan babak baru dalam sistem pendidikan keagamaan Islam dengan pengertian pesantren sebagai pendidikan berbasis *tafaqquh fiddin*, sebagai pusat pendidikan umat Islam, dan penempatan pesantren sebagai pranata sosial dalam sistem pendidikan nasional. Pemahaman terhadap visi baru pesantren yang dikemas dalam UU Sisdiknas 2003 sangat penting bagi semua pihak, baik kalangan pesantren, maupun Kemenag sebagai modal dasar bagi pembangunan keagamaan di masa reformasi (Musa, 2003: 21).

Sesungguhnya pada perlintasan pesantren salafiyah telah menorehkan citranya, namun kemampuan dalam

mempertahankan eksistensinya dalam di tengah-tengah gelombang modernisasi dan globalisasi saat ini masih menimbulkan tanggapan yang beragam berkembang dan masih berlangsung hingga kini (Sulaiman, 2010: 12-15). Bahkan tak jarang mengundang perdebatan dan polemik di kalangan pakar ilmu-ilmu sosial.

Sebagian diantaranya bersikap pesimistis, dan sebagian yang bersikap optimistis. Yang bersikap pesimis berpendapat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tradisional yang eksklusif, sehingga peserta didik akan sulit berkembang di tengah proses modernisasi. Karena dengan alasan bahwa pola pendidikan yang berlangsung selama ini terlalu lambat untuk mencetak santri dengan lulusan yang diharapkan masyarakat (Ali, 2000: 17).

Sedangkan kalangan yang bersikap optimis berpandangan sebaliknya, bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan dan

pemberdayaan masyarakat sampai kapanpun akan tetap eksis, selagi pesantren mampu memadukan pengajaran agama dan pengetahuan umum. Sebab pesantren yang mampu melakukan integrasi antara ilmu agama dan sekuler dinilai memiliki kemampuan adaptasi sosial yang tinggi.

Selain itu, pesantren merupakan salah satu lembaga sosial independen alternatif untuk sebuah perubahan. Lantaran kepemimpinan seorang kiai memiliki independensi yang khas di bidang etos ekonomi dan moral. Sekaligus, sebagaimana pengakuan H. M. Arifin (1983: 240) pesantren bisa tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dan sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa Kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik secara independen.

Bukankah pendidikan pesantren selama ini dikenal sebagai pendidikan berbasis masyarakat? Maksudnya berdirinya

pesantren berasal dari aspirasi masyarakat, diselenggarakan sendiri oleh masyarakat dan untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagai pendidikan berbasis masyarakat pesantren menjadi sangat tergantung pada inisiatif dan kharisma para kyai yang mensponsorinya. Maka sangat wajar jika jenis dan model pesantren menjadi sangat beragam dan identik dengan visi dan misi pribadi kyai pengasuhnya. (Madjid, 1997: 6).

Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan mengembangkan masyarakat sekitarnya ini dikarenakan adanya potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren, potensi tersebut diantaranya adalah, (1) pesantren hidup selama 24 jam, dengan pola 24 jam tersebut baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan

terpadu. (2) pesantren yang mengakar pada masyarakat, pesantren yang tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan karena tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pesantren. Dengan demikian pesantren dan keterkaitannya dengan masyarakat merupakan hal yang amat penting bagi satu sama lain. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pesantren memang didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembina yang dilakukan oleh pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama (Fuad, 2010).

Dalam membangun karakter bangsa, pesantren merupakan penjaga moral yang sudah teruji. Lembaga ini telah mendidik kader-kader bangsa yang diramu secara militan untuk menjaga moralitas berdasarkan pemahaman keagamaan yang kuat. Di samping itu dunia pesantren juga memperkenalkan berbagai macam karakter manusia yang menjadi cermin dari

masyarakat. Santri datang dari berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya dididik secara bersama-sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pada titik ini sebenarnya pesantren telah mengajarkan persamaan hak dan kewajiban santri (baca: warga negara) sekaligus mengajarkan berbagai sikap kemasyarakatan yang majemuk seperti toleransi, tolong menolong, dan menghargai sesama anak bangsa. Tidak heran jika pesantren dapat melahirkan tokoh-tokoh penting yang di kemudian hari mampu berperan besar dalam membangun bangsa.

Kajian keagamaan pesantren ini juga mengalami pembaruan yang sangat pesat. Jika era 1990-an dan sebelumnya pesantren hanya mengkaji teks-teks klasik yang bersifat normatif dan fiqih centris, saat ini pesantren telah melakukan kontekstualisasi ajaran agama yang lebih bersifat sosiologis, tanpa meninggalkan teks-teks klasik. Ajaran agama

tidak hanya dipahami sebagai paham kebenaran ortodoksi tetapi digeser menjadi pemaknaan sosial. Tidak heran jika banyak pesantren yang sudah mulai mengajarkan pendidikan umum seperti penguasaan bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, teknologi dan seterusnya tanpa meninggalkan khasanah keagamaan klasik. Jika hal ini dipertahankan dan terus dikembangkan, maka pesantren telah memberikan sumbangan yang besar bagi demokratisasi bangsa dalam membangun karakter bangsa (Hefner, 2001: 33).

Selain itu, dengan pengaruhnya yang kuat di lingkungan masyarakat dan pemerintah, pesantren dapat memanfaatkan kontekstualisasi ajaran-ajarannya sekaligus melakukan kontrol bagi penyelenggaraan pemerintahan yang dipandang menyeleweng. Sehingga banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari dunia pesantren. Mengingat pengelola pesantren adalah masyarakat, maka

pesantren sudah sepatutnya mengetahui secara detail masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sehingga pesantren dapat berperan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pada titik inilah diharapkan ada titik temu yang positif, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*empowering people*). Sehingga sumbangan pesantren dalam pembangunan demokratisasi bangsa dapat dilakukan secara riil tanpa harus terlibat dalam politik praktis.

6. Karakteristik dan Unsur-unsur dalam pesantren

Setiap pesantren di Indonesia selalu berproses dan bertumbuh kembang dengan cara yang berbeda-beda diberbagai tempat, baik dalam bentuk maupun kegiatan kurikulumnya. Namun, diantara perbedaan-perbedaan tersebut masih bisa diidentifikasi

adanya pola yang sama dan membentuk karakteristik khusus dari pesantren.

Sistem pendidikan pesantren didasari, digerakkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar Islam. Ajaran Islam ini, menyatu dengan struktur kontekstual atau realitas sosial yang digumuli dalam hidup keseharian. Hal inilah yang mendasari konsep pembangunan dan peran kelembagaan pesantren. Pesantren memenuhi kriteria yang disebut dalam konsep pembangunan, yaitu pembangunan kemandirian, mentalitas, kelestarian, kelembagaan, dan etika. Pesantren seperti sebuah ruang bebas pendidikan yang mempunyai karakter nilai, yaitu nilai keagamaan, sedangkan batasan norma yang dimiliki yaitu norma masyarakat, seperti berciri mandiri, yaitu tanpa uluran tangan lembaga luar (Malik (Ed), 2005: 25).

Karakteristik khusus pondok pesantren adalah tempat atau wadah yang sengaja

dibuat untuk dijadikan tempat belajar (*learning society*), internalisasi moralitas, dan sekaligus mempraktik ilmu dan nilai-nilai yang baik bagi masyarakat. Disinilah peran besarnya, dimana inti dari pembelajaran pesantren adalah dari yang semula tidak bisa menjadi bisa, dan orang yang berilmu akan mencapai tingkat tertinggi manakala ia memiliki akhlaq yang baik. Ada pepatah mengatakan, jadilah padi semakin berisi semakin merunduk. Pepatah seperti ini yang senantiasa diajarkan pesantren kepada masyarakat luas, dengan harapan mempunyai karakter baik yaitu untuk tidak berperilaku sombong. Dan menuntut mereka untuk selalu mengisi diri dengan ilmu pengetahuan. Dan perintah ini juga ada dalam kitab *ta'limul muta'alim* yang diajarkan di berbagai pondok pesantren.

Sistem pendidikan pesantren ketika dinilai melalui parameter modernisasi selalu dipandang negatif karena terlalu

mempertahankan tradisi dan kurang tanggap terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Tetapi belakangan ini secara jujur ada aspek tertentu yang diakui sebagai kelebihan pesantren. Pesantren dengan manajemen kulturalnya mampu memikat beberapa kalangan untuk mengadopsi sistem tersebut. Sistem pendidikan Pesantren adalah sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang dan lahir dari kultur Indonesia yang bersifat *indigenous*.

Adapun ciri-ciri khusus pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi arab, hukum Islam, tafsir Hadis, tafsir Al-Qur'an dan lain-lain (Mujib, 2006: 235). Biasanya kurikulum pesantren kebanyakan hanya tertuju pada persoalan agama dan akhlak berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan peninggalan orang-orang terdahulu yang salih. Sebuah bentuk kurikulum yang oleh Omar Mohammad Al

Toumy Al-Syaibany (1999:492) dianggap sebagai bentuk penyempitan kurikulum di dalam pendidikan Islam. Meskipun belakangan ini, banyak juga beberapa pesantren yang memberikan ilmu akal, falsafah, sains, dan teknologi. Sebagai bentuk dinamisasi pesantren terhadap perkembangan jaman dan menuju kebangkitan ilmiah serta mengembalikan zaman kejayaan Islam yang dicirikan dengan kegemilangan di bidang pemikiran dan tamaddun yang agung.

Sementara persamaan dan karakteristik lembaga pendidikan pesantren sebenarnya dapat dibedakan dalam dua segi, yaitu segi fisik dan segi nonfisik/kultural. Dari segi fisik pesantren merupakan sebuah kompleks pendidikan yang terdiri dari susunan bangunan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan (Djamas, 2009: 22).

Secara kultural, pesantren mencakup pengertian yang lebih luas mulai dari sistem

nilai khas yang secara intrinsik melekat di dalam pola kehidupan komunitas santri, seperti kepatuhan kepada kyai sebagai tokoh sentral, sikap *ikhlas* dan *tawadhu'*, serta tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-menurun. Tradisi kultural yang diwariskan di lingkungan pesantren ini telah memberikan warna tersendiri terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, dan bahkan mempengaruhi tataran suprastruktur kehidupan sosial-politik nasional (Djama, 2006: 29).

Haedari dan Abdullah Hamid (2004: 14-15) mempertegas sistem pendidikan yang terdapat di pesantren sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri
- b. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap sang kiai
- c. Pola hidup sederhana
- d. Kemandirian atau independensi

- e. Berkembangnya iklim dan tradisi tolong menolong dan suasana persaudaraan
- f. Disiplin yang ketat
- g. Berani menderita untuk mencapai tujuan
- h. Kehidupan dengan tingkat religius tinggi (Haedari, 2004: 14-15).

Relevan dengan hal tersebut, Abdul Mujib (2010: 235) menjelaskan karaktersitik pesantren sebagai berikut:

- a. Memakai sistem tradisional, yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara kiai dan santri.
- b. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi, karena mereka praktis bekerjasama menagatasi problem non kurikuler mereka sendiri.
- c. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut, hal itu karena

tujuan utama mereka hanya ingin menewahi keridhaan Allah SWT semata

- d. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealism, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup.
- e. Alumni pondok pesantren tak ingin menduduki jabatan pemerintahan sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah.

Sementara Zamakhsyari Dhuha mengemukakan tiga ciri yang pada umumnya dimiliki pesantren. *Pertama*, pesantren menanamkan nilai-nilai keagamaan yang sama, yaitu ketakwaan sebagai nilai utama. *Kedua*, kiyai adalah orang yang umumnya tergolong mampu secara ekonomi di lingkungan komunitasnya, sehingga tak heran jika ia dapat membiayai kebutuhan hidupnya sendiri dan kebutuhan pesantren tanpa harus tergantung dengan pihak lain.

Ketiga, kharisma yang dimiliki kiyai memungkinkan memperoleh akses informasi yang luas, termasuk akses pada sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan dalam pengelolaan pesantren (Sulaiman, 2010: 6).

Selain memperhatikan karakteristik pesantren baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik tersebut, perlu juga melihat elemen-elemen pesantren yang semuanya ini sangat diperlukan pesantren untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di pesantren. Semua unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya membentuk suatu sistem yang disebut sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu Pesantren. Dengan begitu, sistem pondok pesantren merupakan seperangkat alat yang secara teratur saling berkaitan antara elemen pesantren (kiyai, asrama, masjid, santri, dan pengajian kitab) dalam melaksanakan pendidikan yang saling bekerjasama (*kooperatif*) membangun

common working yang baik demi kemajuan lembaga (Umiarso dan Zazin, 2011: 40).

Kelima unsur pesantren tersebut akan dijelaskan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

a. Kiai

Sebutan kiai sangat populer dikalangan pesantren dan masyarakat di Indonesia. Meskipun istilah ini sebenarnya mempunyai arti yang beragam, kata kiai bisa berarti: 1) sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam), 2) sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya), 3) kepala distrik (di Kalimantan selatan), 4) sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya), 5) sebutan samaran untuk harimau (jika melewati hutan). Paling tidak sebagaimana penjelasan Zamakhsyari Dhofier (1985: 55), terdapat tiga makna kiai yaitu: 1) Sebagai sebuah kehormatan bagi barang atau hewan yang dianggap keramat

2) Gelar kehormatan bagi orang tua pada umumnya; dan 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang ahli agama atau menjadi pengasuh di sebuah pesantren.

Untuk pengertian kiai yang terakhir itulah yang merupakan salah satu elemen di pesantren. Sebuah sebutan yang mengindikasikan seseorang yang menguasai ajaran-ajaran Islam serta mampu memberikan pengaruh besar terhadap suatu masyarakat (Khozin, 2001: 88). Pengertian seperti ini, telah berlaku sejak dahulu kala hingga saat ini. Meskipun harus diakui pada era sekarang, telah terjadi perkembangan definisi kiai di masyarakat yang tidak terbatas bagi seseorang yang memimpin pesantren. Akan tetapi seseorang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran agama Islam dan amalan-amalan ibadah sehingga memiliki pengaruh besar di masyarakat meskipun tidak memiliki pesantren sering juga disebut kiai, seperti kiai Ali Yafie, kiai Abdul Muchith

Muzadi, kiai Yasin Yusuf, kiai Zainuddin MZ dan kiai-kiai lain.

Dalam realitasnya kiai di mata orang kebanyakan dianggap memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan menjadi salah satu elit strategis di masyarakat. Di dalam masyarakat, sebagaimana penelitian Miftah Farid seorang kiai merupakan salah satu elite yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat (Farid, 2001: 239). Kiai selalu dianggap sebagai sosok yang mempunyai pengetahuan luas dan *faqih* (mendalami) di bidang agama. Kepakaran seorang kiai di bidang ilmu-ilmu tertentu sungguh merupakan unsur yang paling esensial dan menentukan dalam kehidupan pesantren. Sebab besar kecilnya pesantren dan justifikasi masyarakat dalam memasukkan putra-putrinya di pesantren serta dalam menjadikan kiblat bagi kehidupan mereka adalah dengan melihat

siapa sosok kiainya dengan ekspektasi keilmuan yang dimilikinya.

Kehadiran kiai sebagai unsur utama pesantren tidak hanya mengandung makna ahli agama, tetapi juga memiliki muatan antropologis. Di masa penjajahan belanda waktu itu, bahwa posisi kiai memiliki aspek politis, karena pesantren dianggap sebagai pusat perjuangan kemerdekaan yang oleh belanda dianggap sebagai pusat pemberontakan. Para kiai tersebut secara antropologis adalah mereka yang ahli agama, tinggal di tempat para santrinya, jauh dari kepentingan dan pendekatan politik, menjadi teladan, kesederhanaan dan kesalehan hidup. Kiai adalah tempat bertanya bagi masyarakat bukan santri, untuk meminta nasihat sejak dari memberi nama anak yang baru lahir sampai pada pembagian waris serta berbagi problema sosial lainnya (Dhofier, 1982: 567).

Sebagai salah satu unsur dominan dalam kehidupan sebuah pesantren, kyai

mengatur irama perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, kharismatik serta keterampilannya (Yasmah, 2002: 63). Gelar kiai yang diberikan oleh masyarakat tidak tergantung pada pendidikan formal dan jabatan-jabatan akademik. Melainkan biasanya tergantung pada kedalaman pengetahuan yang dimilikinya memiliki kekuatan spritual, berasal dari keturunan kiai (baik spritual maupun biologis) dan mempunyai keagungan akhlak.

Kiai di dalam pesantren adalah sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren. Selain sebagai cendekiawan agama, kyai juga memiliki tiga fungsi, yaitu: *pertama*, sebagai agen budaya. Kyai menyaring budaya yang merambah ke sekitar masyarakat. *Kedua*, kiai sebagai mediator, yaitu sebagai penghubung antara berbagai segmen masyarakat dan masyarakat lainnya. *Ketiga*, sebagai makelar budaya dan

mediator, kyai menjadi penyaring budaya sekaligus penghubung kepentingan masyarakat (Qomar, 2007: 64).

Kiai bukan hanya sebagai pemimpin pondok pesantren tetapi juga pemilik pondok pesantren. Dengan demikian kemajuan dan kemunduran pondok pesantren benar-benar terletak pada kemampuan kiai dalam mengatur pelaksanaan pendidikan di dalam pesantren. Hal ini disebabkan karena besarnya pengaruh seorang kiai tidak hanya terbatas dalam pesantren melainkan juga terhadap lingkungan masyarakatnya (Ghazali, 2002: 21-22). Dengan begitu Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu tidak jarang terjadi, apabila sang kiai salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang

menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat (Lubis, 2007: 169-170).

Gelar kiai sebagaimana pernyataan Martin Van Bruinessen (1994: 21) tidak usahakan melalui jalur formal, melainkan datang dari masyarakat yang secara total memberinya tanpa intervensi pengaruh pihak luar oleh karena itu kiai menjadi patron bagi masyarakat sekitar terutama yang menyangkut kepribadian utama. Sebagai patron, kiai memainkan peranan yang lebih dari sekedar seorang guru.

Dalam dunia saat ini terdapat beberapa indikator pergeseran nilai yang dialami pesantren, sekarang banyak yang berpendapat bahwa kiai bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan beraneka ragamnya sumber belajar baru maka semakin tinggi dinamika komunikasi antar sistem pendidikan pesantren dengan sistem yang lain. Namun kondisi objektif ini tidak berarti menggeser kedudukan kiai sebagai tokoh

kunci yang menentukan corak pesantren. Saat ini santri banyak yang merasa membutuhkan ijazah dan penguasaan bidang keahlian dan keterampilan yang jelas agar dapat mengantarkan memasuki lapangan dunia baru (Wahid, 1999: 135).

b. Asrama (pondok)

Istilah pondok diambil dari bahasa Arab *al-Funduq* yang berarti: hotel, penginapan. Istilah pondok diartikan juga dengan asrama. Dengan demikian, pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal. Sebuah pesantren harus memiliki asrama yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal santri dan kyai. Di tempat tersebut selalu terjadi komunikasi antara santri dan kyai.

Menurut Dhofir (1985), sekurangnya terdapat tiga alasan mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri. *Pertama*, kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang

agama Islam telah menarik minat para santri dari jauh. Untuk dapat mengetahui ilmu tersebut secara mendalam dan keseluruhan dalam waktu yang lama, maka para santri harus meninggalkan daerahnya dan menetap di pesantren tersebut. *Kedua*, hampir semua pesantren berada di desa-desa, dimana tidak tersedia perumahan yang memadai untuk menampung para santri, sehingga keberadaan suatu asrama sangat dibutuhkan oleh para santri. *Ketiga*, adanya hubungan interpersonal yang khas yang terjalin antara kyai dan para santri. Dalam hal ini seorang santri menganggap kyai tak ubahnya sebagai orang tua mereka, dan seorang kyai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang senantiasa harus dilindungi dan dibimbing.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana peserta didiknya (santri) tinggal bersama untuk belajar di bawah

bimbingan guru atau yang sering disebut kyai. Santri mukim dan kyai yang memimpin suatu pesantren serta anggota lainnya, biasanya tinggal dalam suatu lingkungan tersendiri. Adanya pondok sebagai tempat tinggal santri dan kyai sangat bermanfaat dalam rangka bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini merupakan pembeda dengan lembaga lainnya (Yasmadi, 2002).

Pondok sebagai wadah pendidikan yakni mendidik dan mengajar. Mendidik secara keluarga berlangsung di pondok. Sedangkan mengajar ada di kelas dan mushola. Hal inilah yang merupakan fase pembinaan dan peningkatan kualitas manusia sehingga ia bisa tampil sebagai kader masa depan. Oleh karena itu pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan lingkungan hidup dalam arti kata pengembangan sumberdaya manusia dari segi mentalnya.

c. Masjid

Masjid di masa perkembangan Islam awal, bukanlah sarana peribadatan saja. Melainkan pranata terpenting masyarakat muslim yang dijadikan pusat segala aktivitas nabi Muhammad dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid juga berfungsi sebagai instansi pendidikan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid.

Di Masjidlah mereka mempelajari agama Islam bersama Rasulullah. Jika terjadi persoalan-persoalan di antara mereka maka Rasulullah menjadi tumpuan pertanyaan mereka. Adapun yang menjadi peserta lembaga pendidikan masjid, adalah orang-orang dewasa karena di berikan kepada orang-orang banyak. Yang tujuan utama adalah mengajarkan

al-Qur'an dan ajaran agama Islam bahkan belajar baca tulis (Gazalba, 1975: 117).

Fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pusat belajar mengajar ini, masih berlangsung pada zaman sekarang. Bahkan dalam perkembangannya masyarakat muslim menjadikan Masjid sebagai sentral bagi kegiatan mereka baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawi dalam ajaran Islam. Karena pengertian yang lebih luas dan maknawi, masjid memberikan indikasi sebagai kemampuan seseorang abdi dalam mengabdikan kepada Allah. Atas dasar pemikiran itu masjid tidak hanya dipahami sebatas pada pandangan materialistik, melainkan pandangan idealistik, immaterialistik termuat di dalamnya. Oleh karena itu semua kegiatan pendidikan yang dilakukan di dalam masjid tentu memiliki nilai ibadah yang tinggi (Gazalba, 1975: 117).

Sedangkan di pesantren masjid juga dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah dan

belajar mengajar. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dasar system pendidikan Islam tradisional (Dhofier, 1994: 57). Masjid merupakan tempat yang paling penting dan merupakan jantung dari eksistensi pesantren karena disinilah tempat para kiai mengajarkan banyak ilmu agama Islam kepada para santri. Selain digunakan untuk melakukan seluruh kegiatan dilingkungan pesantren, baik yang berkaitan ibadah, shalat jama'ah, dzikir, wirid, do'a, dan i'tikaf.

d. Santri

Santri adalah sebagai salah satu elemen dalam dunia pesantren. Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai pengejawantahan adanya peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kiai yang memimpin sekolah

pesantren. Oleh karena itu santri memiliki kaitan erat dengan adanya kiai dan pesantren.

Santri memiliki arti sempit dan luas. Pengertian sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama. Sedangkan pengertian yang lebih luas, santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam, shalat lima waktu dan shalat Jum'at (Greertz, 1983: 268).

Jumlah santri biasanya menjadi tolak ukur atas maju tidaknya suatu pesantren, semakin banyak santri maka semakin maju pula pesantrennya, ada dua macam santri yaitu santri mukim dan lajo (kalong) (*Ensiklopedi Islam*, 1993: 103). Zamkasyari Dhofier (1994: 58) menjelaskan, bahwa santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Sementara santri kalong adalah santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren.

e. Kitab Kuning

Kitab kuning sebagai kurikulum pesantren ditempatkan pada posisi istimewa. Karena keberadaannya menjadi unsur utama dan sekaligus ciri pembeda antara pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Dalam tradisi pesantren, kitab kuning merupakan ciri dan identitas yang tidak bias dilepaskan. Sebagai lembaga kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, pesantren menjadikan kitab kuning adalah identitas yang *inheren* dengan pesantren. Bahkan, sebagaimana ditegaskan Martin van Bruinessen (1995), kehadiran pesantren malah hendak mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab kuning itu.

Relevan dengan kenyataan itu, Han Maunah (2009: 38) menyatakan bahwa kitab kuning dan pesantren merupakan dua hal (aspek) yang tidak bisa dipisahkan, dan tidak

bias saling meniadakan. Eksistensi kitab kuning dalam pesantren menempati posisi yang urgen, sehingga dipandang sebagai salah satu unsur yang membentuk wujud pesantren itu sendiri, disamping kiai, santri, masjid, dan pondok.

Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah mengajarkan kitab-kitab klasik khususnya karangan-karangan madzab syafi'iyah. Pengajaran kitab kuning, yaitu kitab yang berisi ilmu-ilmu keislaman berbahasa Arab dan tanpa harakat atau sering disebut kitab *gundul* (Zahro, 2004). Agar bisa menerjemahkan dan memberikan pandangan tentang isi dan maknanya, kiai ataupun santri harus bisa menguasai tata bahasa Arab (*balaghah*) (Umaiarmo dan Zazin, 2011: 35-36).

Pengajaran kitab klasik karangan ulama' terutama madzhab Syafi'i, merupakan satu-satunya teks pengajaran formal yang diberikan di pesantren. Tujuan utama dari pengajaran ini adalah untuk mendidik calon-

calon ulama tentunya hal ini berlaku bagi para santri yang tinggal dipesantren dalam waktu yang relative panjang. Adapun bagi para santri yang tinggal dalam rentang waktu yang pendek biasanya mempunyai tujuan untuk membina pengalaman terutama dalam hal pendalaman jiwa keagamaan (Soebahar, 2013: 41-42). Dalam dunia pesantren ilmu ilmu keislaman yang dikaji bersifat klasik "kitab-kitab kuning" yang telah menjadi karakteristik ciri khas dari proses belajar mengajar di pesantren. Biasanya kitab-kitab yang diajarkan tentang fiqih, akhlak, nahwu, sharaf dan kajian-kajian islam.

Meskipun terlihat sederhana, kitab kuning sebagaimana ditunjukkan Zuhri Misrawi (2010: 70-71) memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah dapat digunakan sebagai alat komunikasi kultural dalam membangun solidaritas. Komitmen kitab kuning adalah untuk membangun umat, dan bisa disebut sebagai kitab kehidupan yang

berkaitan dengan ibadah maupun amal sosial. Isi kitab kuning selalu menganjurkan . . . berperilaku santun dan berakhlakul karimah. Tidak pernah ditemukan kitab kuning yang berisi menganjurkan konflik, sikap merendahkan, atau bahkan melakukan tindakan anarkisme.

7. Pesantren & Tradisi Intelektualisme

Pesantren selama ini, dalam bayangan kebanyakan masyarakat, selalu identik dengan pendidikan yang senantiasa mengajarkan persoalan yang berhubungan dengan agama, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan alam ghaib—tidak lebih dari itu. Selain juga berhubungan dengan tradisi nyeleneh para kiai, terutama kiai pengikut *thariqah* dengan perilaku sufismenya, seperti tradisi ziarah kubur, tradisi haulan, mencari karamah dan melakukan *tawasul* untuk memperoleh berkah. Hal-hal lain yang menyangkut

penalaran, rasionalisme dan tradisi berfikir filosofis nampak dikesampingkan, bahkan diharamkan.

Padahal kalau melacak sejarah awal berdirinya pesantren dan tradisi yang dikembangkannya selalu sarat dengan tradisi intelektualismenya. Bahkan, para kiai juga terkenal piawai bermain politik. Lahimsyah Nahdatul Ulama (NU) pada tahun 1926 yang selanjutnya pernah berubah menjadi salah satu partai politik yang ikut pemilu (pemilihan umum) pada tahun 1970-an menunjukkan kuatnya tradisi berpolitik di kalangan pesantren. Dalam hubungan ini, Snouck Hurgronje juga pernah menunjukkan keterlibatan Nawawi dalam gerakan bidang politik dan pada waktu itu dianggap sebagai sebuah bahaya oleh pemerintah Belanda. Sebab gerakan beliau yang terkenal dengan sebutan gerakan Cilegon atau gerakan perlawanan petani Banten, Jawa Barat, dan terjadi pada tahun 1888 terjadi pada tahun

1888 mengilhami mereka untuk memberontak pemerintah kolonial (Moesa, 207; 191).

Terkait dengan tradisi intelektualisme pesantren, bisa ditunjukkan dengan fakta sejarah banyaknya para kiai yang sangat terkenal di dunia internasional sebagai penulis produktif beberapa kitab bahkan, menurut Mahmud Yunus (1979: 53) pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram karena terkenal sebagai *'alim 'allamah* sebut aja Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Nawawi al-Banteni (1813-1897), Syekh Banjari, Mahfuz at-Tirmisi (w. 1338/1919). Fakta banyaknya kiai yang produktif dengan karya-karya mereka juga ditunjukkan oleh Abdurrahman Mas'ud, dalam bukunya berjudul "Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi" (2004). Bahkan, menurutnya lagi, terdapat sejumlah kiai yang bukan hanya produktif dalam persoalan tulis menulis, tetapi ahli dalam strategi dunia

pesantren. Bisa dikatakan mereka adalah *mastermind* yang berhasil melembagakan masyarakat santri dalam skala nasional dengan pengaruh dan rekayasa mereka dalam mendirikan organisasi NU yang didirikan di Jawa Timur tahun 1926, yaitu: Khalil Bangkalan, K.H.R. Asnawi Kudus, dan K.H. Hasyim Asy'ari (Mas'ud, 2014).

Meskipun harus diakui, pada perkembangan selanjutnya jumlah kiai yang mempunyai tradisi menulis ini tidak sebanding dengan jumlah para kiai yang menggunakan tradisi *oral* (bicara). Tetapi, yang membanggakan para kiai yang serius menekuni bidang tulis menulis ini telah menorehkan reputasi di tingkat internasional dan berhasil mengungguli kemampuan menulis yang dimiliki para ulama' di negara lainnya. Bahkan terdapat beberapa kitab-kitab yang di tulis oleh ulama' Indonesia ini digunakan di negara-negara dunia, khususnya

negara di timur tengah dan kawasan asia tenggara (Madjid, 197: 145).

Tumbuh kembangnya tradisi intelektualisme di pesantren tersebut bertautan erat dengan tradisi kuatnya membaca di pesantren. Dalam kaitan ini Martin Van Brunessen (1995) menginformasikan dengan kuatnya tradisi membaca kitab kuning ini, telah dikenal dan dipelajari pada abad ke-16. Bahkan para kiai pesantren telah berhasil mewarnai corak kehidupan keagamaan masyarakat khususnya dan kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Di samping juga menumbuhkan semangat *rihlah ilmiah* (perjalanan ilmu pengetahuan) di kalangan kiai pesantren. *Rihlah ilmiah* dilaksanakan oleh kiai pesantren dengan melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari satu negara ke negara lain, baik dekat maupun jauh, dan terkadang bermukim dalam waktu cukup lama, bahkan tidak kembali kedaerah

asal, dengan tujuan utama untuk mencari, menimba, memperdalam, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan mengajarkannya dan menuliskannya dalam berbagai kitab. Sejarah mencatat, tentang adanya ulama terkemuka asal Indonesia yang melakukan *rihlah ilmiah* dari Indonesia ke Mekkah, Mesir, dan beberapa negara di dunia dalam waktu yang cukup lama (Mas'ud, 2004: 95-99).

Karena menulis kitab kuning biasanya menggunakan bahasa Arab dan menjalankan rihlah ilmiah tersebut ke negara-negara yang menggunakan bahasa Arab maka secara otomatis telah timbul *ghirah* yang sangat kuat untuk mempelajari bahasa Arab lengkap dengan peralatnya seperti nahwu dan sharaf. Akhirnya para ulama yang bermukim di Makkah memiliki kemampuan tradisi bahasa Arab yang kuat sebagai akibat dari kehidupan mereka sehari-hari dalam lingkungan masyarakat Timur tengah yang

berbahasa Arab, serta kitab-kitab yang mereka pelajari menggunakan bahasa Arab.

Penggunaan bahasa arab tersebut juga terjadi para kiai yang menulis kitab di Indonesia, namun dalam menulisnya mereka menggunakan bahasa Arab Melayu. Hal ini didasarkan pada perasaan yang kuat dalam kaitannya dengan membangun moralitas dalam perasaan keagamaan (*religiousity*). Sebagai contoh ulama yang sering menulis menggunakan bahasa Arab Melayu ini adalah Kiai Shalih Darat, bahkan beliau sampai pernah menulis tafsir al-Qur'an berbahasa jawa pertama kali atas permintaan tokoh emansipasi wanita R. A. Kartini, yang terkenal itu.

Bab 5

PEDAGOGY PESANTREN

A. Pengertian dan Sejarah Pedagogy Pesantren

Pedagogi berasal dari kata "*paid*" yang berarti anak dan "*agogos*" yang berarti membimbing dan menuntun. Dalam bahasa Yunani disebut *paedagogie* atau *paedagogiek*. Perkataan yang dalam bahasa Belanda "opvoeding" (membesarkan atau mendewasakan) ini, menurut Ki Hadjar Dewantara tidak dapat diterjemahkan dengan bahasa kita misal *panggulawentah* (Jawa), melainkan lebih dekat artinya dengan *Momong*, *Among*, dan *Ngemong* (Dewantara, 2004: 13). Dalam bangsa Yunani kuno, sebagaimana penjelasan Noeng Muhadjir (1990: 20), seorang anak yang pulang pergi ke sekolah diantar seorang pelayan. Ia di samping mempunyai tugas mengantar jemput anak sekaligus juga sebagai pengasuh dalam rumah tangganya. Sedangkan guru yang mengajar dan biasanya bersifat individual disebut *governor*.

Dalam bahasa Indonesia pedagogi sering dimaknai sebagai pengajaran. Makanya, ia lebih diartikan sebagai

ilmu dan seni mengajar anak (Marimba, 1989). Konsep ini, menurut Muchtar Buchori (1999) merupakan sebuah bidang kajian yang mempunyai batasan yang cukup jelas. *Pertama*, adanya interaksi antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. *Kedua*, menempatkan perkembangan kesadaran nilai-nilai sebagai pusat dan akhir proses pendidikan. Dengan begitu konsep pedagogi lebih memusatkan pendidikan sebagai sebuah rangkaian tindakan untuk mengantarkan seorang anak menuju kedewasaan, mandiri dan bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebagai sebuah ilmu dan seni mendidik, dalam proses pendidikan ini membutuhkan beberapa prasyarat tertentu dan dilakukan oleh orang tertentu yang disebut guru profesional.

Hal tersebut berbeda dengan pendidikan yang sering diartikan *education* yang berasal dari *educare* berarti memasukkan sesuatu. Dalam bahasa Arab, *tarbiyah* (mengajar), *tarbiyah* (mendidik), *ta'dib* (pendidikan) (Langulung, 2003: 2-3). *Education* ini, sifatnya luas dan bisa dilakukan oleh siapapun asal memiliki kemampuan tertentu untuk mentransmisikan

yang dimilikinya berupa ilmu, pengalaman, dan pengetahuan kepada orang lain.

Pedagogy pesantren dengan begitu ilmu dan seni mengajar yang berasal dan dikembangkan oleh pesantren (secara khusus mengenai sejarah dan seluk beluk pesantren, tentang persoalan ini akan penulis bahas pada bab berikutnya). Sebagai sebuah sistem pendidikan, pesantren menurut Suyoto telah menggabungkan antara pengertian pengajaran dan pendidikan sekaligus (Rahardjo, 1974: 69). Biasanya melibatkan sebuah interaksi khusus antara seorang guru yang sering disebut kiai dengan murid yang disebut santri. Dalam hubungan seperti ini, terdapat hubungan yang sangat erat, antara kiai-santri dan membedakan dengan sistem pendidikan manapun karena dilakukan secara terus menerus, siang malam, dan lebih menyerupai makna hakiki dari *pedagogy* sebagaimana penjelasan di atas. Di pesantren, fungsi kiai bukan hanya sebagai guru saja, melainkan juga menggantikan peran dan fungsi orang tua yang *ngemong* kepada para santri. Kiai tidak sekedar mentransmisikan ilmu-ilmu agama pada santrinya, lebih dari itu ia juga melayani-menuntun, mengembangkan dan

mempersiapkan para santri menjadi pribadi-pribadi yang utuh (*insan al-kamil*).

Oleh sebab itu, peran dan fungsi pesantren terdiri dari beberapa tujuan pokok yang pertama, pedagogy pesantren berfungsi sebagai *transmission of Islamic knowledge*, pedagogy pesantren mentransmisikan ilmu pengetahuan agama dan seluruh pengetahuan yang ada. 2) pesantren sebagai *maintenance of Islamic tradition*, pedagogy pesantren berusaha mempertahankan dan memelihara tradisi Islam, dan 3) pesantren sebagai *reproduction of ulama*, karena pendidikan pesantren membina calon-calon ulama (Haedari, 2004: 198). Dari perspektif historis-kultural, kenyataan ini bisa dilihat pedagogy pesantren telah menjadi semacam *trainer center*, atau pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman, pusat keislaman dan internalisasi moralitas untuk mempersiapkan para santri menjadi para 'alim dan pemimpin yang berprestasi di masyarakat.

Ditambah lagi, proses belajar mengajar yang diterapkan pesantren pun telah membangun pola interaksi khas antara kiai dan santri. Sebagai guru, kiai bagi para santrinya biasanya dipandang

sebagai seseorang yang sekedar mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi ('*alim* dan '*faqih*'). Bahkan ia juga dianggap memiliki ilmu hikmah atau kebijaksanaan yang menyangkut pandangannya terhadap hakekat manusia dengan segala dimensinya. Kompetensi guru/kiai yang mempunyai ilmu hikmah seperti ini, menurut Retno Sriningsih Satmoko (1999: 17), dapat membantu mereka dalam membina tumbuh kembangnya santri sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, sehingga menjadikan seorang santri dapat menjadi manusia yang serasi selaras seimbang dengan diri sendiri dan lingkungannya. Bahkan lebih dari itu, menjadikan santri mengerti kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah dan *khalifatullah* di muka bumi ini.

Melacak akar sejarah sistem pendidikan pesantren, model pedagogy pesantren yang telah dikembangkan oleh para kiai tersebut telah memainkan peran yang cukup besar dalam mencerdaskan dan membangun mentalitas bangsa serta mewujudkan integrasi Nusantara ini. Kenyataan seperti ini, sebagaimana diceritakan M. Badhi As'ad (2006: 17-18), dengan merujuk pada awal sejarah berdirinya pesantren. Asal-muasal sistem pedagogy pesantren berawal dari model dan konsep

pedagogy yang diterapkan Ampeldenta, sebuah pesantren yang dipimpin langsung oleh Sunan Ampel ini menginspirasi dan direalisasikan untuk mengahadapi berbagai persoalan demoralisasi Majapahit saat itu.

Penerapan pedagogy dengan sistem pesantren di Majapahit tersebut bermula dengan surat undangan ke Cempa, pada 1401 pada saat terjadinya senjakala di Majapahit. Pada saat itu Raja Brawijaya V pun melihat banyaknya punggawa dan keluarga raja yang banyak menyimpang dari ajaran budi pekerti. Setelah mendengarkan nasihat dari ratunya, Dewi Candrawulan, untuk mendatangkan guru budi pekerti yang tiada lain adalah iparnya sendiri, Raden Rahmat/Sunan Ampel tersebut.

Setelah memenuhi undangan ke Cempa ini, Sunan Ampel menerapkan pedagogy khas pesantren yang sebenarnya tidak berbeda dengan para gurunya mendahuluinya di Singosari dan Majapahit. Didukung oleh para santrinya yang tidak berasal dari Jawa, maka bahasa pengajaran yang digunakannya adalah bahasa Melayu (*lingua franca*). Model pendidikan yang diterapkan bersifat integratif dengan materi

antara pelajaran agama dan umum. Selain mengajarkan agama, beliau mengajarkan baca tulis serta ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu pemerintahan, politik, dan tata kota. Oleh sebab itu, bisa dikatakan Sunan Ampel adalah orang yang berperan sangat penting dalam meletakkan konsep dasar pembangunan kota Surabaya dan menjadi salah satu pencetus lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa (Demak Bintara). Setelah itu, model pedagogy ini kemudian diteruskan oleh para santrinya, hingga mengalami pertentangan/persaingan dengan model pendidikan Kolonialisme seperti telah dijelaskan di atas. Kemudian pesantren mengalami dinamika perkembangan sampai sekarang, dengan tetap menampilkan sebagai sebuah pedagogy dengan berbagai karakteristik uniknya.

Tujuan Pedagogy Pesantren

Dalam ilmu pendidikan tujuan merupakan salah satu unsur dasar dan komponen pokok yang harus ada dalam pendidikan, selain harus ada subyek didik, pendidik, dan program/kurikulum pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa

pesantren adalah tempat belajar santri. Dengan demikian pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan yang memunyai bentukan pertahanan moral. Misalnya, salah satu tujuan utama pesantren adalah pembentukan kepribadian, bukan sekedar peningkatan ilmu. Berbeda dengan sistem di luar pesantren, hal ini menjadi suatu hal yang amat memprihatinkan di dunia pendidikan kita sekarang, karena sangat lemah dalam pembentukan karakter ini. Sangat disadari bahwa sistem pendidikan di luar pesantren memang di satu sisi bisa dikatakan telah berhasil dalam *transfer of knowledge*, tetapi belum seutuhnya berhasil dalam pembentukan watak dan manusia berbudi pekerti luhur.

Terdapat berbagai tujuan ketika didirikan lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren. Secara umum tujuan ideal pesantren adalah pengembangan kepribadian santri menjadi orang yang sekaligus mukhsin. Sebab, pesantren bertujuan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan teguh mengamalkan agamanya menjadi muhaligh Islam dalam masyarakat

sekitar dan melalui ilmu dan amalnya (Arifin, 1991: 248). Serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of the life*). (Darajat, 2008: 86). Pesantren sebagai pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang cukup penting untuk menyerap nilai-nilai keislaman dalam pembentukan akhlakul karimah dalam sistem pendidikan Islam.

Menurut keputusan hasil musyawarah/lokakarya intensifikasi pengembangan pondok pesantren yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 6 Mei 1978, tujuan umum pesantren yaitu membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut. Pada segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah :

1. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.

2. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis
3. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
5. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya pembangunan mental-spiritual.
6. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam memajukan usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Mujamil Qomar (2010: 6) juga menyebutkan adanya tujuan khusus pesantren sebagai berikut:

1. Mendidik siswa atau santri untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila
2. Mendidik siswa atau santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis
3. Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara
4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan atau lingkungan masyarakatnya).

Berdasarkan tujuan umum dan khusus pendidikan pesantren tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pesantren

biasanya membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua aspek kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara (Hidayat, 1985: 27-28). Dalam konteks negara Indonesia pesantren bertujuan membentuk mubaligh-mubaligh Indonesia berjiwa pancasilais yang bertaqwa, berakhlak, mampu secara rohaniyah maupun jasmaniyah mengamalkan ajaran agama Islam bagi kepentingan kebahagiaan hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta negara.

Sementara pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menekankan para santri untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral sebagai pedoman kehidupan masyarakat sehari-hari. Mengenai peran pendidikan dan komunikasi pondok pesantren sebagai gerak perjuangan di dalam menetapkan identitas diri dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun (Nata, 2000: 305).

Terdapat beberapa karakter yang sering diajarkan di pesantren meliputi : adil, amanah, antisipatif, baik sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, berfikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bijaksana, cerdas, cermat, cinta ilmu, dedikasi, demokrasi, dinamis, disiplin, efisien, efektif, empati, gigih, giat, hemat, hormat, hati-hati, harmonis, iman, ikhlas, istighfar, inisiatif, inovatif, jujur, kasih sayang, keras kemauan, ksatria, komitmen, konstruktif, konsisten, kooperatif, kreatif, lapang dada, lemah lembut, lugas, mandiri, manusiawi, mawas diri, menghargai, menjaga nalar (logis), optimis, patriotik, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, percaya diri, produktif, proaktif rajin, ramah, rasa indah, rasa malu, rasional, rela berkorban, rendah hati, sabar, saleh, setia, topan santun, sportif susila, syukur, takwa, taat, teguh, tanggung, tanggung jawab, tawakal, tegar, tegas tekun, tenggang rasa, terbuka, tertib, terampil, tekun, tobat, ulet, unggul, wawasan luas, wirausaha, dan yakin.

Selain pesantren berfungsi sebagai wahana pembentukan beberapa karakter seperti tersebut, fungsi utama pesantren sesungguhnya sangat sederhana yaitu:

mensinergikan pelaku pendidikan yakni tenaga pendidik dan santri. Dengan materi yang menjadi objek belajar dalam suatu lingkungan tersendiri. Di satu sisi pesantren sebagai lembaga sosial, pesantren berfungsi untuk menampung generasi penerus (putra/putri) dari setiap lapisan masyarakat muslim.

Lebih dari itu, pesantren pada dasarnya merupakan pusat kajian Islam yang lembaga pendidikan ini mendalami dan mengkaji berbagai ajaran dan ilmu pengetahuan agama Islam melalui buku-buku klasik dan modern yang berbahasa Arab. Dengan demikian, tidak langsung pesantren telah menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pengkajian masalah keagamaan Islam dalam kata lain lain pesantren sebagai pusat kajian Islam (Departemen Agama RI, 2003).

Sebagai pusat kajian Islam pondok pesantren memang seyoginya bisa bersifat responsif terhadap terhadap fenomena yang ada. Sehingga dengan fleksibilitasnya ia dapat resisten terhadap dampak negatif dari transformasi dan akomodatif terhadap nilai positif darinya. Dalam hal ini pesantren memang merupakan benteng umat Islam dalam bidang pendidikan

pemahaman agama. Ia berfungsi sebagai sumber penjelasan ajaran agama melalui kajian yang diselenggarakannya.

Selain sebagai pusat kajian Islam, pesantren juga berfungsi sebagai pusat pengembangan dakwah. Dalam pondok pesantren terdapat dakwah Islamiyah yang dapat diartikan sebagai penyebaran atau penyiaran ajaran dan pengetahuan agama Islam yang dilakukan secara Islami, karena memang fungsi pesantren adalah menyebarkan ajaran agama Islam yang memang merupakan perintah agama.

Dari beberapa pelacakan referensi hasil penelitian para ahli mengenai tujuan pendidikan pesantren di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pendirian pesantren itu adalah: mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas Khalifah di bumi melalui pelatihan keterampilan-keterampilan fisik dan meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami sesuai teladan Rasulullah yang mampu diarahkan secara intelektual untuk menemukan

kebenaran dan dapat menyatukan kehidupan sosial
utuh dari roh, tubuh dan akal.

Walaupun secara teoritis pada saat ini tuju-
pesantren belum dirumuskan secara rinci, kompe-
dan dijabarkan dalam satu sistem pendidikan
lengkap dan konsisten, tetapi secara umum tuju-
pesantren tertuang dalam kitab Ta'limul Muallimin
dimana tujuan seseorang menuntut ilmu adalah
mengembangkan ilmu adalah semata-mata karena
kewajiban orang Islam (muslim) yang harus dilakuk-
dengan ikhlas (Arifin, 1993: 35).

Bisa jugadikatakanbahwa tujuan pendidikan
pesantrenmerupakan kelanjutan misi besar yang
terkandung dalam wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah
Muhammad SAW. Merujuk pada dua sumber tersebut
itulah, pendidikanpesantren harus bersentuhan dengan
segala dimensi kehidupan. Tidak hanya pendidikan
pendidikan agama, melainkan juga menyentuh persoalan
— persoalan sosial, kultural, ekonomi, politik, dan lain-
sebaginya. Pesantren, sebagaipendidikan Islam yang
ingin melahirkan generasi yang belah sebelah (Mulya
2011: 26)danterjebak pada formulasi yang

terjadinya dikotomi ilmu.
Artinyapesantrentidakhanyamempersiapkansebuah
generasi yang hanya mementingkan satu dimensi
keilmuansajayaituilmupengetahuan yang berhubungan
dengankehidupanukhrawiseperti; pahalasurga,
siksaaneraka, dankuburansaja.Sementara ilmulain yang
menjadiprasaratkebahagianhidup di duniadipandang
tidak penting/sebelah mata.Melainkankeduannyadipelajarisecarasimbangdandi
pergunakansecarabersama-samauntukkemashatanhidupmanusia.

Selain itu pendidikan pesantren yang memiliki
keterkaitan erat dengan pendidikan nilai dan menyatukan
berbagai permasalahan yang menyangkut preferensi
personal ke dalam satu kategori yang disebut nilai-
nilai.Maka, pendidikan pesantren sebagai pusat
pendidikan nilai, bukanlah sekedar mentransmisikan isi
nilai tertentu kepada peserta didik, akan tetapi dinamika
sebagai upaya mengembangkan proses penilaian dalam
diri seseorang, semacam suatu keyakinan untuk
memperkaya peserta didik dengan suatu yang lebih
khusial dan fungsional. Terdapat beberapa fungsi besar

pesantren, dalam hal ini yaitu: *berbagi* sebagai *conservation education* ialah mengembangkan dan melestarikan nilai luhur agama Islam, misi *soul* *moral development* ialah mengembangkan dan membina para santri yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti, dan misi *socio-civic development* ialah membina para santri agar memahami dan menyadari hubungan mereka dengan sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Kurikulum Pesantren

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang terencana dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Batasan ini mencerminkan hal-hal berikut: pertama, pendidikan ialah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan. Kedua, di dalam kegiatan pendidikan terdapat suatu rencana yang disusun atau diatur. Ketiga, rencana tersebut dilaksanakan di sekolah melalui cara-cara tertentu yang ditetapkan (Sudiyono, 2009: 219). Sedangkan kurikulum pesantren, merupakan sebagai bentuk

yang diprogram oleh para kiai untuk pembinaan aqidah dan akhlak Islamiyyah, bimbingan pada aspek intelektual, psikologi, sosial, dan pengembangan spiritual para santri.

Studi-studi tentang pesantren tidak menyebutkan kurikulum yang baku di kalangan pesantren. Bahkan Martin Van Bruinessen, menyatakan "kurikulum pesantren tidak distandarisasi. Hampir setiap pesantren mengajarkan kombinasi kitab yang berbeda-beda" (Bruinessen, 1995: 114). Hal ini dapat dipahami karena pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bebas dan otonom. Dari segi kurikulum, pesantren selama ini diberi kebebasan oleh Negara untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan secara bebas dan merdeka. Namun demikian, jika dilihat dari studi-studi tentang pesantren diperoleh bentuk-bentuk kurikulum yang ada di kalangan pesantren. Menurut Lukens-Bull, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan kursus.

Meskipun begitu, sekali lagi perlu ditegaskan di sini bahwa tidak semua pesantren mengajarkan ilmu tersebut secara ketat. Kombinasi ilmu tersebut harus lazimnya ditetapkan di pesantren. Beberapa pesantren lainnya menetapkan kombinasi ilmu yang berbeda-beda karena belum ada standarisasi kurikulum pesantren yang berskala lokal, regional maupun nasional. Standarisasi kurikulum barang kali tidak pernah benar-benar ditetapkan di seluruh pesantren. Sebab sebagian besar kalangan pesantren tidak setuju dengan standarisasi kurikulum pesantren. Variasi kurikulum pesantren justru diyakini lebih baik. Adanya variasi kurikulum pesantren akan menunjukkan ciri khas dan keunggulan masing-masing.

1. Kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam

Dalam dunia pesantren, kegiatan pendidikan agama Islam lazim disebut *ngaji* atau pengajian. Para santri biasanya mengaji untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang diawali dengan mempelajari teks al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kitab dari mulai

pemahaman yang mudah sampai sulit (Dhofier, 1982: 50). Kegiatan *ngaji* di pesantren dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua tingkatan. Tingkatan paling awal *ngaji* sangatlah sederhana, yaitu para santri belajar bagaimana cara membaca teks-teks Arab, terutama sekali al-Quran dan menghafal sebagiannya untuk kepentingan shalat. Tingkatan ini dianggap sebagai usaha minimal dari pendidikan agama yang harus dikuasai oleh para santri. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik dan mempelajarinya dibawah bimbingan kiai. Adapun kitab-kitab yang dijadikan bahan untuk *ngaji* meliputi bidang ilmu : fikih, akidah atau tauhid, nahwu, sharaf, balaghah, hadits, tasawuf, akhlak, dan ibadah – ibadah seperti shalat, doa, wirid,

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman sekaligus kitab suci umat Islam wajib dipahami dan dikuasai oleh para santri. Mata pelajaran ini biasanya diajarkan pada permulaan sebelum para santri mengaji kitab-kitab lain. Mereka pertama kali diperkenalkan

Hal tersebut menurut Martin Van Brueningh (1995: 112-114), disebabkan fiqih membawa implikasi konkret bagi pelaku kescharian individu masyarakat serta menjelaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan, dilarang dan tindakan-tindakan yang dianjurkan. Beberapa contoh kurikulum fiqih di pesantren adalah *Safinah al-Najah*, *Siddiq al-Muhajir*, *Minhaj al-Qawim*, *Fath al-Qarib*, *Bajuri*, *al-Bujairuni*, *al-Muharrir*, *Minhaj al-Thalibin*, *Fath al-Wahab*, *Tuhfah al-Mubtadi*, dan *Fath al-Muhib*.

d. Aqa'id

Aqa'id meliputi segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan seorang muslim. Tetapi, menurut Nurcholis Madjid, meskipun banyak pokok-pokok kepercayaan atau aqa'id ini disebut *usuluddin* (pokok-pokok agama), sedangkan yang disebut *furu'* (cabang-cabang), namun kenyataannya perhatian pada bidang *aqa'id* ini kalah besar dari antusias dibanding dengan perhatian pada bidang *furu'* yang hanya merupakan cabang (*furu'*). Hal ini berbeda dengan awal generasi terdahulu umat Islam

sangat antusias mempelajari kurikulum aqa'id ini, seperti Al-Ranini, 'Abd Al-Rauf Singkel, dan 'Abd Al-Shamad Al-Falimbani. Beberapa contoh kurikulum Aqa'id adalah: *Umm al-Barahin*, *Kifayah al-'Awwam*, *Aqidah al-'Awwam*, *Jawhar al-Tauhid*, *Fath al-Majid*, *Jawahir al-Kalamiyyah (fi Idhah al-'Aqidah al-Islamiyyah)*, *Husnul Humidiyyah (al-Husun al-Humidiyyah li al-Muhafazah 'ala al-Aqa'id al-Islamiyyah)*, dan *Aqidatul Islamiyyah*.

e. Tasawuf dan Akhlak

Kurikulum pesantren tidak memberi batasan yang jelas tentang tasawwuf dan akhlak, sebab antara keduanya sama-sama sering digunakan di beberapa pesantren untuk menunjukkan apakah materi di bawah tasawwuf/akhlak. Akan tetapi, pemahaman tentang akhlak di pesantren biasanya menunjukkan materi yang mengajarkan tentang kesalehan dan perilaku terpuji. Akhlak, banyak mengajarkan santri bagaimana menjadi manusia berkarakter dan banyak kaitannya dengan membentuk tanggung jawab pribadinya (harga dirinya) sebagai manusia. Akhlak yang ingin dibentuk

adalah tanggung jawabnya di samping dirinya, Allah, manusia dan makhluk lain.

Sedangkan pemahaman yang berkenaan tentang ilmu tasawuf hanya seputar tarikat, suhuf, wirid. Para ulama terdahulu sangat menggemakan tasawwuf ini. Menyebut kurikulum Tasawwuf dan akhlak di pesantren banyak sekali contohnya, *Ilmu Ummiyyah, Salawat Salikin, Bidayatul Hikmah, Marqif Ubudiyah, Hidayatus Salikin, Ma'arif Thalihin, Hikmah, Hidayatul Alzkiya, Kifayat Atqiya', Risalatul Muawanah, Nashaidul Daulat, Alzhar* (kitab-kitab tasawwuf), *Ta'limul Muwafiq, Wasaya, Akhlak lil banat, Akhlak lil Banu, Ma'arif Ummiyyah, Nashaidul Daulat* (kitab-kitab Akhlak).

f. Tafsir

Keahlian dibidang tafsir ini amat penting untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya penyelewengan-penyelewengan dalam menafsir al-qur'an. Peran tafsir sangat urgen dan strategis untuk menangkal segala kemungkinan terburuk dalam menafsiri al-Qur'an para santri & pesantren.

Aliyah biasanya sudah dibekali beberapa ilmu tafsir seperti *Itqan* dan *Itmamud Dirayah*. Adapun beberapa jenis tafsir yang sering dikaji di pesantren yaitu: *Jalalain, Tafsir Munir, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Baidhawii, Jamilul Bayan* (Thabari), *Maraghi*, dan *Tafsirul Manar*.

g. Hadits

Penguasaan hadits dirasa sangat penting, mengingat hadits merupakan sumber hukum agama (Islam) kedua setelah al-qur'an. Meskipun harus diakui, hadits merupakan mata pelajaran yang relatif baru di pesantren. Keahlian dibidang ini tentu saja sangat penting untuk pengembangan pengetahuan agama itu sendiri. Terdapat beberapa hadits yang sering dipelajari di pesantren, diantaranya adalah *Bulughul Mar'am, Subulus Salam, Riyadhus Shalihin, Shalatu Bukhari, Tajridush Sharih, Jawahir Bukhari, Shalatu Muslim, Arba'in Nawawi, Majalis Saniyah, Durratan Nashihin, Tanqihul Qaul, Mukhtarul Ahadits, Ushfuriyah*. Di samping juga dipelajari kitab

ilmu al-hadist seperti *Baiquniyah* dan *Mughits*.

h. Bahasa Arab

Keahlian dibidang ini harus dibedakan dari keahlian dalam nahwu-sharaf diatas. Sebab yang beratnya ialah penguasaan "materi" bahasa itu sendiri baik pasif maupun aktif. Kebanyakan mereka telah mengenal lagi kitab-kitab nahwu-sharaf seperti yang biasa dikenal di pondok-pondok pesantren.

2. Kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral.

Pesantren mempunyai pengalaman pendidikan moral sebagai salah satu kegiatan pendidikan penting di pesantren. Kegiatan keagamaan yang paling ditekankan di pesantren ialah ke salehan dan komitmen para santri terhadap aturan Islam. Kegiatan kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan saat ngaji. Adapun nilai - nilai moral yang diajarkan

di pesantren adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanann, dan kemandirian. Para santri mempelajari moralitas saat mengaji dan kemudian diberi kesempatan untuk mempraktikkan.

Di pesantren persoalan moralitas dianggap sangat penting dan selalu dikaitkan pada persoalan metafisik. Terdapat beberapa kitab yang secara khusus memberikan bimbingan moralitas dan sekaligus pelatihan spritualitas para santri. Sebut saja *Ta'limu al-Muta'allim* karya Syekh Zarnuji, kitab *Akhlaq li al-Ihmin wa al-Bamat* karya Al-Ustad 'Umar bin Ahmad Baraja, *Irsyadu al-'Ibad* karya Zainudin al-Malibari, dan *Nashoilu al-'Ibad* karya Syekh Nawawi Banten. Kita- kitab ini secara garis besar memberi panduan khusus bagi para santri ketika mencari ilmu dengan selalu mengedepankan akhlak yang luhur, seperti harus senantiasa tabah dan sabar dalam mencari ilmu. Selain mengharuskan para santri untuk memufatkan para guru, orang tua, dan berinteraksi dengan baik dengan manusia/teman serta peduli pada lingkungan sekitar.

3. Kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum

Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah dengan mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kemendiknas), sedangkan untuk kurikulum madrasah mengacu kepada pendidikan agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama (sekarang Kemenag). Jika dilihat dari rasio pendidikan umum dan pendidikan agama yang termuat didalamnya, dapat dikatakan cenderung sekuler, karena dari keseluruhan total jam pelajaran yang ada, kurikulum sekolah hanya memberikan 2 jam pelajaran agama setiap minggunya.

Adanya tuntutan modernisasi ke sekolah/pendidikan umum ke pesantren ini disebabkan adanya tuntutan modernisasi dan perubahan-perubahan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang menuntut pesantren. Semua ini, memang merupakan agenda dan PR tersendiri bagi pesantren agar pesantren hanya bisa mampu bertahan dengan kondisi

modernisasi yang sedang terjadi di semua lini kehidupan.

Tetapi lebih dari itu, pesantren harus mampu melakukan penyesuaian akomodasi dan konsesi yang diberikannya (Azra, 1999: 105). Selain melihat peran dan tanggung jawab pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan agama Islam dan sebagai bagian integral masyarakat, harus terus berbenah diri melakukan perubahan dan relayasa sosial sebagai bagian tanggungjawabnya melakukan upaya pembenahan kultural keilmuannya agar menemukan relevansinya dengan perkembangan kontemporer.

Lebih dari itu, memasukkan materi umum ke pesantren bisa dilantarkan sebagai kesadaran baru masyarakat pesantren melakukan usaha integrasi keilmuan antara ilmu umum dan agama yang ditengarai telah terjadi pemisahan antara keduanya dan menyebabkan kelemahan ilmu Islam di banding Eropa. Padahal fakta sejarah telah membenarkan, masyarakat muslim sebetulnya tidak mengenal dikotomisasi keilmuan. Bahkan sebaliknya, ulama-ulama muslim pada abad pertengahan gemar sekali

Saeful Ridwan memberikan pemahaman keagamaan, seksualitas dan pendidikan seks (Jurnal Edukasi, 2011). Serta berbagai tema-tema aktual yang sedang dibicarakan dan di bawa ke pesantren akhir-akhir ini seperti bahaya radikalisme, ISIS, dan lain-lain, sampai berbagai usaha mengatasi kemiskinan, melakukan pemberdayaan ekonomi, dan memperhatikan sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular dan berbahaya seperti HIV/AIDS, serta pentingnya menjaga kesehatan-keselamatan.

Sebagai bentuk diversifikasi kurikulum pesantren seperti itu memang sudah seharusnya dilakukan. Terutama dengan menyadari bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini dahsyat. Karena itu pesantren tidak cukup hanya mentransferkan ilmu, tetapi lebih dari itu lagi pesantren meningkatkan kemampuan belajar (*learning capacity*). Rancangan kurikulum pun disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Ada empat pilar ilmu yang mestidiberikan kepada para santri agar mereka siap menghadapi perubahan yang sedang terjadi.

Ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan, b)
Ilmu pengetahuan kealaman (*natural sciences*), c)
Ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*), dan d).
Humaniora. Kalau pesantren tanggap terhadap setiap perkembangan di luar pesantren dan mampu mengadaptasi setiap tuntutan dan perubahan zaman demi perbaikan/peningkatan pesantren, di samping tidak meninggalkan tradisi kurikulum pesantren sendiri yang telah diwariskan para pendahulunya—pasti pesantren akan senantiasa survive dan selalu dilirik oleh masyarakat.

B. Pengajaran Pesantren: Mendidik dengan Hati

Pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan Islam, sejalan dengan berbagai model dan strategi pengajaran yang lebih manusiawi, mendidik dengan hati dan menumbuhkan kesadaran para santri. Proses internalisasi berbagai nilai kehidupan di pesantren, tidak selalu diidekat dengan transfer pengetahuan belaka (*intellectual questions*), melainkan mengajarkan sebuah praktik kehidupan yang bisa digali nilai filosofisnya melalui ibadah. Bukankah para kiai pesantren bisa

mengungkapkan makna terdalam sebuah praktik tertentu dan itu secara tidak langsung dapat menginspirasi dan memotivasi kehidupan para santri?

Seperti halnya ibadah puasa, bagaimana puasa itu dapat dijadikan sebagai model pengajaran bagi para santri bukan saja untuk membentuk karakter yang baik bagi santri tapi sekaligus menumbuhkan keimanan dan kecerdasan mereka. Sebab, para pesantren, sering menekankan para santri/murid secara umum agar lebih bisa menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sebuah ibadah istimewa yang penuh berkah dan banyak memberikan pelajaran khusus bagi umat Islam. Tak salah jika bulan ini, dianggap sebagai *al-bulan al-rahmah* sebagai *al-Tarbiyah al-Rahimah*, bulan telah menjadi *kurikulum* bagi umat Islam. Bagaimana bisa mendidik dan mengendalikan nafsu, sebagai karakter positif menjadi "wanita dewasa" yang harus senantiasa sabar, ikhlas, mengedepankan kasih sayang dalam segala hal, menjadi guru/orang tua agar bisa sukses mendidik putra putri kita.

Selain mengungkap rahasia dan fungsi puasa biasanya para kiai pesantren juga menghubungkan dengan makna terdalam dari Idul Fitri. Menariknya, pada dimensi ini mereka mampu membawa para santri untuk menyadari eksistensi kemanusiaan mereka sendiri. Bahwa manusia pada hakikatnya suka kelembutan, kedamaian dan menolak konflik/kekerasan. Idul Fitri, yang diderivasi dari kata Arab *'idun* (kembali) dan *al-fitrāh* (watak/dasar manusia), para kiai sering menjelaskan arti Idul Fitri itu kepada para santri sebagai momentum untuk mengembalikan fitrah manusia yang suka kedamaian. Bagi dunia pendidikan, dengan begitu Idul Fitri bisa dijadikan sebagai momentum refleksi diri, bagaimana sebagai pendidik di sekolah agar sukses mengantarkan "generasi emas", di samping cerdas dan shalih sekaligus adalah tergantung metode dan pendekatan para gurunya yang jauh dari kekerasan. Bukankah selama sebulan penuh kita telah dilatih oleh puasa, bagaimana untuk memperoleh "kemenangan" dan "kebahagiaan" kita harus mengendalikan amarah? Wajar sebagai predikat orang yang sukses dalam berpuasa adalah *muttaqin* dan salah satu cirinya adalah *al-*

kadimina al-ghaidha wal 'afina 'anin naas (maka amarah dan memaafkan kepada manusia lain).

Hal seperti itu oleh para kiai bisa disampaikan pada hari puasa Ramadhan/ hari raya idul fitri. Sebuah waktu mereka lakukan untuk mentransformasi kehidupan dan membentuk budaya baru di pesantren/masyarakat. Apalagi sudah menjadi maklum jika biasanya budaya masyarakat adalah konsumtif dan pragmatis. Di samping pola pendidikan yang sering menggunakan kekerasan dalam mendidik. Maka, dengan makna puasa dan idul fitri di atas, dapat dipetik makna filosofisnya untuk menjadi masyarakat yang produktif dan hidup yang sederhana. Sekaligus bisa menemukan metode dalam pendidikan anak-anak di pesantren dan masyarakat secara umum. Yaitu metode yang lebih mengedepankan hati dan perasaan cinta.

Dengan makna puasa dan idul fitri, para kiai menganjurkan kepada masyarakat/para guru untuk segera meninggalkan bentuk mendidik anak dengan sikap "amarah", emosi dan suka membentak, yang ini pasti akan menyebabkan keburukan bagi anak pada masa-masa mendatang (*Ya ayyuha al-Ladina*).

tattabi'u khutuwati al-syaithan, wa man yattabi' khutuwati al-Syaithan fa innahu ya'muru bi al-fakhsyai wa al-munkar). Bisa jadi, kegagalan pendidikan kita selama ini, yang masih banyak memproduksi generasi suka kekerasan, tawuran dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya, karena salah metode dalam mendidiknya.

Apalagi kita menyadari bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Bentuk perawatan yang terbaik adalah menanamkan cinta kasih kepada anak-anak kita. Sebab cinta dapat menjadi motivator paling baik untuk belajar dan bertumbuh. Cinta mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk bisa merubah keadaan anak-anak anda, dari yang biasa menjadi yang luar biasa! Seberapa besar "sentuhan" yang diberikan oleh orang tua dan guru kepada anak-anaknya, hal inilah yang akan menentukan masa depan mereka.

Ketika seorang guru atau orang tua yang mendidik anak tidak dengan cinta, anak dengan mudah akan memahami bahwa orang tua atau guru tidak perhatian dan senang dengan mereka. Keadaan seperti ini tentu saja

sangat berdampak buruk pada psikologi anak, yang tidak ada kegairahan dan semangat pada hidup mereka.

Kondisi psikis akan menentukan proses belajar anak. Apabila cinta yang diberikan oleh orang tua guru tulus, pasti hati anak akan merasa senang dan nyaman. Dalam kondisi demikian, mereka akan menerima setiap materi yang diajarkan. Hal ini memungkinkan anak bergairah dan semangat untuk selalu belajar serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara mandiri. Hal ini, karena kekuatan cinta telah mampu mempengaruhi, memotivasi, dan menjadi spirit untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif bagi kehidupan anak.

Pendidikan dengan mengedepankan hati dan perasaan sebagaimana diterapkan pesantren bisa dikatakan sebagai awal pembentukan karakter. Hal ini tentu membutuhkan kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menembus gema dan gaung yang sangat panjang dan lama. Kita meneriakan sesuatu pada sebuah bukit, dan gema teriakan itu terus terdengar dengan ekuivalensi yang jauh dan panjang bahkan hingga ratusan tahun atau dari seribu tahun. Ibarat kita melemparkan sebuah

pada suatu kolam atau danau, percikan dan lingkaran yang dibuat atas dampak dari lemparan itu mampu membuat sebuah lingkaran yang sangat besar, jauh dan lama hingga mampu dirasakan di "bibir pantai kehidupan" itu hingga saat ini. Hal ini menandakan bahwa awal tindakan itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa hingga mampu bertahan sampai bibir kehidupan seperti ini (Saleh, 2012: 7).

Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait pentingnya karakter dan cinta bagi pendidikan anak. Salah satu hasil penelitian telah menyatakan bahwa, kelincahan gerakmata, koordinasi antara mata dan tangan, serta sifat-sifat positif lainnya berkembang lebih cepat pada bayi-bayi yang ibunya ikut program pengenalan musik bagi bayi dalam kandungan. Dan anak-anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, kelincahan, dan berbagai ketrampilan mereka dengan musik. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan oleh *University Of Toronto* dengan melibatkan 144 anak usia 6 tahun, berkesimpulan bahwa pelajaran instrumen musik dapat memicu kemampuan matematika dan IQ secara keseluruhan. Semua ini dapat disimpulkan bahwa,

metode mendidik anak dengan cinta dan menggunakan alat musik, yanyian dan irama merupakan alat yang sangat efektif untuk merangsang otak dan menumbuhkan semangatnya, sekaligus memperluruskan tubuhnya, bahkan sebelum anak dilahirkan.

Perkembangan pesantren akhir-akhir ini telah menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak sedikit yang telah menerapkan hasil penelitian para ahli. Pesantren telah menyadari pentingnya menciptakan lingkungan dengan memperhatikan aspek perkembangan pada anak. Banyak pesantren telah mentransformasi metode pembelajarannya dengan meninggalkan cara-cara kuno yang dianggap tidak efektif dan terkandang bertentangan dengan HAM dan pelanggaran hukum; seperti menggunakan kekerasan dalam mendidik anak. Baik kekerasan berbentuk fisik maupun non-fisik.

Banyak para kiai pesantren telah memahami dan mengerti bahwa anak yang dididik dalam lingkungan yang penuh "kebencian", ancaman dan bahkan kekerasan/pukulan, meminjam penjelasan R.M. Berns, anak tidak dapat tumbuh dewasa dengan emosi yang positif.

Anak-anak yang tumbuh kembang di dalam masyarakat penuh kekerasan punya resiko bermasalah mental dan jasmaninya, sebab hidup di dalam keadaan ketakutan yang ajeg itu membuat mereka sulit untuk menumbuhkan kepercayaan pada orang lain, kemandirian, dan kompetensi sosial (Bern, 2004: 233). Setiap kata-kata kotor yang ditujukan pada anak, seperti anak nakal, bandel, bengal, malas dan bodoh. Kata-kata seperti ini, selain terbukti tidak efektif untuk mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik dan menjadi sesuai yang diharapkan orang tua. Justru sebaliknya kata-kata kotor dan hinaan tersebut akan selalu dikenang dan terekam dalam memori anak dan yang lebih parah dapat membunuh karakter anak. Dampak lain yang telah banyak disadari para kiai dan ustadz, bahwa anak-anak yang hidup dalam lingkungan penuh kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik akan mengalami berbagai gangguan kejiwaan dan cenderung meniru perilaku yang buruk ini ketika mereka sudah dewasa. Bukankah mengajar sesungguhnya adalah memberi teladan?

Tentang keteladanan, dengan membaca ulang sejarah kita telah banyak peninggalan berupa contoh-

contoh bagaimana keteladanan yang telah diberikan para kiai dalam mendidik para santri mereka. Para kiai di Semarang ini, semua orang mengenal Kiai Saleh Darat, guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, K. Ahmad Dahlan dan A. Kartini. Yang mempunyai kitab *al-munajjim*, ia banyak memberi keteladanan dalam hal keikhlasan, keikhlasan dan kehidupan tanpa pamrih. Wajar dengan sentuhan dingin para kiai, seperti Kiai Saleh Darat, dan para kiai lainnya—banyak melalui sejumlah ulama yang telah berjasa besar bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia. Model-model pendidikan para kiai kita, yang telah mendatangkan kehidupan penuh kedamaian, *tepa kerta yaya*, menghormati para sesepuh, dan perilaku-perilaku lainnya, perlu segera diterapkan dalam pendidikan kita—agar sebagai bangsa kita selamat dari keterpurukannya. Terutama hilangnya atau melemahnya karakter-karakter positif di masyarakat kita sekarang.

Sebagai langkah pertama dan percontohan bagi para santri di lingkungan pesantren, para santri diajarkan setelah melakukan shalat 'Idul Fitri, segera melakukan budaya "sowan" kepada orang-orang tua dan

mereka. Sebagai bentuk perwujudan cinta kasih, penghormatan dan ketakziman kepada mereka (*wa huwa bi sabqin haizun tafdhila, mustajibun tsana'iyah al-jamila*). Para santri memang ditanamkan untuk memuliakan para guru dan orang-orang tua serta dilarang sedikitpun meremehkan mereka. Sebab, jasa-jasa orang-orang sepuh atas kesuksesan mereka sekarang maupun setelah lulus pesantren. Tentu saja banyak manfaat yang bisa diperoleh para santri melalui, apa yang sering disebut dengan *sillaturrahmi/sillaturrahimi*. Selain mendatangkan rejeki, memanjangkan umur dan barakah, sebagaimana disebut dalam beberapa hadis rasul. *Sillaturrahim*, pada hakikatnya metode uswah hasanah yang efektif bagi para santri. Bagaimana perwujudan cinta kasih dan penghormatan antara yang muda kepada yang tua itu terwujud. Melalui momentum *sillaturrahmi*, memungkinkan saling *sharing*/komunikasi dan yang terpenting bisa saling mendo'akan dan saling memberi wasiat kepada kesabaran dan ketakwaan.

Metode Pendidikan dalam Dunia Pesantren

Sebagai lembaga yang telah mengalami perkembangan pondok pesantren memiliki model pembelajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu metode sistem pendidikan dengan metode pengajaran *etonan* dan *sorogan*. Kedua metode ini, merupakan metode yang digunakan dari awal berdirinya pesantren nusantara dan senantiasa dipertahankan hingga sekarang. Meskipun seiring dengan perkembangan terjadi metode pendidikan pesantren juga mengalami berbagai penyesuaian dan penambahan serta tetap menggunakan sistem klasikal.

Dengan berbagai metode yang diterapkan dan dikembangkan pesantren menurut Affandi Mulya (2001: 81), mampu membentuk tradisi akademik pesantren yang merujuk pada proses belajar tunjukkan dapat menampilkan satu sosok lulusan pesantren yang berwawasan luas, berkepribadian matang, dan berkemampuan tinggi dalam melakukan rekayasa.

Adapun metode-metode pengajaran yang digunakan pondok pesantren diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Metode Sorogan (*Individual Learning Process*)

Metode *sorogan* adalah suatu metode pengajaran bersifat individual yang sering digunakan di pesantren. Biasanya metode ini untuk tingkat pemula dan dilakukan dengan cara santri mengajukan suatu kitab kepada kiai untuk dibaca di hadapan kiai. Namun para santri yang cukup pandai juga bisa men-sorog-kan (mengajukan) kitab kepada kiai untuk dibaca dihadapannya. Penggunaan metode ini, kalau di dalam membaca dan memahami kitab kuning terdapat kesalahan maka kesalahan tersebut akan langsung dibenarkan oleh kiai (Mujib, 2010: 236). Metode *sorogan* ini biasanya santri meminta kepada kyai untuk mengajarkan ilmu-ilmu tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Keinginan menerima ilmu ini penekanannya oleh santri itu sendiri.

Metode pengajaran *sorogan* di pesantren memperlihatkan corak tradisional pesantren itu. Metode ini dalam praktiknya biasanya dilakukan oleh kiai dan atau santri senior, dengan membaca serta menyimak kitab tertentu yang diikuti oleh sejumlah santri dalam jumlah yang amat banyak. Di hadapan kiai, para santri dapat mendengarkan secara langsung

keterangan beberapa ayat al-Qur'an atau kitab kuning yang diterjemahkan di hadapannya. Setelah itu para santri bisa mengulangi apa yang telah diajarkan sehingga harapannya para santri betul-betul mengerti dan memahami pelajaran agama dengan baik dan benar.

Dalam sistem sorogan murid-murid dibimbing secara individual sesuai dengan kemampuannya untuk membaca kitab-kitab yang dipelajarinya. Sistem ini biasanya diberikan santri-santri yang baru masuk untuk memperoleh binaan secara intensif. Dalam prosesnya, sistem sorogan ini, menurut Asep Saefudin Muhtadi (2004: 85), menggambarkan pola komunikasi yang berlaku di lingkungan pesantren, yaitu monolog, komunikasi tatap muka, personal dan bertumpu pada bentuk komunikasi lisan (*oral communication*). Dalam hal ini, tentu saja guru berfungsi sebagai sumber informasi, guru sebagai tokoh utama, dan sekaligus berperan sebagai pemimpin yang memainkan kekuasaan 'mutlak'.

Disebabkan metode sorogan ini cenderung bersifat monoton, indoktrinatif, dan

centered, text book, dan *top down*. Menurut kritikan Paulo Freire (1991) atau penganut aliran-aliran pendidikan kritis, sistem pesantren dengan pendekatan ini nyata-nyata menerapkan model bank. Karena yang ada hanya pemberian yang terus-menerus kepada peserta didik atau santri. Sehingga para santri, nampak tidak diberi kebebasan untuk menginterpretasi terhadap setiap teks yang dibacakan kepada mereka. Para santri juga terkesan dituntut hanya menghafal sejumlah kitab-kitab dan dijauhkan dengan tradisi eksperimentasi yang berusaha menjawab dan menggali fenomena alam.

Meskipun harus diakui, metode sorogan ini memberi implikasi positif bagi penguasaan yang mendalam para santri terhadap isi kitab-kitab kuning yang dipelajari. Karena metode ini dilakukan secara individual dari santri berhadapan langsung dengan kiai, maka terjadi hubungan yang mendalam dan saling mengenal dari hati ke hati antara keduanya (Romas, 2003: 71). Di samping mempunyai otentisitas materi/substansi ajaran agama Islam yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi

selanjutnya dengan sebuah pola dan pendekatan yang sudah teruji. Apalagi dalam pengembangan dan aplikasi metode ini akan menuntut adanya keakuratan kerajinan, ketelatenan dan disiplin para santri. Sehingga dengan demikian metode ini dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya dan memungkinkan para kiai mengawasi, menilai dan membimbing para santrinya secara maksimal.

Bahkan mampu membentuk tradisi intelektual tersendiri yang terbentuk dari epistemologi keilmuan yang berlandaskan pada berbagai Kitab Kuning yang terpilih. Pesantren meskipun dengan metode yang sangat sederhana ini, dari awalnya sudah mampu membentuk "literary" bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Dari sini bisa diasumsikan bahwa menjadi santri berarti juga mengetahui agama (melalui kitab-kitab tersebut). Artinya tidak seorang santri itu bisa membaca al-Quran dengan sendirinya membawa pada sikap literasi dalam memandang agamanya.

Tetapi sayangnya dalam perkembangannya, Kitab Kuning yang menjadi pilihan sebagai referensi utama pesantren dan diajarkan dengan metode *sorogan* pada umumnya adalah kitab-kitab yang memfokuskan diri pada kajian Fiqih, nahwu sharaf, dan meninggalkan kitab-kitab tasawuf. Sehingga bisa dikatakan, kajian Kitab Kuning yang dikembangkan di pesantren lebih berorientasi pada *fiqh minded*. Materi yang dikaji lebih banyak bersifat parsial dan terkesan tidak komprehensif. Maka akhirnya, ditengarai pesantren melahirkan para santri yang besikap formalisme dalam beragama, tertutup dan kurang bisa menghargai keanekaragaman sebagai salah satu karakter masyarakat modern.

Upaya pemecahan mendasar dari kondisi seperti ini dapat dicari solusinya melalui pengembangan wawasan berpikir dikalangan pesantren dengan memperkaya basis metodologi keilmuan, selain basis materi yang selama ini digunakan. Bagaimanapun juga, salah satu kekurangan dunia pesantren hingga saat ini dengan metode *sorogan* ini adalah kurangnya pengembangan

pemikiran analitis dalam tradisi membaca teks kitab Kuning. Selain itu, agenda utama lain dari menginstruksi kurikulum adalah mengorientasikan pendidikan pesantren pada upaya menumbuhkembangkan potensi intuisi dan spiritualitas peserta didiknya sebagai penggerak terbentuknya dimensi intelektualitasnya.

2. Metode Wetonan (*collective Learning Person*)

Metode wetonan atau sering disebut dengan *bandongan* adalah sistem pengajaran yang dilakukan dengan cara kiai membaca kitab suatu kitab dan santri membawa kitab yang sama, ketika kiai membaca maksud isi kitab tersebut maka santri membaca dari struktur kata atau kalimat yang di baca oleh kiai pada kitab miliknya masing-masing (Galha, 1998). Biasanya para kiai pesantren ketika menggunakan metode ini untuk membaca kitab kuning di bangsal

para santri dengan cara yang cepat dan kilat. Model ini sering dipakai juga untuk ngaji "kilatan", seperti ketika pada bulan ramadhan.

Disebabkan metode wetonan di pesantren, didalamnya terdapat seorang kiai yang membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama lalu santri mendengar dan menyimak bacaan kiai. Maka, metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengaji kolektif (Mujib, 2010: 236). Sistem wetonan/bandongan adalah pengajian yang dilakukan oleh seorang kiai yang diikuti oleh santrinya dengan tidak ada batas umur atau ukuran tingkat kecerdasan. Sistem pembelajaran model ini, kabarnya merupakan metode yang diambil dari pola pembelajaran ulama Arab. Sebuah kebiasaan pengajian yang dilakukan di lingkungan Masjid al-Haram.

Metode wetonan/bandongan sering juga disebut dengan *halaqah* dalam arti bahasanya adalah lingkaran santri. Sedangkan halaqah yang dimaksud di sini adalah sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan seorang guru atau ustadz atau kiai yang

belajar bersama dalam satu tempat untuk mendiskusikan pemahaman terhadap suatu materi atau suatu kitab tertentu. Adapun waktunya dengan metode *wetonini*, santri mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh kyai. Umumnya waktu mengaji adalah sehabis shubuh, setelah dzuhur, setelah maghrib dan setelah isya' serta pelaksanaannya bisa di rumah atau di *ndalem* (rumah kyai). Yang jelas, dengan metode *weton* ini dalam mempelajari kitab agama Islam, para santri bersama-sama dengan kyai atau ustadz berada dalam suatu tempat untuk mempelajari dan mendiskusikan kitab tertentu bersama-sama.

Dalam prakteknya metode ini lebih menekankan ketaatan kepada kyai. Santri kurang pengawasan kyai sepenuhnya, metode ini lebih menekankan aspek perubahan sikap (moral) dan santri memahami isi kitab yang dibaca oleh kyai. Kyai tidak begitu memperhatikan pemahaman santri, oleh sebab itu para santri yang kurang berprestasi dan sering terlambat dalam mengikuti pelajaran dengan model ini, bisa dipastikan pasti mengalami

banyak kendala dan kesusahan dalam mengikuti pelajaran selanjutnya.

Selain itu, dalam metode *wetonan* tidak ada ikatan yang mengikat kepada santri untuk harus mengikuti hal tersebut. Metode *wetonan* adalah kyai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri membawa kitab yang sama kemudian santri yang mendengarkan dan menyimak pengajaran kyai tersebut sekaligus mengesahi atau memaknai Kitab Kuning.

Dalam metode *wetonan* ini santri diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pembelajaran ini sesuai kehendak santri. Dalam metode ini tidak ada penelitian terhadap santri dari kyai tentang tingkat kepandaian dan tidak ada bentuk kenaikan kelas. Hanya saja santri yang telah mempelajari kitabnya bisa melanjutkan ke kitab lain yang jenjangnya lebih tinggi.

1. Metode Hafalan dan *Majlis Ta'lim*

Metode hafalan atau sering disebut *tahfidz* yaitu sistem belajar yang mewajibkan santri membaca di luar kepala kitab-kitab yang diajarkan oleh kiai, meskipun tanpa memahaminya (Romas, 1997: 71). Metode ini digunakan untuk menguasai materi pelajaran. Caranya dimulai dengan belajar mati huruf-huruf kitab, memberi arti pada setiap teks, memahami dengan benar, dan kemudian menghafalnya di luar kepala. Tidak disebut pesantren kalau tidak memiliki tradisi hafalan yang kuat, bahkan terdapat beberapa pesantren yang mensyaratkan kelulusan para santri dengan menghafal beberapa kitab nadhaman seperti *al-fiyah* yang berjumlah 1000 bait, *al-jurmiyyah* dan *al-murisyah*. Paling tidak, banyak pesantren yang mewajibkan para santrinya menghafal *al-qur'an* meskipun dalam surat-surat pendek/juz 'amma.

Metode hafalan yang dikatakan sebagai warisan metode klasik yang digunakan di pesantren ini banyak digunakan di pesantren, karena metode ini cukup murah, tidak dibutuhkan biaya, dan memacu belajar sungguh-sungguh di kalangan santri. Metode ini semakin diintensifkan penggunaannya

karena mereka yang hafal kitab-kitab tersebut dianggap santri yang cerdas, dan berpotensi untuk menjadi kiai.

Adapun metode *Majlis Ta'lim* adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur yang diikuti oleh jamaah yang banyak. Dengan tujuan membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi. Dalam pelaksanaan metode ini dilaksanakan dengan kurun waktu tertentu. Tema-tema yang diangkat biasanya, berhubungan dengan akhlak, keimanan dan ketakwaan di samping menerangkan tata cara ibadah, seperti shalat, wudhu, puasa, zakat, dan ibadah haji.

4. *Mudzakarah, Musyawarah, dan Bahtsul Masail*

Yang dimaksud *mudzakarah* adalah melakukan pertemuan ilmiah secara khusus membahas masalah-masalah persoalan agama pada umumnya. Dengan penerapan metode ini diharapkan santri dapat memecahkan suatu permasalahan dengan

menggunakan suatu rujukan kitab-kitab yang tertentu (Ismail dan Mukti, 2000: 177).Metode ini memungkinkan para santri membuat abstrak dan menangkap ide-ide dasar yang terdapat dalam kitab kuning serta membuat keputusan tentang berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan.Bahkan dalam metode ini santri akan akselerasi akan membangun mental yang kuat dalam mengemukakan pendapat secara demokratis dan juga melatih santri untuk menghargai pendapat orang lain.

Metode ini di pesantren juga sering dilakukan dengan musyawarah.Kegiatan *syawir*, biasanya dilakukan pada malam hari setelah shalat malam.Kegiatan ini seringkali dipimpin oleh santri senior yang dianggap mempunyai penguasaan pada kitab-kitab tertentu.Musyawarah ini, membedakan dengan kedua metode *sorogan* dan *bandongan* yang sama-sama tidak memberi ruang para santri untuk bersikap dialogis.Bahkan lebih menekankan pada semangat *al-inqiyadh* (semangat mendengar dan patuh)

Kyai dan Guru).Sedang sekarang dengan penambahan metode musyawarah ini, terjadi semangat *ruh al-intiqad* (sikap kritis mempertanyakan).

Penerapan metode *musyawarah* dan *bahtsul masail* di pesantren yang cenderung kritis dan mengedapankan rasionalitas seperti ini bukan berarti tanpa efek. Salah satunya adalah munculnya keberanian santri ketika harus menyampaikan ketidaksetujuannya kepada para kiai.Bahkan ketika hendak bertemu Kyai pun tidak harus menggunakan sistem perantara. Mereka bisa langsung menemui di rumahnya, akan tetapi tetap diiringi dengan norma-norma kesopanan yang berlaku.

Penggunaan metode musyawarah ini, juga telah memunculkan "Tradisi Intelektual Santri". Tradisi *musyawarah* juga sering digunakan pada pesantren-pesantren mahasiswa.Menurut Binti Maunah, dalam buku hasil penelitiannya di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang.Metode musyawarah menampakkan sebuah gejala pergeseran hubungan yang terjalin antara santri dengan Kyai disana lebih mengarah pada hubungan yang bersifat rasional-

ilmiah. Dalam hubungan ini, ketika terjadi ketidaksesuaian pandangan dengan Kyai, santri bisa memberikan argumentasinya sendiri yang logis. Disini sudah terlihat sikap kritis santri yang notabene adalah mahasiswa.

Metode *musyawarah* sebagai salah satu dari pesantren mahasiswa juga sering digunakan di pesantren progresif. Sebuah pesantren sebagaimana hasil penelitian Chumaidi Syarif Romas (2001: 41), ditandai oleh beberapa karakter yaitu menggunakan metode bandongan dan sorogan di halaqah, tetapi proses pembelajarannya selalu diskusi tanya jawab, dialog, bahkan bersifat kritis. Pesantren tipe ini berbeda dengan sistem pendidikan pesantren konservatif, karena lebih menekankan pada penalaran, menyediakan kebebasan yang lebih luas dalam menyampaikan pendapat dari santri kepada guru.

Hampir mirip dengan metode *musyawarah* adalah *bahtsul masail*, dalam hal ini santri membahas dan memecahkan berbagai permasalahan dengan menggunakan rujukan kitab kuning

merupakan bagian tradisi intelektual pesantren. Letak perbedaannya, kalau *musyawarah* hampir dilakukan setiap malam dan pesertanya para santri di kalangan internal pesantren. Sementara kalau *bahtsul masail* diskusi yang dilakukan melibatkan beberapa pesantren, dilakukan oleh para santri pilihan yang memang sudah mahir membaca kitab kuning. Pelaksanannya juga dilakukan pada waktu tertentu dan topik yang diangkat biasanya mengangkat berbagai persoalan kontemporer yang sedang hangat di masyarakat.

Selain beberapa metode yang disebutkan di atas, perkembangan pesantren dari sudut metode pengajarannya juga memperlihatkan sifat dinamis yang dimiliki lembaga ini. Bahkan sekarang, sudah banyak diperkenalkanlah metode pengajaran baru ke dalam sistem pendidikan modern yang selalu memiliki resonansi di lembaga pesantren. Bentuk pengajaran modern ini secara bertahap telah diadopsi oleh pesantren, sesuai dengan dimensi waktu yang melahirkan setiap metode tersebut. Dalam jangka waktu yang panjang terlihat pengenalan metode

modern tersebut dalam lembaga pesantren mulai dari metode *madrasi*, diskusi sampai seminar.

Bab 6

PESANTREN DAN ISU-ISU KONTEMPORER

A. Pesantren dan Demokrasi

Perubahan politik yang secara dramatis berlangsung di Indonesia telah menempatkan bangsa ini dalam posisi dan konstelasi yang dilematis dan kompleks. Pertarungan elit politik telah berimbas pada ketidakharmonisan dan retaknya bangunan kohesi sosial-masyarakat di akar rumput. Kondisi semacam ini diperparah dengan sikap masyarakat yang cenderung ingin menang sendiri, sering bertindak emosional dan berakhir dengan kerusuhan/konflik. Realitas semacam ini dari perspektif pendidikan menunjukkan telah terjadinya proses rekayasa yang amat lama sehingga teori yang membuktikan adanya keterkaitan yang amat erat antara politik, ekonomi dan pendidikan tidak muncul dikalangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu transformasi pendidikan harus dilakukan agar pendidikan mampu mempersiapkan generasi baru memasuki alam demokrasi.

Transformasi menuju budaya demokratis di negara ini mutlak diperlukan. Sebab, merealisasikan budaya demokratis dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut.

Lebih-lebih dengan melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang mempunyai kelebihan yang berbeda dengan negara yang lainnya. Diantaranya Indonesia merupakan negara yang tidak saja multisuku, etnik dan agama, tetapi juga multi budaya. Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila antara satu dengan yang lainnya saling bersinergi dan saling berkerjasama untuk membangun bangsa. Namun, disisi yang lain, apabila kemajemukan tersebut tidak dikelola dan dibina dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu sekaligus penyulut konflik kekerasan yang telah menguni

energi dan merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia.

Ditambah lagi, semua orang maklum jika dalam tatanan kehidupan demokrasi terkandung nilai dan prinsip bagaimana seharusnya seseorang atau kelompok warga negara dan lembaga kenegaraan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam kerangka menjaga kepentingan dan kehidupan bersama secara rasional, toleran, adil dan damai. Oleh sebab itu, demokrasi menjadi salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan Indonesia baru yang demokratis dan berkeadaban.

Kenapa mewujudkan demokrasi berarti mewujudkan *civil society*? Sebab, dengan negara demokratis memungkinkan praktik penyelenggaraan negara dimana hak-hak asasi manusia bukan saja dilindungi namun sekaligus bisa dipraktikkan tanpa ada hambatan (Pamudji, 1983: 54). Apalagi bentuk pemerintahan demokratis merupakan bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat

(*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), terjadinya konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas (Thoha, 2004: 99). Pemerintahan demokratis bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mengutamakan perdamaian tanpa adanya kekerasan maupun pemaksaan kehendak, memberikan kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terciptanya hubungan saling menghormati antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang notabene beragam/majemuk, berusaha mempunyai kewajiban bersama mewujudkan ketertiban bersama serta menjunjung tinggi hak-hak mayoritas dibanding kepentingan individu/golongan.

Di samping itu, sistem pemerintahan demokratis dalam dunia modern ini menjadi sesuatu yang sangat ideal dan urgen. Kebebasan dan demokrasi merupakan syarat utama bagi proses modernisasi, dan modernisasi merupakan syarat utama bagi perubahan dan rekonstruksi struktur sosial (Hanafi, 2005). Karena dengan demokratislah yang

dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena peri-kehidupan bangsa yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis (Dhakiri, 2010: 47).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana menumbuhkembangkan budaya demokratis yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan rakyat banyak? Untuk menjawab ini semua institusi yang ada di Indonesia perlu berperan aktif, mendukung dan mempunyai *good will* serta ketulusan untuk mewujudkannya (Azizy, 2004: 112). Relefan dengan kepentingan ini, yaitu guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan institusi pendidikan (seperti pesantren) yang bertujuan agar warganya tidak sekedar mampu mengaji, membaca dan berhitung. Tetapi pendidikan yang juga mempersiapkan warga masyarakat dalam memahami

fungsi pemerintahan yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan memahami konsep operasional pasar bebas (Zamrani, 2010: 8).

Meminjam penjelasan Lyn Hass, bahwa dalam rangka pengembangan menuju model pesantren demokratis, pesantren perlu menerapkan pendidikan untuk semua, memberikan skill, penekanan pada kerja sama, pengembangan kecerdasan ganda, integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial (Rosyada, 2004: 18). Untuk keperluan ini, pesantren perlu dikelola sedemikian rupa dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokrasi, seperti sikap keterbukaan para kiai/ustad, memberikan kebebasan bagi para santri untuk berpendapat sekaligus sikap kritis.

Sekaligus pesantren perlu mempersiapkan masyarakat mampu menjadi warga negara yang diharapkan dapat ikut serta dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Sebab dengan keikutsertaan tersebut berarti pendidikan pesantren telah ikut andil dalam menyiapkan para santri untuk terbiasa bebas berbicara

dan mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya, dan mempelajari kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu pesantren sebagai salah satu model lembaga pendidikan yang lebih tua dari umur republik ini diharapkan menjadi pelopor pendidikan demokrasi yang mengedepankan sikap toleran. Sikap toleransi serta demokrasi akan menjadi satu-satunya perekat persatuan dan kesatuan diantara kita, yang berupaya untuk didorong. Dialog yang cerdas dan dewasa antar berbagai kalangan, baik untuk diretas dan dikembangkan. Kebersamaan dalam berkarya dilingkungan sosialnya adalah cara konkrit dalam meredam konflik. Islam dengan pesantrennya sebagai mayoritas agama didorong menjadi landasan untuk penegakan HAM dalam proses demokrasi yang damai.

Ditambah lagi, pendidikan pondok pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan bangsa memiliki posisi strategis untuk mendukung tercapainya salah satu tujuan pendidikan nasional seperti itu, yaitu membentuk masyarakat yang berbudaya, beradab dan demokratis. Apalagi, harus dicatat, dewasa ini pondok pesantren tidak hanya memainkan peran tradisionalnya, yaitu transmisi dan transformasi ilmu-ilmu keislaman, pemeliharaan tradisi muslim dan reproduksi intelektual ulama, namun lebih luas dari itu pondok pesantren telah menjadi wahana pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi nilai.

Secara fungsional pondok pesantren telah memerankan multifungsi, pesantren bukan saja sebagai tempat mengaji saja melainkan tempat mengkaji berbagai realitas dan kebutuhan *problem solving* yang sedang terjadi di luar pesantren. Di samping pesantren tetap mengaji kitab kuning, pesantren juga sebagai lembaga pengembangan intelektual, sosial ekonomi dan iptek. Pesantren telah

dijadikan sebagai sebuah gerakan penyadaran transformatif sekaligus pemberdayaan masyarakat (*empowering people*), mengadvokasi ketidakadilan atau diskriminasi gender, pluralisme, HAM dan demokrasi. Bahkan terdapat beberapa pesantren yang telah berkembang pesat menjadi sebagai lembaga pendidikan tinggi, sebagai lembaga pengembangan olah raga, seni dan budaya.

Masyarakat pesantren terutama melalui sentuhan tangan dingin para kiai mulai tumbuh kepedulian terhadap isu-isu kontemporer yang harus segera direspon oleh pesantren. Termasuk kepedulian melalui pendidikan pesantren santri ditanam dan dikembangkan sikap politik dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pesantren memang bukan lembaga politik, namun memiliki dampak yang signifikan atas proses politik lewat tanggung jawab, pesantren membekali santri dengan pengetahuan dasar tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, serta mengembangkan daya kritis dan kejujuran untuk komunikasi dengan masyarakatnya. Pesantren juga memiliki tanggung jawab melengkapi santrinya

dengan kemampuan memerankan fungsinya sebagai anak bangsa di lingkungan masyarakat yang demokratis. Lebih luas dan mendasar dari pada itu semua, pesantren memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan santri guna berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Demokrasi sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi dunia pesantren. Hal ini bisa dibuktikan oleh berbagai hal. *Pertama*, telah lama dunia pesantren menggeluti nilai-nilai demokrasi, terutama ketika muncul program pengembangan masyarakat di pesantren sekitar tahun 1970-an. Tema yang diangkat kala itu memang tidak memakai kata demokrasi, tetapi isu yang dikembangkan mempunyai kemiripan. Misal isu pengembangan masyarakat yang diangkat oleh LP3ES pada awal 1970-an, yang intinya ingin membangkitkan partisipasi masyarakat dalam membangun meningkatkan ekonomi. Jika dikaitkan isu demokrasi sekarang, barangkali program itu mirip atau sama dengan program partisipasi aktif untuk menyuarakan kehendak (Makruf, 2005: 1).

Kedua, akhir-akhir ini pesantren bahkan sudah menjadi bagian arus utama perubahan politik di tanah air. Kiai menjadi daya tarik politik yang sangat kuat karena dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam penelitian Endang Turmudi, yang mengungkap signifikansi antara dukungan kiai di Jombang dengan perolehan suara yang diperoleh sebuah partai politik. *Ketiga*, saat ini juga banyak lulusan pesantren yang terlibat aktif dalam perubahan politik secara nyata. Naiknya tokoh pesantren seperti Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) menjadi presiden adalah bukti yang nyata dari pergeseran peran politik kiai di tingkat politik yang lebih besar. Bahkan Gus Dur, terlepas dari berbagai kekurangan yang melekat padanya, ketika menjabat menjadi presiden banyak memperjuangkan demokratisasi.

Keempat, saat ini juga banyak NGO dan LSM serta kelompok studi yang anggotanya lulusan pesantren, sangat aktif menyuarakan demokrasi dan menjadi pendukung utama konsolidasi demokrasi di Indonesia. Diskusi para pakar alumni pesantren yang

terpublikasi dalam buku "Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi" juga membuktikan bahwa mereka ternyata tidak asing dengan nilai-nilai demokrasi, seperti pluralisme, kesetaraan, dan sebagainya (Suaedy (Ed.), 2003). Hal ini dikarenakan pesantren dengan misinya menebarkan Islam *rahmatan lil 'alamin*, sebenarnya sudah syarat dengan nilai-nilai humanisme universal.

Selain itu relevansi pesantren dan demokrasi bisa dilihat dari prespektif misi suci Islam yang diajarkan di pesantren yaitu untuk menumbuhkembangkan etika dan *akhlakul karimah* pada diri santri. Sementara Ide demokrasi dari kacamata perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan dan idiom demokrasi ini sebetulnya adalah sebuah idiom yang oleh sebagian orang dipersepsikan sebagai pilihan sistem politik. Oleh karena demokrasi itu sendiri dianggap mengandung napas substansi etik inheren di dalamnya (Nurtjahato, 2006: 44-45), dan menuntut prasarat bagi terwujudnya sebuah masyarakat madani,

yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung prinsip persamaan, kebebasan, pertanggung jawaban, kedaulatan rakyat, dan musyawarah maka demokrasi dengan begitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral pesantren.

Bahkan demokrasi adalah merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang menjadi jati diri Islam dan diajarkan di pesantren. Bukankah Abdurrahman Wahid pernah menyatakan bahwa, Islam itu adalah agama demokrasi. Dengan alasan; 1) Islam adalah agama hukum, sehingga orang harus diperlakukan sama. 2) Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak. 3) Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan. 4) sebagaimana demokrasi Islam juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan (Ghofur, 2002: 42-43). Islam juga memiliki sendi-sendi ajaran yang menjamin kebebasan berfikir, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpendapat. Syariah menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, dan memerintahkan pada

Kesadaran seperti itu menurut analisis Hefner (2001: 23-25) dalam bukunya *Civil Islam (Islam dan Demokrasi di Indonesia)*, muncul hampir di semua komunitas muslim yaitu pada era modern awal. Pada saat para penguasa pembaru di dunia Islam memulai modernisasi dengan maksud untuk menanggapi tantangan politik Barat. Luasnya kolonisasi Barat juga mendorong pembaru Islam di luar negeri untuk menuntut dibukanya kembali pintu penafsiran agama (ijtihad). Sepanjang jalan sejarahnya yang panjang, dunia Islam telah menyaksikan serangkaian pembaruan keagamaan, sebagian besar seruan untuk kembali ke Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi, para pembaru akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 memberikan imperatif skripturalis ini simpul baru. Bagi mereka, pesan Islam mensyaratkan agar muslim mengolah diri mereka sendiri menyangkut ilmu pengetahuan, pendidikan, dan bentuk-bentuk asosiasi modern. Pembaruan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi umat Islam keaslian firman, tapi juga sarana bagi pencapaian modernitas budaya. Satu respon terhadap perubahan

ini adalah keinginan akan persamaan, kemerdekaan dan demokrasi. Apapun etimologi historisnya, disebagian besar dunia Islam, gagasan-gagasan ini tidak lagi hanya merupakan kesanggupan akademis yang terbaratkan atau intelektual warung kopi. Ditarik dari stratosfir akademik ke dunia kehidupan lokal, gagasan-gagasan demokrsai telah menjadi satu arus dalam upaya yang lebih besar untuk memberikan bentuk etis terhadap kehidupan publik.

13. Membangun Kesetaraan Gender dan Partisipasi Politik Perempuan

Posisi perempuan dihadapan kaum laki-laki, selama ini telah menimbulkan stigma kurang menguntungkan bagi kaum hawa. Hal ini disebabkan terjadinya kontruksi kultural akibat paradigma konvensional-telogis yang sering menyematkan perempuan hanya sebagai sosok yang memiliki kodrat "kewanitaan", tidak lebih, yaitu sebagai *konco wingking* bagi kaum adam. Perempuan selalu diidentikkan dengan persoalan *dapur, sumur, dan kasur*.

Segala persoalan domestik; mengurus rumah, mencuci, memasak, *macak* (berdandan cantik agar sedap dipandang oleh laki-laki dan bisa memuaskan kebutuhan *sex* mereka) dan *manak* (melahirkan). Sementara posisi laki-laki, sering ditempatkan lebih tinggi dan mulia dibanding perempuan. Sebab, "laki-laki adalah imam bagi perempuan". Konsekuensi prespektif ini, perempuan harus manut dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dan ridlo kaum laki-laki. Menolak perintah laki-laki, dianggap kuwalat dan ditakut-takuti tidak masuk syurga. Praktis saja, sudah sekian lama, kondisi perempuan membisu dan tidak berani bicara apalagi memberontak untuk menyuarakan kebebasan dan hak asasinya.

Sungguh selama ini di tengah-tengah masyarakat kita telah mengalami berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan karena banyak yang kurang memahami konsep gender itu. Ketidakadilan ini, menurut Mansour Fakih (1996: 12) menyebabkan marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan

stereotype, pelabelan negative, kekerasan (*violence*), serta beban kerja lebih panjang dan banyak (*burden*). Bahkan para ulama juga mengalami perbedaan penafsiran tentang persoalan gender ini. Rata-rata menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memang beda, bukan masalah anatomi, melainkan juga masalah lain. Pandangan ulama klasik seperti ini, disebabkan penafsiran mereka yang "bias gender" dan menurut Amina Wadud, hal ini karena ditulis oleh laki-laki maka terjadi pelibatan pengalaman laki-laki dan penafsiran disesuaikan dengan prespektif dan kehendak/kebutuhan mereka (Suaedy & Antoni, 2009: 234-235). Sedangkan menurut Fatimah Mernisi, terbentuknya perbedaan perempuan kepada laki-laki seperti ini, bukanlah ajaran Islam karena Islam tidak memberi ruang sedikitpun terbentuknya subordinatif perempuan kepada laki-laki. Melainkan para sejarawan klasik yang telah membengkokkan posisi perempuan sedemikian ter subordinatif melalui pemelintiran teks-teks (Syam, 2012: 153).

Namun seiring perkembangan zaman dan advokasi yang dilakukan para pegiat feminisme dan

emansipasi wanita, tak ketinggalan para kiai pesantren juga ikut mengangkat martabat wanita mulai diangkat, kemudian pandangan sebelah terhadap kaum hawa ini mulai berkurang, sikap dan peran wanita tidak pada persoalan domestik dan reproduksi semata. Melainkan perempuan sudah memainkan peran di setiap lini kehidupan. Seperti keterlibatan mereka di bidang politik, menyalurkan kepentingannya melalui saluran konvensional seperti unjuk rasa/demonstrasi, dan di bidang ekonomi keterlibatan wanita mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup dramatis (Asfar, 2004: 398-399).

Pesantren telah ikut mendorong dan membangun kesadaran bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Perempuan selain harus mengurus tangga dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dan mengurus anak-anak mereka juga boleh melakukan kegiatan politik. Bahkan tak sedikit suara dari pesantren yang membacakan dengan keras dalil-dalil tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki ini. Para kiai banyak yang menjelaskan dalil di dalam

Al-Qur'an bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Perempuan juga memiliki andil yang sama bersama kaum laki-laki dalam membangun masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam surat At-Taubah: 71 yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Juga menunjukkan terdapat sejumlah hadis bolehnya perempuan terjun ke dunia politik (Syuqqah, 1997: 66), yaitu semisal hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwa Asma' binti Umais telah berhijrah ke Najasi bersama-sama orang-orang yang hijrah. Bahkan para kiai pesantren juga menunjukkan sejarah keterlibatan para perempuan dalam berjuang bersama rasul dan para sahabat, yaitu ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di Goa Tsur, sebagaimana disebutkan para

perawi yang berani mengantar makanan kepada Nabi dan Abu Bakar ternyata adalah seorang perempuan bernama Asma' binti Abu Bakar.

Semua itu mempertegas bahwa Islam yang diajarkan di pesantren memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa perempuan menduduki posisi yang setara dengan kaum laki-laki, letak perbedaan laki-laki dan perempuan hanya ditimbang dari kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Islam sangat memuliakan kaum perempuan sekaligus memberikan tanggung jawab yang sama bersama kaum laki-laki untuk membangun kehidupan ini lebih baik, berkualitas, dan beradab.

C. Peningkatan Mutu Pesantren

Setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, lebih-lebih pesantren yang mempunyai madrasah/sekolah umum dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi—sebagai penyedia layanan di bidang pendidikan sudah seharusnya menunjukkan *performance* yang baik, bermutu dan berkualitas

sebagai wujud tanggungjawabnya dan sekaligus menarik/merebut kepercayaan di hati masyarakat. Lebih-lebih seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang di Indonesia, semua lembaga pendidikan, termasuk pendidikan pesantren harus berbenah diri dan menampilkan citra positif dengan perubahan paradigma baru birokrasi sebagai *public servant*.

Lebih-lebih pesantren yang memiliki Perguruan Tinggi di dalamnya harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oleh sebab itu, pesantren dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi, improvisasi dan terobosan-terobosan cerdas dalam kerangka optimalisasi pelayanan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut kepada masyarakat luas.

Semua itu perlu diperhatikan, agar pesantren tetap *survive* dan mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan lain serta yang terpenting adalah ikut berkontribusi/lebih mampu menunjukkan jatidirinya sebagai institusi "alternatif" di

masa depan dalam rangka bisa menjawab kebutuhan globalisasi. Sebab Globalisasi adalah arus utama yang membawa dampak maha hebat terhadap ruang waktu yang mengalami percepatan atau terjadinya dalam bahasa Anthony Giddens *time space distanziation* (Giddens: 2002). Tentu saja interaksi manusia dengan teknologi, manusia dengan manusia lain, semakin intensif. Selain globalisasi juga sering ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dengan melibatkan industrialisasi, urbanisasi, dari masyarakat primitif dan berperadaban.

Maka dalam merespons globalisasi pesantren perlu menemukan pendekatan dan makna baru yang bisa didapat dari objektivikasi baik rasional maupun irasional karena perkembangan basis material, IPTEK, yang terus berubah. Pesantren dalam konteks ini, harus memandang pendidikan sebagai upaya menghadapi manusia (santri) pada realitas yang terus saja berubah saat ini dan sangat diharapkan perannya untuk mampu mengikuti arus zaman, hal ini tentu saja bukan berarti untuk mengikis kemanusiaan melainkan justru untuk menemukan kondisi air

kehidupan yang memungkinkan jiwa-raga para santri bisa berenang dengan indah.

Terdapat dua utama dari kegiatan belajar jenis baru yang perlu diperhatikan pesantren dalam menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi ini yaitu; *pertama*, pesantren perlu memadukan sesuatu yang tradisional dan modern. Sehingga, menurut Abdurrahman Wahid, memungkinkan pesantren menjadi wadah bagi resistensi moral dan budaya atau pewaris tradisi intelektual Islam (Faisol, 2011: 80). *Kedua*, antisipasi dan partisipasi. Pada aspek yang kedua ini dapat dipisahkan dalam setiap usaha untuk menimbulkan kegiatan *innovative learning*, kegiatan belajar berinovasi. Perilaku yang inovatif hanya akan timbul kalau terdapat kemampuan untuk berpartisipasi, kemampuan untuk memperkirakan secara sistematis dan realistik apa yang mungkin akan terjadi (Buchori, 1994: 68).

Semua itu perlu diupayakan pesantren dalam rangka meningkatkan mutu pendidikannya sekaligus agar para lulusannya mampu bersaing ditingkat global. Tak kalah pentingnya upaya yang perlu

dilakukan pesantren adalah memberikan peningkatan proses pelayanan (*public service*) yang mendukung ke arah peningkatan mutu yang diinginkan. Adapun substansi pelayanan publik, yang perlu ditingkatkan pesantren adalah selalu memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan—dalam rangka mencapai tujuan mereka.

Untuk mewujudkan layanan publik secara optimal, pesantren harus cukup responsif terhadap dinamika semakin menguatnya kemampuan masyarakat, baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme organisasi sosial kemasyarakatan, untuk itu tidak ada salahnya memungkinkan pesantren memperkuat kembali misinya yang berbasis *local wisdom* dan kebutuhan masyarakat. Pengalaman membuktikan bahwa birokrasi yang menghasilkan “penyeragaman” seringkali tidak cocok dengan situasi dan kondisi pada variabilitas antar daerah/masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda. Bukankah banyak program-program unggulan gagal memperoleh dukungan penuh dan partisipasi

masyarakat? Karena hal ini sekali lagi tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Seharusnya perbedaan kultural, geografis, dan ekonomis melahirkan kebutuhan yang berbeda dan menuntut program-program pembangunan yang berbeda pula. Di samping itu, pesantren perlu melaksanakan Pelayanan Publik dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.

D. Mewujudkan Pesantren Integratif

Selain persoalan peningkatan mutu dan *public service* di atas, terutama sekali dalam melahirkan generasi masa depan yang kredibel, bermutu dan berkualitas—pesantren juga perlu serius memikirkan lahirnya generasi “bertakwa”, sebagaimana salah satu visi dan misi terdepan pesantren. Untuk keperluan ini, pesantren ke depan perlu mensinergikan antara pengembangan ilmu-ilmu umum dan agama sekaligus. Dalam konteks ini, pesantren tidak melulu dengan kajian keilmuan keagamaan *an sich* yang terkesan dikotomis mengesampingkan ilmu-ilmu sekuler.

Tetapi juga bisa mengembangkan disiplin ilmu-ilmu umum dan kebudayaan. Sehingga memungkinkan pesantren bisa menggambarkan ekspresi dan geliat untuk memadukan dua unsur keilmuan (umum dan agama), yang biasanya dipandang terpisah dan berlawanan dalam sebuah pendidikan integratif dan memungkinkan digelarnya ilmu-ilmu yang masuk katagori *liberal art*, di samping tidak melupakan kajian kitab kuningnya yang menjadi ciri khas pesantren. Semua ini perlu dipertimbangkan oleh pesantren dengan *ration detre* untuk menjawab kebutuhan pasar, perkembangan sains dan teknologi dengan tetap berpijak pada kultur masyarakat Indonesia yang agamis.

Apalagi, gagasan untuk meintegrasikan antara ilmu sains dan agama, akhir-akhir ini kian marak diperbincangkan oleh agamawan/teolog, akademisi bahkan oleh orang awam sekalipun. Hal ini didasarkan pada realitas semakin berkembangnya dunia sains berikut turunannya teknologi yang cenderung berwatak ateistik-materialistik, dan kerap kali mengancam eksistensi agama.

Karena sains pada wataknya adalah bersumber dari kebenaran rasio dan melalui uji eksperimentasi. Maka sering hasilnya dikonfrontasikan oleh ilmuwan dengan kebenaran agama, yang berbasis pada wahyu dan keimanan. Seolah-olah, antara keduanya saling berhadap-hadapan dan tidak bisa dipertemukan. Bahkan tak jarang hasil penemuan Sains malah menyudutkan agama, sungguh ironis.

Sementara dalam Islam sebetulnya tidak mengenal dikotomisasi ilmu pengetahuan. Sebab pada hakikatnya Islam melalui pendidikannya selalu berbasis integrasi sains dan esoterisme agama, karena secara konseptual pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk *jasmaniah* maupun *rohaniah*, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Dengan demikian pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu seutuhnya sekaligus pewaris nilai-nilai agama Islam.

Memang pada praktiknya masyarakat muslim pernah mengalami dikotomisasi ilmu pengetahuan selama berabad-abad karena terlalu menekankan ilmu-ilmu akhirat dan meninggalkan ilmu-ilmu sekuler (terutama ilmu teknologi dan sains). Dan hal ini sebagaimana kita ketahui hal ini menyebabkan kemunduran dunia muslim atas Barat serta menyebabkan disintegrasi politik ummah dan keterbelakangan kehidupan sosial-ekonomi dan intelektual kaum muslim. Tapi derita akibat penetrasi Eropa yang pernah membawa kehancuran dunia muslim tersebut, tidak selamanya direspon secara apatis oleh sebagian kaum muslim. Justru, geliat sebagian kaum muslim untuk merevitalisasi kehidupan umat muslim dalam semua lini kehidupan makin "menonjol" seiring dengan perkembangan ilmu dan sains (teknologi) di era Globalisasi sekarang. Meskipun harus disadari bahwa fenomena itu, sebenarnya diawali oleh Ismail al-Faruqi pada tahun 1982 dengan gagasannya tentang "islamisasi ilmu". Tapi, pembicaraan konsep ini, sekarang ramai menjadi

pembicaraan dan mengalami diversifikasi pada wilayah keilmuan yang sangat luas.

Sebagian masyarakat muslim sadar, bahwa dengan memadukan dua kekuatan ilmu tersebut akan mampu mengembalikan peradaban Islam yang pernah dicapai dalam hal menjadi pusat peradaban dan memiliki supermasi keilmuan. Di mana pada periode di antara kemunduran intelektualisme Romawi dan kebangkitan Eropa, Islam mampu mensinergikan antar berbagai ilmu secara efektif. Sebagaimana pernah ditunjukkan William Montgomery Watt (1997: 24), proses mensinergikan antara sains dan agama sebenarnya dimulai ketika orang Arab dapat menaklukkan Irak dan mereka menemukan perguruan-perguruan yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani, sekalipun menggunakan bahasa Siria sebagai bahasa pengantar. Orang Arab secara khusus tertarik kepada kedokteran dan astronomi Yunani; yang terakhir ini (astronomi) sangat bermanfaat dalam menentukan arah yang harus dituju di berbagai wilayah imperium mereka yang terbentang luas ketika sembahyang, yakni ke arah

Mekkah. Lewat kontak dengan para ahli serta dengan murid-murid sekolah Irak yang telah masuk Islam—beberapa ulama mulai tertarik dengan pemikiran Yunani, khususnya filsafat yang sekitar pada tahun 800 dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan teologi filosofis. Peristiwa ini disebut dengan istilah gelombang Helenisme. Dalam rentang 300 tahun, bisa mengantarkan intelektual muslim menempati posisi pemikiran Yunani atau sering disebut Neoplatonisme. Ilmu-ilmu Yunani pada saat itu dikembangkan sedemikian rupa secara khusus dalam bidang kedokteran dan farmasi pertanian.

Ilmuwan muslim pada saat itu sebagaimana dijelaskan oleh Azzumardi Azra (2012: 14), sungguh telah mendominasi cakrawala keilmuan dalam berbagai disiplin ilmu, mencapai kemajuan peradaban dan mempunyai kebanggaan sebagai pusat riset intelektual dan teknik. Karena pada zaman itu, para filosof Islam, sebagaimana dijelaskan Bassam Tibi (1994: 187), mampu mensinergikan antara nilai-nilai pencerahan Eropa ke dalam Islam dalam bentuk etika religius. Averroes dan Avicenna merupakan

filosof Islam yang menurut mereka tidak ada kontradiksi antara kenggotaan dalam dunia Islam dan adopsi filsafat Yunani dan rasionalisasi kosmos yang menyertainya.

Selain filsuf yang disebut di atas, sebenarnya terdapat juga beberapa filsuf muslim dengan paradigma integrasi yang sama yaitu Al-Kindi, Al-farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Ghazali, Ibnu Rusyda, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Dimana dalam upayanya membedah hakikat kebenaran selalu menggunakan dua pendekatan holistik-integralistik, melalui penalaran rasional-diskursif (filsafat) pada satu sisi dan kesadaran emosional-intuitif (batin) pada sisi yang lain. Filsafat dalam hal ini mewakili dimensi sainsnya, sementara batin mewakili aspek agama. Inilah yang menurut al-Jabiri disebut dengan pendekatan bayani (tek), burhani (filsafat), dan irfani (rasa) (Roibin, dalam <http://syariah.uin-malang.ac.id>).

Atas dasar pertimbangan itu semua, keinginan mewujudkan integrasi keilmuan di pesantren sekarang ini sesungguhnya sangat tepat karena pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam sudah

semestinya selalu berpijak pada Al qur'an dan hadist yang ada tergambar dengan jelas bahwa pendidikan Islam itu selalu berusaha memadukan unsur *duniawiyah* dan unsur *ukhrawiyah*. Dalam pendidikan agama Islam, pendidikan merupakan suatu pembina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, berpikir dan berkarya untuk kemaslahatan dan lingkungannya dan menyiapkan mereka untuk merealisasikan fungsi kehambaan kepada Allah dan misi kekhalfahannya di muka bumi sebagai makhluk yang memakmurkan kehidupan bersama dengan aman, damai dan sejahtera.

Selain itu, pesantren yang berusaha memadukan pendidikan Islam dan sains modern harus berangkat dari cita-cita Al qur'an tentang manusia, serta kegiatan pendidikan yang berorientasi transedental yang tercermin secara jelas dalam rumusan filsafat pendidikannya, agar kegiatan pendidikan mempunyai makna spiritual yang mengatasi ruang dan waktu. Artinya filsafat pesantren terpadu itu harus berangkat dari filsafat pendidikan teosentris, yang menurut Mastuhu mempunyai ciri-ciri: *pertama*; mengandung

dua jenis nilai yaitu wahyu tuhan dan nilai kebenaran yang relatif hasil penafsiran manusia terhadap wahyu tuhan. *Kedua*; nilai itu mempunyai hubungan hirarkis, yakni nilai absolut yang merupakan supermasi kebenaran relatif, nilai relatif tidak boleh bertentangan dengan nilai absolut (Karim, 1991: 37). Setelah itu pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikan yang integral dan berorientasi pada aspek *teotroposentris* secara dinamis, dan berorientasi pada pengembangan seluruh potensi dan dimensi peserta didik secara proporsional.

Format pendidikan integratif inilah yang nantinya diharapkan akan mampu membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan Islam, khususnya dapat melahirkan generasi Islam yang tidak hanya pandai dalam ilmu keislaman melainkan juga cakap dalam ilmu pengetahuan umum. Paling tidak itulah penggambaran ideal sebagaimana yang pernah dialami oleh dunia muslim di abad pertengahan. Dan perlu direalisasikan pada praktik pendidikan muslim abad sekarang agar mampu mencetak kader-kader

intelektual yang mumpuni dan bisa berkompetisi dengan negara-negara barat.

Demi keberhasilan terwujudnya bentuk pesantren integratif sudah saatnya memang dalam upaya merealisasikan integrasi keilmuan di pesantren perlu mengeksplisitkan secara jelas keterhubungan yang bersifat *crossdispline*, daripada sekedar interkoneksi yang selama ini telah nyata banyak menimbulkan masalah. Sebab kalau hanya sekedar menjejerkan dan menghubungkan dua keilmuan dalam satu institusi pesantren—yang memiliki sumber keilmuan berbeda. Maka ke depan dikhawatirkan mengalami sejumlah masalah seperti bagaimana penyusunan kurikulum, metode dan penyediaan tenaga ahlinya.

Bahkan bisa jadi, kalau hanya sekedar integrasi dan interkoneksi dikawatirkan ilmu-ilmu agama akan mengalami *periferal science* alias termarginalkan dan kalah dengan keilmuan umum. Tetapi yang perlu dilakukan adalah sebuah dialog dalam posisi yang *equal* dan komplementer yang memungkinkan antar ilmu tersebut saling memperkuat dalam konteks

pengembangan “keilmuan” dan bersifat non-bipolar.

E. Paradigma Keilmuan Pesantren Masa Depan

Untuk membangun paradigma keilmuan pesantren ke depan, selain harus menunjukkan ontologi dari hakikat dan struktur keilmuan, epistemologi dari obyek, cara memperoleh dan ukuran kebenaran keilmuan juga harus menunjukkan aksiologi. Kegunaan keilmuan yang diharapkan dan dikembangkan pesantren selain harus mampu menghasilkan ilmu-ilmu baru yang bersifat *theo-antroposentris* juga *discovering indiginous scienc* dan memiliki kepedulian terhadap *local wisdom*. Dengan harapan *theo-antroposentis* dan berbasis *local wisdom* bisa selalu menginspirasi visi dan misi pesantren dan bisa dijadikan sebagai *end-in-view* setiap pesantren.

Harapanya, setiap pesantren dengan paradigma pendidikan integral seperti ini, akan mampu menjadi institusi yang membiasakan *civitas akademiknya* untuk berperilaku sebagai masyarakat global, tanpa

tercerabut dari akarnya atau tanpa kehilangan jati dirinya sebagai manusia dengan karakter lokal. Maksudnya tiada lain adalah karakter cendekiawan sekaligus ulama' yang berkepribadian sebagai bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang bertalian erat dengan Pancasila sebagai identitas lokal di tengah-tengah gempuran budaya global.

Pesantren sebagai kawah *condrodimuko* buat para santri harus memberikan banyak pengalaman dan penyadaran akan pentingnya menjadi manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Terutama pesantren tidak sekedar menampung santri sebanyak-banyaknya melainkan harus sungguh-sungguh mempersiapkan para santri menjadi lulusan yang tidak sekedar lulus dan menggondol gelar akademik, melainkan menjadi pribadi-pribadi/insan yang tidak hanya sekedar "pintar" secara logika, tetapi memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap realitas masyarakat disekelilingnya.

Praktik pendidikan yang perlu diterapkan pesantren, harus berusaha menggunakan pendekatan cermat dengan suatu orientasi membuat lembaga

pendidikan yang lebih baik dan dapat dipercaya/menjadi kebanggaan masyarakat. Dari prespektif tujuan dan kurikulum yang harus didesain telah mempersiapkan para peserta didiknya berfikir kritis, objektif dan berkontribusi positif, serta mempunyai *self esteem* untuk membangun bangsa dan negaranya.

Selain itu pesantren dalam proses belajar mengajar perlu lebih memandang proses (*by cost*) daripada hanya sekedar hasil (*the result of teaching and learning*). Hal ini bisa dibuktikan dari para santri yang akan masuk harus telah dipersiapkan sebuah lingkungan pendidikan yang menerapkan inkulturisasi secara total terhadap mereka dan sebuah sistem pendidikan yang sungguh telah mendisiplinkan semua santri serta menyediakan pembiasaan yang dapat dijadikan sarana pembelajaran, sehingga faktor imitasi, *uswah hasanah* dapat terwujud. Setiap pagi, para santri sudah harus bisa menyaksikan para kiai/ustad yang ramah, hangat dan selalu tersenyum melayani semua kepentingan para santri. Para santri yang wajib mengikuti proses pendidikan dan semua

wajib mengambil kurikulum pesantren yang telah ditentukan serta mengerjakan berbagai tugas tambahan dari ustadz mereka masing-masing. Para kiai dan ustadz, juga tidak sekedar mentransmisikan segudang teori/ilmu kepada para santri. Melainkan, mereka telah menjadi seorang pendamping dan *modeling* bagi mereka.

Selain itu, pesantren juga harus mengimplementasikan konsep pendidikan sebagai proses humanisasi dan bernuansa multikultural, mungkin dengan menerima para santri yang beragam dari luar/dalam negeri. Sungguh kondisi seperti ini, mampu menginspirasi dan menumbuhkan keingintahuan para santri, memungkinkan mereka mendialogkan antara satu kepercayaan kepada yang lain serta merumuskan nilai-nilai apa yang seharusnya dikembangkan, dipertahankan dan sekaligus diimplementasikan di lingkungan/di luar pesantren. Sebuah praktik pendidikan yang tidak sekedar mendiskusikan pentingnya multikulturalisme, melainkan telah merayakannya pada tataran implementatif.

Kondisi seperti itu perlu didukung oleh proses belajar mengajar yang telah mendorong para semua civitas pesantren, terutama ustadz dan para santri untuk melakukan penelitian yang berkontribusi secara teoritis sekaligus praktis, dengan upaya reinventing nilai-nilai lokal. Sehingga memungkinkan mengembalikan praktik pendidikan pesantren, yang selama ini sudah mulai berjarak dengan masyarakat, dapat berhadapan dan berpijak pada kepentingan masyarakatnya itu sendiri. Harapannya dengan kesadaran para santri mengerti modal sosial dan kultural yang dimiliki masyarakat, mereka dapat menjadi bagian penting dalam pertumbuhan dan pembangunan masyarakat mereka (*back to basic*). Langkah seperti ini, menemukan makna pentingnya untuk segera mengembalikan potret pendidikan kita yang cenderung kebarat-baratan dan meninggalkan tradisi dan karakter lokal dan telah secara nyata ikut menggeser pola pikir dan budaya bangsa Indonesia dari masyarakat agamis-religius menjadi masyarakat yang pragmatis dan konsumtif.

Apalagi dengan melihat realitas munculnya sikap-sikap keberagamaan trans-nasional yang disadari atau tidak telah tumbuh subur di sejumlah lembaga pendidikan apalagi di pesantren. Fenomena radikalisme ini, sungguh telah menjadi semacam dirкусus yang tiada henti dan santer dibicarakan oleh semua pihak. Karena radikalisme agama telah menimbulkan persoalan serius bagi tatanan dan struktur masyarakat Indonesia yang pluralistik dan multikultural. Fenomena radikalisme ini perlu diwaspadai oleh setiap pesantren—sebagai langkah antisipatif perlu penyadaran kepada setiap santri, terutama melalui pendidikan yang moderat, inklusif dan berwawasan kemajemukan serta menolak setiap gerakan yang mengatasnamakan agama apapun yang secara nyata sangat berlawanan dengan Negara kita yang berideologi Pancasila. Apalagi, gerakan agama yang secara jelas telah menimbulkan gesekan-gesekan dan sejumlah kekerasan di Negara yang sangat menghargai keanekaragaman ini.

Semangat kembali kepada penegakan syariat Islam yang terus di gelindingkan oleh kelompok

kelompok radikal akibat ketidakpuasan atas sistem yang telah ada dan secara nyata telah mengganggu hubungan mesra antaragama di Indonesia. Sebagaimana analisis Slamet effendy, hal seperti ini menunjukkan bahwa begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya (Yusuf, 2011: 5). Pemeluk agama di Indonesia telah menjadikan doktrin agama sebagai *main drive*, *primum mobile*, dan *push factor* kekerasan yang mereka lakukan (Handoko, 2006). Terbukti sebagian besar kerusuhan sosial yang terjadi di Tanah Air, hampir semuanya melibatkan sentiment keagamaan. Fenomena kekerasan seperti ini akan terus berlanjut, manakala tidak dicarikan pemecahan dan mencoba membendung arus infiltrasi jaringan radikalisme agama tersebut yang notabene telah merusak pemikiran anak-anak muda, termasuk para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Maka, lembaga pendidikan pesantren bersama sejumlah

lembaga-lembaga pendidikan lain di Indonesia perlu melakukan upaya penanggulangan merembesnya ajaran-ajaran radikalisme agama tersebut. Pesantren yang *notabene* merupakan pendidikan agama Islam di Indonesia, harus selalu mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai agama yang moderat dan humanis. Hal ini supaya terhindar dan tidak "kecolongan" dengan ditemukannya sejumlah aktivitas pencucian otak di dalam pesantren, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal.

Untuk bisa keluar dari persoalan serius seperti itu dan demi menyelamatkan masa depan para santri, semua pihak harus bekerjasama dan saling introspeksi diri dengan mencoba melakukan terobosan-terobosan cerdas guna mencounter semua gerakan radikalisme agama. Dalam konteks ini, pesantren perlu merealisasikan proses pendidikan yang sering diterjemahkan dengan *at-Ta'dib* oleh Naquib al-Attas (1979) daripada sekedar *at-ta'lim*. Termasuk pada aspek ini, fungsi pendidikan yang harus diperkenalkan di pesantren adalah membekali para santri berpikir inklusif dan memberikan pendampingan dalam

persoalan agama (kalau perlu dengan bekerjasama dengan para pakar/ahlinya), di samping membatasi ruang gerak masuknya radikalisme agama, dengan kembali mengorganisasi peran masjid atau majlis-majlis ta'lim sebagai sarana dakwah/pencerdasan masyarakat. Menawarkan kurikulum-kurikulum yang berbasis kearifan lokal seperti kitab-kitab yang mampu meningkatkan kebersamaan dan *ukhuwwah*. Tidak ada salahnya, pesantren dengan meminjam ungkapan John Sealy (1986) perlu meningkatkan keberagaman para santri dengan keyakinan agama mereka masing-masing, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi.

Pesantren perlu mempraktikkan pendidikan anti-radikalisme, yang perlu menolak setiap metode pembelajaran yang bersifat doktrinal, monolog dan dipenuhi muatan formalitas dan cenderung menolak realitas pluralitas. Pendidikan anti-radikalisme lebih menitikberatkan pada pendekatan yang lebih mengalir dan komunikatif. Agama peserta didik pun, dapat dijadikan sebagai materi untuk didiskusikan dan

didialogkan dengan mencoba membandingkan dengan agama dan kepercayaan orang lain. Sehingga, pada tataran ini, mereka dapat menemukan momentum untuk saling mengenal dan menghormati keanekaragaman budaya dan agama (Ma'arif, 2005). Pendek kata, semua ini dengan mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang multikultural, dengan beragam suku, etnik, dan budaya. Maka pesantren berwawasan multikulturalisme perlu direalisasikan untuk menjaga dan mengakomodasi potensi yang ada sebagai salah satu kekayaan bangsa ini. Menumbuhkan pemahaman para santri dan masyarakat terhadap nilai-nilai pluralitas yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Sekaligus membawa hubungan antarmanusia dan antaragama untuk tetap harmonis tanpa adanya konfrontasi ataupun hal-hal yang dapat membawa adanya radikalisme dan eksklusivisme. Karena kedua sikap ini bisa menjadikan hidup pada suatu kondisi yang membahayakan dan merugikan kehidupan manusia.

Reference

- A. Jauhar Fuad. *Pesantren Sekolah Elit*. (dalam jurnal tribakti, 2010)
- Aan Komariah Engkoeswara. *Administrasi Pendidikan*. (Bandung: ALFABETA, 2010).
- Abd A'la. *Pembaruan Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren: 2006).
- Abd Halim Soebahar. *Moderenisasi Pesantren Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*. (Yogyakarta: LKIS, 2013).
- Abd. Halim Soebahar. *Modernisasi pesantren*. (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2013)
- Abdul Ghofur. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Abdul Halim Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita*. (Jakarta: Gemalnsani Press, 1997)
- Abdul Kadir al-Jufri. *Terjemah Ta'lim Muta'allim*. (Surabaya: Mutiarallmu, 1995).
- Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta : Kencana, 2006)
- Abdul Munir Mulkhan. "Nalar Spiritual Pendidikan Solusi problem Filosofis Pendidikan Islam". (Yogyakarta, Tiara Wacana; 2002)
- Abdul Mustakim. *Mendialogkan Islam dan Demokrasi; Persimpangan Doktrin dan Implementasi*, dalam Jurnal Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli, 2002.

Abdullah Aly. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).

Abdurrahman Ma'ud. *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta:LKIS,2004)

Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2000)

Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Affandi Muchtar. *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalimah, 201).

Ahmad Amir Aziz. *Neo Modernisme Islam di Indonesia; Gagasan sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999).

Ahmad D. Marimba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)

Ahmad Dardiri. (2008). "Aspek-Aspek Filsafat dan Kaitanya dengan Pendidikan". *Fondasia Majalah Ilmiah Fondasi Pendidikan*. Vol 1 No. 9/Maret. Yogyakarta: UNY.

Ahmad Dardiri. (2009). " Tantangan Guru Profesional Dewasa Ini". Dalam Suyatno, et.all. *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Uhamka Press.

Ahmad Muthohar. *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren Di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007)

Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. (Yogyakarta:LKiS, 2003).

Ahmad Suaedy dan Raja Juli Antoni. *Para Pembaharu: Pemikiran dan Gerakan Islam Asia Tenggara*. (Kuala Lumpur: SEAMUS, 2009)

Ahmad Tafsir. *FILSAFAT UMUM*. (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1990).

Ahmed b. Muhammad Maskawayh, *The Refinement of Character*, Terj. Oleh Constantine K. Zurayk (Beirut: American University of Beirut, 1968).

AKH.Muwafik Saleh. *Membangun Karakter dengan Hati Nurani* (Malang: Erlangga, 2012)

Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKIS, dan IAIN Sunan Ampel, 2007)

Ali Usman, *Kyai Mengaji Santri Acungkan Jari Refleksi Kritis atas Tradisi dan Pemikiran Pesantren*

Amin Haedari dan Abdullah Hamid, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta: IRD Pres, 2004)

Amir Hamzah WS., *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*. (Jember: Muria Offset, 1985)

Anasom. *Kyai Kepemimpinan dan Patrose*. (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2002)

Anthony Giddens. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita* (Jakarta: Gramedia, 2002)

Arief Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Arifin HM. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam di Era Globalisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Azyumardi, Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium II*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

Azzumardi Azzra, *pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000).

Bernard Lewis, *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun Sinerji Warisan sejarah*, terj. Mun'im A. Sirry, (Jakarta: Paramadina, 2002)

ChabibThoha, dkk (Eds.). *Reformulasi Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996)

Chuck Saufier. *School Climate and Culture*. artikel dipublikasikan oleh *Maine's Best Practices in Bullying and Harassment Prevention*, 2005.

Chumaidi Syarief Romas. *Kekerasan di KerajaanSurgawi*. (Yogyakarta: KreasiWacana, 2003).

Clifford Greertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983)

Corliss Lamont. *The Philosophy of Humanism*. (USA: Humanist Press, 1997)

Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Capital*. (San Francisco: Berret-Koehler, Inc, 2004).

David J. Wren. *School Culture: Exploring The Hidden Curriculum*. http://findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_135_34/ai_60302524/. Diunduh hari Senin, 5 Juni 2012.

Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Departemen Agama RI., *Pondok Pesantren dan Dakwah Islamiyah*, (jakarta: Departemen Agama RI., 2003).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: P3M, 1989: 189).

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1993)

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. *Pengembangan Budaya dan Iktim Pembelajaran di Sekolah* (materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah, Jakarta, 2007).

DwiSiswoyo, dkk. *Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press, 2007).

Elizabeth R. Hinde. *School Culture and Change: An Examination of the Effects of School Culture on Process of Change*.

Elizabeth Ferguson. *Hidden Curriculum Paper*. (University of Phoenix, November 9, 2004).

Faisol. *Gus Dur Pendidikan Islam*. (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011)

Fazlur Rahman. *Islam*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)

Fazlur Rahman. *Major Themes of The Qur'an*, ter. Anas Mahyudin, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*. (Bandung: Pustaka, 1984).

Francis Fukuyama. *The Great Disruption*, diterjemahkan oleh Ruslani. (Jakarta: Qalam, 2007).

Fred N. Kelliner. *Foundations of Behavioral Research*. (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1973).

George R. Knight. *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*. (Michigan: Andrews University Press, 1982).

Gerald Lee Gulek. *Philosophical Alternatives in Education*. (Ohio: A Bell & Howell Company, 1974).

H.A.R. Tilar. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. (Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 2006).

H.M. Arifn. *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama*, (Semarang : Thoha Putra, 1983).

Haidar Putra Daulay. *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009)

Haidar Putra Daulay. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).

Hanafi Dhakiri, *41 warisan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010)

Harold Entwistle. *Class, Culture and Education* (London: Methuen & Co Ltd, 1977).

Harold H. Titus, et.all. *Living Issues in Philosophy*. Diterjemahkan H. M. Rasjidi. (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1979).

Harold Titus. et all. *Living Issues in Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasjidi. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984).

Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

Hasan Langgulung. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003)

Hendra Nurtjahito. *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006)

Ibrahim Musa, *Pesantren Dalam UU Sisdiknas 20/2003: Suatu Transformasi Pendidikan Keagamaan Islam*, Jurnal Edukasi Vol 1 Desember 2003, Jakarta

Imam PriyoHandoko. *Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah*. (Kompas, Rabu 15 Februari, 2006)

Imam Sutari Barnadib. *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta : Andi Offset, (1992)

Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai*, (Malang: kalimasahada, 1993)

In'am sulaiman, *Masa Depan Pesantren eksistensi Pesantren di Tengah Globalisasi Modern*, (Malang: Madani, 2010)

Ismail dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Ivan Illich. (1971), *Deshooling Society*, New York: Harper & Row Publisher.

J.N. Pieterse. *Globalization and Culture*, USA: Rowman & Littlefield Publisher, INC, 2004).

J.P. Sartre. *Existentialism and Humanism*, diterjemahkan oleh Yudhi Sutanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Jajat Burhanuddin. *MENCETAK MUSLIM MODERN*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

Jamal al-Din Muhammad. *Lisan al-Arab*, Jilid X, Beirut: Dar Sadri, 1990

Jamaluddin Malik (Ed). *Pemberdayaan Pesantren: Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005)

Jamhari Makruf. "Pengalaman Pondok Pabelan: Demokrasi Kecil di Tengah-tengahLingkunganPesantren", makalah seminar Pendidikan Demokrasi diPesantren 20-22 April 2005 di Cipayang Bogor.

Jeanne Ellis Ormrod. *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, (Jakarta : Erlangga, 2008).

Jhon I. Goodlad. *A Place Called School Prospect for the Future*. (AS: McGraw-Hill, 1984).

Jhon W. Cresweel, *Research Design (Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches)* (London-New Delhi: SAGE Publications, 2003).

John Dewey. *Education and Democratic*.(The Pennsylvania State University, 2001).

John P. Keeves & Gabriele Lakomski. *Issues in Educational Research*. (New York: Pergamon, 1999).

Joy A. Palmer. *Fifty Modern Thinkers on Education*, diterjemahkan oleh Farid Assifa (Yogyakarta:IRCISoD)

Julia Hauberer. *Social Capital Theory*. (VS Research, 2011).

K. H. Dewantara. *Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004).

Kant D. Petterson n Terrence E. Deal.*The Shapping School Culture Fieldbook*.(USA: Jossey Bass, 2009).

Kenna M Colley.*Coming to Know School Culture*.(Disertasi program doktor pendidikan, Virginia, 1999).

Khozin. *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia*.(Malang: UMM Press, 2001).

Knud Illeris, *The Three Dimension of Learning*. (Florida: Krieger Publishing Company, 2002).

M. Ali Hasan & Mukti Ali. *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2009).

M. Athiyah Al Abrasy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

M. Bahri Ghazali. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. (Jakarta: CV. Prasasti, 2002).

M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)

M. Sastrapratedja. *Epistemologi kultural*. (Yogyakarta: PPs UNY, 2009).

M. Zainudin MA. *Paradigma Pendidikan Terpadu*. (Malang: UIN Malang Press, 2010)

Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara, 1979)

Mahmud. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010).

Manfred Ziemek. *Pesantren dalam Perubahan*. (Jakarta: P3M, 1986).

Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1996).

Mardalis. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Martin Van Bruinessen. *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS, 1994).

Marzuki Wahid, dkk. *Pesantren Masa Depan* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).

Miftah Thoha. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Miftah Farid. *Peran Sosial Politik Kiai Indonesia*. (Jurnal Sosioteknologi, Edisi 11 Tahun 6 Agustus, 2007).

Mochtar Buchori. *Pendidikan dalam Pembangunan*. (Jogja: PT Tiara Wacana Yogya, 1994).

Moh. Yamin. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2009)

Mudyaharjo Redja. *Filsafat Ilmu Pendidikan* (Bandung, PT Rosdakarya, 1976).

Muhammad Al-Buraey. *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, terj. Achmad Nashir Budiman. (Jakarta: Rajawali 1986)

Mujamil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. (Erlangga, 2002).

Mujamil Qomar. *Manajemen Pendidikan Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2007).

Mujtahid, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Malang: Maliki Press, 2011)

Mukti Ali, *Beberapa masalah pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: yayasan Nida 2000).

Mulyanto Sumardi. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Dharma Bhakti, 1977)

Nadine Engel, et.all, *Prinsipal in School Culture with Positive School Culture*, (dipublikasikan oleh studi pendidikan, 2008).

Nana Syaodih Sukmadinata. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

Noeng Muhadjir. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999)

Noeng Muhadjir. *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial*. Edisi V. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004)

Nurcholis Madjid. *Masyarakat Religius*. (Jakarta: Paramidina, 1997)

Nurcholis Majid. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1997)

Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

NurSyam. *Mazhab-Mazhab Antropologi*. (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012)

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2005).

Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany. *Falsafah Al-tarbiyah Al-Islamiyyah*. Terjemahan Hasan Langgulung. (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).

Oong Komar. *Filsafat Ilmud dan Pendidikan*. (Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI, 2007)

Paulo Freire. *Pedagogy of Freedom: Ethich, Democacy, and Civic Courege*, (New York: Rowman & Little Publishers, INC, (1998).

Pujiriyanto. *Membangun jati diri dan ... percaya diri bangsa melalui pendidikan profetik*. (Yogyakarta: UNY Press, 2006).

Putusan Pengujian UU Sisdiknas. (Majalah BMK: Berita Mahkamah Konstitusi No. 13 November-Desember, 2005).

R.M. Berns. *Child, Family, School, Community*. (USA: Thomson, 2004).

Rafil Maslawski, *School Culture and School Performance*, Netherland: Twente Univerty Press, 2001.

Ratna Wilis Dahar (2011), *Teori-teori belajar dan pembelajaran*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Retno Sriningsih Satmoko. *Landasan Kependidikan*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999).

Rexford Brown dalam tulisan berjudul *School Culture and Organization: Lesson from Research and Experience*, makalah disampaikan untuk *the denver commission on Secondary School Reform*, November 2004.

Ridlwani Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2010)

Robert Eaker dan Janel Keating, A shift in School culture dalam Majalah Theme "Profesional Learning Communities", Summer, 2008, Vol. 3. No. 3.

Robert W. Hefner, *Civil Islam (Islam dan Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: ISAI, 2001).

Rosen, Bruce F. Sistem-sistem Filsafat dan Pendidikan, diterjemahkan oleh Sudiarja (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 1998).

S. Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, (Bandung: al-Maarif, 1977).

Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai & Pesantren*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007)

Salam, *Pengantar Pedagogik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Salkind, Neil J. (2004), *An Introduction to Theories of Human Development*, London: SAGE Publications.

Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

Satrapratedja, M. *Pendidikan sebagai Humanisasi*. (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001).

Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975)

Sildu Galba, *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)

Slamet Effendy Yusuf, *Review 5 Tahun Kehidupan Umat Beragama Indonesia: Prespektif MUI*. (Jakarta: Makalah, 2011)

Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

Sudjoko Prasodjo, *Profil Pesantren*, (Jakarta : LP3ES: 1975).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*..... (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007).

Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013)

Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional: dalam peredaran Global*. (Jakarta: PSAP, 2006)

Suyata, "Mengembangkan Modal Sosial dan Modal Budaya untuk Renovasi Pendidikan di Indonesia". (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pendidikan Program S3 UNY, tanggal 18 Oktober 2011).

Syafii Ma'arif, *Moral Pejabat Tinggi Negara* (Kedaulatan Rakyat, 28 September, 1999).

Syamsul Ma'arif, dkk, *School Culture Madrasah dan Sekolah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal : Studi Etnografi Pesantren Tebuireng Jombang*, (Yogyakarta : Progam Pascasarjana UNY, 2014)

Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005).

Tadjab. *Perbandingan Pendidikan*. (Surabaya: Karya Abditama, 1994).

Umiarso dan Nur Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan*. (Semarang : Rasail Media Group, 2011)

Van Peursen. *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976).

Van Peursen. *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Gramedia, 1985).

Wahjoetomo. *Perguruan Tinggi Pesantren*. (Jakarta : Gemalnsani Press, 1997)

Waini Rasyidin, dkk. *Landasan Filosofis Pendidikan Dasar*. (Bandung: UPI, 2007).

Wiel Veugers (Ed.). *Education and Humanism Linking Autonomy and Humanity* (Netherlands: Sense Publishers, 2009).

Wiji Suwarno. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2009).

William Lillie. *an Introduction to Ethics*. (New York: Barnes Nable, 1957).

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

Yoyon Bahtiar Irianto. *Kebijakan pembaharuan pendidikan: konsep, teori, dan model*, Cetakan ke-2, Januari. (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2012).

Zakiah Derajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Zamahsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Study tentang Pandangan Hidup Kyai (Pesantren Tradition: study of Kyai's Way of Life)*. (Jakarta: LP3ES, 1982)

Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta: LPES, 1985).

Zamrani. *Pendidikan untuk Demokrasi*, (Yogyakarta : Bigrif Publishing, 2010.)

Zamroni. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011).